



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

**LAPORAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**LPPD**

**“ SANGGAU MAJU DAN TERDEPAN ”**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh kewajiban dalam mengemban amanah untuk melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sanggau dengan baik dan lancar pada Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus daerah urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dengan demikian Pemerintah Daerah dapat menjalankan seluruh urusan pemerintahan secara baik dan bijaksana untuk mewujudkan *good government* dan *good governance* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat yang memuat laporan kinerja instansi pemerintah.

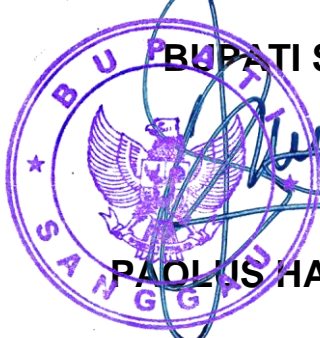

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Perundang-undangan tersebut, selaku Bupati Sanggau menyusun LPPD Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan tahun ketiga untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024.



LPPD ini disusun dengan maksud memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2021 yang mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Sehubungan dengan itu LPPD ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif dalam menilai penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2021 sehingga dapat dilakukan perbaikan yang berkelanjutan di masa yang akan datang.

Penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2021 ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, dan kami menyadari bahwa dalam penyajiannya masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Karena itu disampaikan terima kasih atas bantuan, dukungan dan permohonan maaf atas kekurangan dan ketidaksempurnaan LPPD Tahun Anggaran 2021 ini.

Sanggau, 11 Maret 2022

  
**BUPATI SANGGAU,**  
  
**PAOLIS HADI, S.IP, M.Si.**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	<b>1</b>
1.1.1 Penjelasan umum	<b>1</b>
a. Undang-undang Pembentukan Daerah	<b>2</b>
b. Data Geografis Wilayah	<b>5</b>
c. Jumlah Penduduk	<b>10</b>
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	<b>12</b>
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Daerah dan Pegawai Pemerintahan	<b>14</b>
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	<b>20</b>
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	<b>30</b>
a. Permasalahan Strategi Daerah	<b>30</b>
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	<b>40</b>
c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	<b>46</b>
d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	<b>51</b>
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	<b>63</b>
<b>BAB II : CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>64</b>
2.1. Capaian Kinerja Makro	<b>64</b>
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	<b>65</b>
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	<b>65</b>



2.2.2	Indikator Kinerja Kunci Hasil	141
2.2.3	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi penunjang Urusan pemerintahan	168
2.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	172
<b>BAB III</b>	<b>: CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN</b>	<b>261</b>
3.1	Tugas Pembantuan Pusat	263
3.2	Tugas Pembantuan Provinsi	263
<b>BAB IV</b>	<b>: PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL</b>	<b>272</b>
4.1.	Urusan Pendidikan	272
4.2.	Urusan Kesehatan	293
4.3.	Urusan Pekerjaan Umum	301
4.4.	Urusan Perumahan Rakyat	309
4.5.	Urusan ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat	316
4.6.	Urusan Sosial	336
4.7.	Program dan Kegiatan	340
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP</b>	<b>353</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

#### **1.1.1 PENJELASAN UMUM**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2021 pada dasarnya merupakan pelaporan atas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang mencakup urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan tolok ukur Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 - 2024.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2021, adalah untuk memenuhi kewajiban konstitusional Kepala Daerah dalam menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran kepada Pemerintah sesuai dengan sistematika LPPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan dan penyampaian LPPD Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2021 adalah untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sanggau baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan sebagai bahan evaluasi pemerintah guna keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah.



## **A. Undang-Undang Pembentukan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa masing-masing daerah merupakan daerah otonom yang mampu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Sanggau mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan desentralisasi. Untuk menyelenggarakan urusan yang berskala kabupaten, meliputi urusan wajib dan urusan lainnya yang bersifat pilihan. Urusan wajib dan urusan pilihan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Sesuai dengan kewenangan tersebut maka kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaporkan hasil penyelenggaraan pemerintahan yang tersusun dalam dokumen LPPD.

LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, capaian kinerja akuntabilitas kinerja pemerintahan, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, serta penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menyusun LPPD Akhir Tahun Anggaran 2021 ini juga merupakan wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2021 sebagaimana direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2021.

Secara keseluruhan, dasar hukum penyusunan LPPD Bupati Sanggau Akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir





- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5344);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan



- Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  18. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
  19. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 81 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  20. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

## **B. DATA GEORGAFIS WILAYAH**

Pemerintahan Kabupaten Sanggau dipimpin oleh Bupati dan dibantu oleh Wakil Bupati, yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kabupaten Sanggau yang maju, mandiri dan sejahtera lahir dan bathin berlandaskan demokrasi dalam penyelenggaraan



pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak tanggal 28 September 2018 telah dilantik Bupati dan Wakil Bupati Sanggau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61 - 7746 Tahun 2018 dan 132.61 - 7747 Tahun 2018 Tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan PAOLUS HADI, S.IP, M.Si dan Drs. YOHANES ONTOT, M.Si, masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024.

### **1. Letak dan Luas Wilayah**

Kabupaten Sanggau merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat dengan ibukota di Sanggau. Kabupaten Sanggau terletak diantara koordinat 1°10' Lintang Utara-0° 35' Lintang Selatan serta diantara 109° 45'-111° 11' Bujur Timur dengan luas 12.857,70 km<sup>2</sup> atau sekitar 8,76% dari luas seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Sarawak Malaysia Timur dan Kabupaten Bengkayang.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ketapang
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Landak dan Kabupaten Kubu Raya

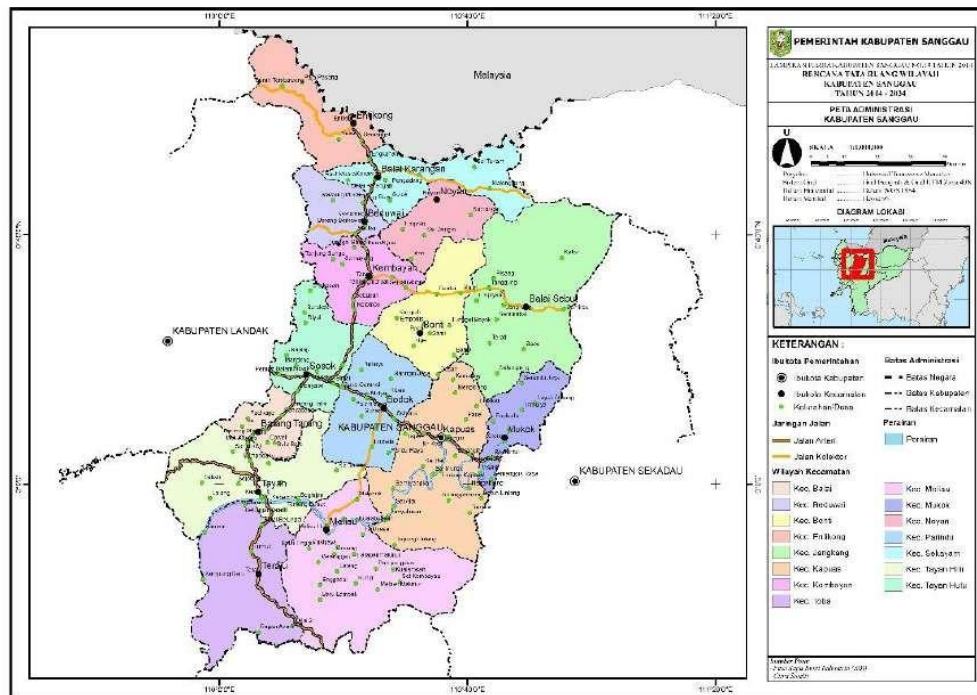
Berdasarkan letak geografisnya, kondisi saat ini dapat diuraikan bahwa Kabupaten Sanggau mempunyai 5 (Lima) nilai strategis sebagai berikut:

- a. Terletak ditengah-tengah Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan 6 (enam) kabupaten, yaitu: Kabupaten Sekadau, Ketapang, Landak, Bengkayang, Kubu Raya, dan Sintang.



- b. Dilalui jalan lintas *Trans Kalimantan*, yaitu mulai dari Kalimantan Barat, Kota Pontianak melewati Tayan – Sosok – Pusat Damai – Kapuas sampai Kalimantan Tengah – Kalimantan Selatan – Kalimantan Timur – Serawak dan Brunei Darussalam. Lintas *Trans Kalimantan* ini direncanakan akan dibangun jalan kereta api.
- c. Terletak pada jalur lintas Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- d. Berbatasan langsung dengan luar negeri yaitu Negara Malaysia Timur (Serawak) dan memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Entikong.
- e. Dilewati jalur Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Jalur Sungai Kapuas ini juga dilewati kabupaten-kabupaten bagian timur Kalimantan Barat.

Kelima nilai strategis letak wilayah Kabupaten Sanggau di atas merupakan bagian dari potensi daerah Kabupaten Sanggau yang dapat dimaksimalkan sebagai modal pembangunan daerah menuju Kabupaten Sanggau yang maju dan terdepan. Dalam hal ini, strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau perlu memperhatikan kelima nilai strategis tersebut.



**Gambar 1.1.**  
**Peta Administrasi Kabupaten Sanggau**  
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau  
Tahun 2014-2034

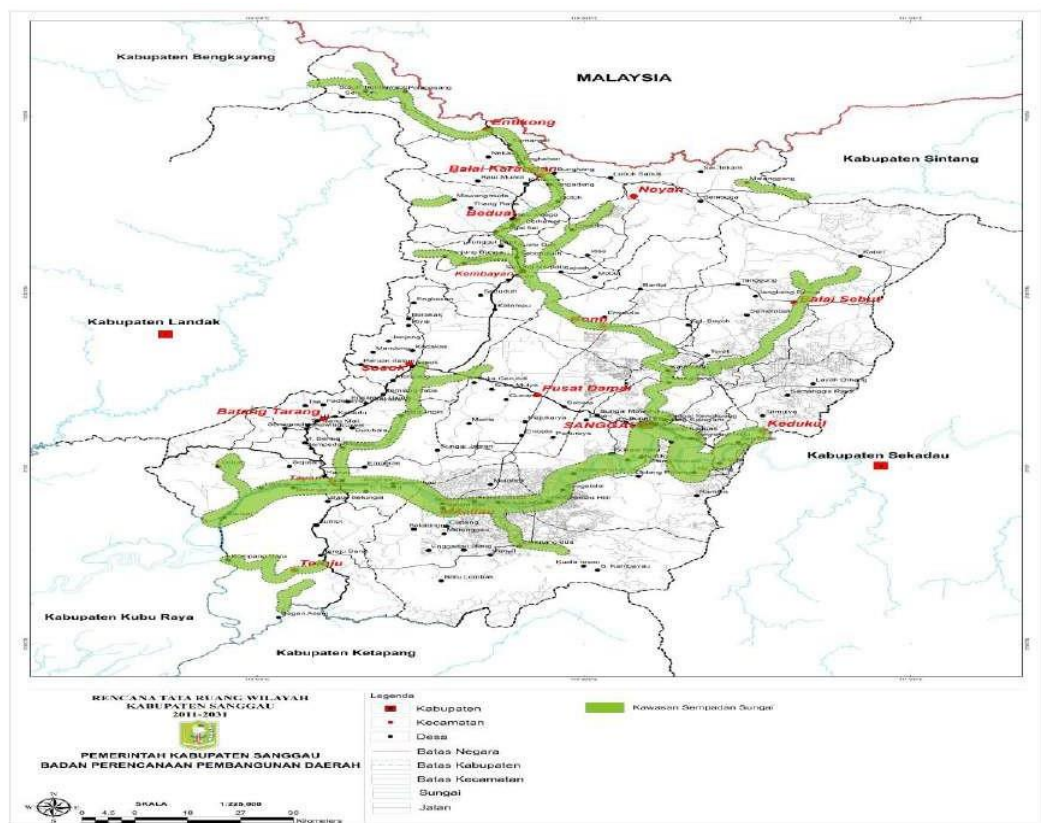
## 2. Iklim

Kabupaten Sanggau termasuk daerah beriklim tropis. Kabupaten Sanggau secara umum sering diguyur hujan dengan rata-rata hari hujan bulanan tertinggi terjadi pada Bulan November, yaitu sekitar 20 hari. Sedangkan rata-rata hari hujan bulanan terendah terjadi selama 10 hari pada Bulan Juli. Rata-rata curah hujan bulanan bervariasi dari sebesar 193,77 mm pada Bulan Juni (terendah) hingga sebesar 401,54 mm pada Bulan November (tertinggi).

## 3. Topografi

Kabupaten Sanggau merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit dan berawa-rawa yang dialiri oleh beberapa aliran sungai, diantaranya: Sungai Kapuas, Sungai Sekayam, Sungai Mengkiang, Sungai Kambing, dan Sungai Tayan. Sungai Kapuas termasuk sungai terpanjang di Provinsi Kalimantan Barat yang mengalir dari Kabupaten Kapuas Hulu melalui Kabupaten

Sintang, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sanggau dengan muara di Kabupaten Mempawah. Bentuk topografi Kabupaten Sanggau menggambarkan dua hal penting: pertama, topografi sebagai potensi pembangunan dan kedua, topografi sebagai permasalahan pembangunan. Satu sisi bentuk topografi Kabupaten Sanggau dapat menjadi modal pembangunan daerah mana kala pemerintah Kabupaten Sanggau mampu mengelola aliran sungai yang ada sebagai potensi yang mendukung percepatan pembangunan daerah. Di sisi lain, bentuk topografi dengan kelima aliran sungai yang ada memberikan kontribusi pada tingginya tingkat kerawanan bencana bagi Kabupaten Sanggau. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Sanggau perlu merumuskan strategi, arah kebijakan, dan program yang tepat sehingga topografi yang dimiliki dapat berkontribusi positif bagi pembangunan daerah Kabupaten Sanggau.



**Gambar 1.2.**

**Peta Sempadan Sungai di Kabupaten Sanggau**

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034



#### 4. Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Sanggau sebagian besar adalah jenis tanah padosolik merah kuning batuan dan padat serta jenis tanah latosol. Jenis tanah padosolik merah kuning batuan dan padat hampir merata di seluruh kecamatan dengan luas mencapai sekitar 576,910 hektar (44,80%). Latosol merupakan jenis tanah dengan luas terkecil, yaitu 19,375 hektar (1,06%) yang hanya terdapat di Kecamatan Toba dan Kecamatan Meliau.

#### 5. Geologi

Formasi geologi yang terdapat di daerah Kabupaten Sanggau, antara lain Formasi Kwartir, Kapur, Trias, Plistosen, Intruksif dan Plutonik Basa Menengah, Intruksif Plutonik Asam, Sekis Hablur, Intruksif dan Plutonik Basa, Lapisan Batu, dan Permo Karbon. Lapisan Plistosen hampir terdapat di seluruh kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sanggau, kecuali di Kecamatan Toba dan Kecamatan Beduwai. Lapisan tanah Efusif Basa hanya terdapat di Kecamatan Tayan Hulu.

### C. JUMLAH PENDUDUK

Penduduk Kabupaten Sanggau yang luas wilayahnya 12.857,70 km<sup>2</sup> atau 8,76% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan data agregat kependudukan Kabupaten Sanggau semester 2 (dua) tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Kabupaten Sanggau sebanyak **489.605** jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak **254.090** jiwa dan penduduk perempuan sebanyak **235.515** jiwa yang menyebar di 15 Kecamatan.



**Jumlah Penduduk Kabupaten Sanggau  
Per Kecamatan Tahun 2021**

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kapuas	43.954	41.816	85.770
2	Mukok	11.067	10.582	21.649
3	Noyan	6.199	5.341	11.540
4	Jangkang	15.695	13.821	29.516
5	Bonti	12.501	11.299	23.800
6	Beduai	6.851	6.319	13.170
7	Sekayam	21.254	19.398	40.652
8	Kembayan	16.708	15.647	32.355
9	Parindu	20.337	19.275	39.612
10	Tayan Hulu	20.123	18.759	38.882
11	Tayan Hilir	19.419	18.121	37.540
12	Balai	15.176	14.112	29.288
13	Toba	8.463	7.570	16.033
14	Meliau	26.819	24.563	51.382
15	Entikong	9.524	8.892	18.416
	<b>Jumlah</b>	<b>254.090</b>	<b>235.515</b>	<b>489.605</b>

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Sanggau.  
Data Agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2021

**Jumlah Penduduk Kabupaten Sanggau  
Menurut Komposisi Umur Per 31 Desember 2021**

No.	Penduduk (Jiwa)	Tahun 2021	%
1.	Jumlah penduduk	<b>489.605</b>	
2.	Jumlah penduduk laki-laki	<b>254.090</b>	51,90
3.	Jumlah penduduk perempuan	<b>235.515</b>	48,10
4.	Jumlah penduduk menurut kelompok umur :		
	0 – 4 tahun	31.660	6,47
	5 – 9 tahun	42.077	8,59
	10 – 14 tahun	43.448	8,87
	15 – 19 tahun	43.614	8,91
	20 – 24 tahun	44.148	9,02
	25 – 29 tahun	39.191	8,00





	30 – 34 tahun	40.139	8,20
	35 – 39 tahun	42.158	8,61
	40 – 44 tahun	39.536	8,08
	45 – 49 tahun	34.272	7,00
	50 – 54 tahun	27.252	5,57
	55 – 59 tahun	22.492	4,59
	60 – 64 tahun	17.256	3,52
	65 – 69 tahun	10.847	2,22
	70 – 74 tahun	5.785	1,18
	Diatas 74 tahun	5.830	1,19

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Sanggau,  
Data Agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2021

#### D. JUMLAH KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN

Kabupaten Sanggau mengalami pemekaran pada tahun 2003, Kabupaten Sanggau yang awalnya memiliki 22 Kecamatan kini menjadi 15 Kecamatan. Setelah pemekaran, jumlah desa di Kabupaten Sanggau sebanyak 165 desa dan kelurahan. Kemudian pada tahun 2004 berdasarkan SK Bupati Sanggau nomor 32 tahun 2004, jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Sanggau bertambah menjadi 166. Selanjutnya pada tahun 2011, terjadi pemekaran kembali yang merubah jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Sanggau dari 166 bertambah menjadi 169 desa dan kelurahan.

##### Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sanggau

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Kelurahan	Luas/Area (Km <sup>2</sup> )	%
1	Toba	7	0	1.127,20	8,77
2	Meliau	19	0	1.495,70	11,63
3	Kapuas	20	6	1.382,00	10,75
4	Mukok	9	0	501	3,90
5	Jangkang	11	0	1.589,20	12,36
6	Bonti	9	0	1.121,80	8,72



7	Parindu	14	0	593,9	4,62
8	Tayan Hilir	15	0	1.050,50	8,17
9	Balai	12	0	395,6	3,08
10	Tayan Hulu	11	0	719,2	5,59
11	Kembayan	11	0	610,8	4,75
12	Beduai	5	0	435	3,38
13	Noyan	5	0	487,9	3,79
14	Sekayam	10	0	841,01	6,54
15	Entikong	5	0	506,89	3,94
	<b>Jumlah</b>	<b>169</b>	<b>6</b>	<b>12.857,70</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sanggau dalam angka.

Dari sisi luas kawasan, Kecamatan terluas terdapat pada Kecamatan Jangkang yaitu 12,36 persen dari total luas Kabupaten Sanggau, disusul Kecamatan Meliau sebesar 11,63 persen, dan Kecamatan Kapuas sebesar 10,75 persen. Sebaliknya 3 (tiga) Kecamatan yang memiliki luas kawasan paling rendah adalah Kecamatan Balai sebesar 3,08 persen, kemudian Kecamatan Beduai sebesar 3,38 persen, dan Kecamatan Noyan yaitu 3,79 persen.

Cukup tingginya *gap* antara luasan dan jumlah desa/kelurahan antar- kecamatan, serta kemampuan sumber daya Pemerintah Kabupaten Sanggau yang terbatas merupakan tantangan yang dihadapi dalam pemerataan pembangunan berbasis desa. Pembangunan berbasis desa kedepan perlu dilakukan secara lebih terfokus dan terintegratif sesuai dengan potensi yang dimiliki kecamatan dan desa, dengan tetap meningkatkan peran aktif kecamatan dan desa dalam mengoptimalkan pembangunan daerahnya.



## **E. JUMLAH PERANGKAT DAERAH, UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH**

### **a. Jumlah Perangkat Daerah**

#### **PERANGKAT DAERAH**

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Lingkungan Hidup
4. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
5. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
6. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Dinas Tanaga Kerja dan Transmigrasi
11. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
12. Dinas Perkebunan dan Peternakan
13. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
14. Dinas Perhubungan
15. Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Satuan Polisi Pamong Praja
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
19. Sekretariat Daerah
20. Inspektorat
21. Sekretariat DPRD
22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
26. Badan Pendapatan Daerah
27. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
28. Rumah Sakit Umum M.TH Djaman
29. Kecamatan Kapuas
30. Kecamatan Sekayam
31. Kecamatan Entikong
32. Kecamatan Beduai
33. Kecamatan Kembayan



34. Kecamatan Tayan Hulu
35. Kecamatan Balai
36. Kecamatan Tayan Hilir
37. Kecamatan Toba
38. Kecamatan Parindu
39. Kecamatan Meliau
40. Kecamatan Bonti
41. Kecamatan Noyan
42. Kecamatan Mukok
43. Kecamatan Jangkang

**b. Unit Kerja Perangkat Daerah**

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau, merupakan Sekretariat DPRD tipe B;
- c. Inspektorat Kabupaten Sanggau, merupakan Inspektorat tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
  2. Dinas Kesehatan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
  3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan



- Urusan Pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  5. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, dan fungsi penyuluhan;
  6. Dinas Perkebunan dan Peternakan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian subbidang perkebunan dan peternakan;
  7. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, jalan dan jasa konstruksi;
  8. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penataan ruang, dan bidang pertanahan;
  9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  10. Dinas Lingkungan Hidup tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;



11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  13. Dinas Perhubungan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
  14. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
  15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal, bidang energi sumber daya mineral dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
  16. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;
  17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan
  18. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;



2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan subbidang pembiayaan dan aset;
  3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan subbidang pendapatan;
  4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
  5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Kecamatan, terdiri dari:
1. Kecamatan Kapuas dengan tipe A;
  2. Kecamatan Sekayam dengan tipe A;
  3. Kecamatan Tayan Hilir dengan tipe A;
  4. Kecamatan Tayan Hulu dengan tipe A;
  5. Kecamatan Meliau dengan tipe A;
  6. Kecamatan Kembayan dengan tipe A;
  7. Kecamatan Entikong dengan tipe A;
  8. Kecamatan Parindu dengan tipe A;
  9. Kecamatan Mukok dengan tipe A;
  10. Kecamatan Bonti dengan tipe A;
  11. Kecamatan Balai dengan tipe A;
  12. Kecamatan Beduai dengan tipe A;
  13. Kecamatan Jangkang dengan tipe A;
  14. Kecamatan Toba dengan tipe A; dan
  15. Kecamatan Noyan dengan tipe A.
- g. Rumah Sakit Daerah bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.



**c. Jumlah PNS**

Jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sanggau sebanyak 4.479 Orang pada 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

**Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sanggau  
31 Desember 2021**

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>JUMLAH PNS</b>
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2431
2	Dinas Kesehatan	657
3	Dinas Lingkungan Hidup	34
4	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	30
5	Dinas Perumahan,Cipta Karya,Tata Ruang dan Pertanahan	30
6	Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata	29
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26
8	Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koperasi dan Usaha Mikro	43
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20
11	Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perikanan	93
12	Dinas Perkebunan dan Peternakan	37
13	Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	37
14	Dinas Perhubungan	24
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	26
16	Satuan Polisi Pamong Praja	53
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	28
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	23
19	Sekretariat Daerah	150
20	Inspektorat	34
21	Sekretariat DPRD	28
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	45





23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	31
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	35
26	Badan Pendapatan Daerah	35
27	Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	19
28	Rumah Sakit Umum M.TH Djaman	204
29	Kecamatan Kapuas	17
30	Kecamatan Sekayam	17
31	Kecamatan Entikong	11
32	Kecamatan Beduai	10
33	Kecamatan Kembayan	19
34	Kecamatan Tayan Hulu	14
35	Kecamatan Balai	16
36	Kecamatan Tayan Hilir	18
37	Kecamatan Toba	9
38	Kecamatan Parindu	12
39	Kecamatan Meliau	12
40	Kecamatan Bonti	14
41	Kecamatan Noyan	8
42	Kecamatan Mukok	16
43	Kecamatan Jangkang	14
44	Kelurahan Bunut	4
45	Kelurahan Beringin	3
46	Kelurahan Ilir Kota	4
47	Kelurahan Tanjung Sekayam	4
48	Kelurahan Tanjung Kapuas	7
49	Kelurahan Sungai Sengkuang	5
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.479</b>

Sumber: BKPSDM 2021

## **F. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pengelolaan keuangan daerah meliputi tiga tahapan yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Tahapan tersebut dimulai dari penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja



Perangkat Daerah, penyusunan APBD dan penjabarannya sampai dengan pengesahan, pelaksanaan, penatausahaan, dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Tahapan pertama adalah perencanaan. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik akan dimulai dari perencanaan yang baik. Dengan mengaitkan kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dan penganggaran (*budgeting*), akan tercipta output pengelolaan yang jelas dan sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah dan tidak menimbulkan tumpang tindih program dan kegiatan. Sistem perencanaan pembangunan ini adalah sesuai dengan yang diamanatkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Rencana Pembangunan Tahunan, yang disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yaitu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 tahun, yang digunakan sebagai dasar penganggaran daerah, yang tidak boleh bertentangan dengan RPJM dan RPJP Daerah.

Kepala Perangkat Daerah selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana Kerja dan Anggaran ini disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun, dan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. APBD yang disetujui DPRD ini terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

Tahapan kedua pengelolaan keuangan daerah adalah pelaksanaan anggaran. Beberapa hal yang terkait dengan perubahan pelaksanaan anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah adalah mengenai peran dan tanggung jawab para pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas



dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan barang milik daerah, larangan penyitaan uang dan barang milik daerah dan/atau yang dikuasai daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, akuntansi dan pelaporan. Mengingat masih terbatasnya jumlah dan pengalaman personil khususnya yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, maka dalam pelaksanaan anggaran tahun 2020 masih dirasa banyak kendala. Namun demikian hal itu tidak mengurangi semangat seluruh pihak untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tahapan ketiga adalah pertanggungjawaban. Dalam prosesnya, tahap ini diawali dengan akuntansi yang akan melahirkan laporan keuangan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD tidak hanya realisasi anggaran (LRA) saja, melainkan mencakup seluruh transaksi keuangan maupun posisi keuangan pada akhir tahun anggaran yang disajikan dalam bentuk neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu laporan keuangan daerah tahun 2021 berupa (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan SAL; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Perubahan Ekuitas; (f) Laporan Arus Kas dan (g) Catatan Atas Laporan Keuangan akan disampaikan kepada DPRD setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Struktur APBD yang disusun terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Anggaran Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah meliputi pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan



Dana Perimbangan terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Perorangan (PPh), Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Belanja daerah disusun dengan pendekatan bidang pemerintahan, arah dan kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan, serta dengan memperhatikan kinerja dari unit-unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penentuan program dan kegiatan yang mendapat alokasi dalam APBD ditentukan berdasarkan bidang kewenangan yang harus ditangani oleh pemerintah daerah.

## **1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 kebijakan pendapatan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta ketentuan-ketentuan terkait lainnya.

### **a. Intensifikasi dan Ektensifikasi Pendapatan Daerah**

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Sanggau akan berupaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan agar dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka kebijakan yang ditetapkan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak;
- 2) Mengoptimalkan perolehan Dana Perimbangan yang lebih adil dan proporsional;



- 3) Meningkatkan kinerja dan efektifitas perangkat Daerah yang bertanggungjawab menangani penerimaan daerah melalui pelayanan birokrasi secara profesional dan transparan;

Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah;
- 2) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan;
- 3) Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 4) Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah yang terkait agar penerimaan yang bersumber dari PAD dan Dana Perimbangan dapat di peroleh secara optimal;
- 5) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah;
- 6) Menggali Sumber-sumber Penerimaan Daerah yang potensial;
- 7) Penyesuaian Tarif Pajak dan Retribusi serta Pendataan Objek dan Subjek Pajak Baru.

#### **b. Target dan Realisasi Pendapatan**

<b>Target Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>
1.540.524.125.226,00	1.660.780.677.061,26	107,81%

Realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Sanggau pada Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp 1.660.780.677.061,26 atau sebesar 107,81% dari target pendapatan dalam APBD setelah



perubahan sebesar Rp 1.540.524.125.226,00 atau diatas target sebesar Rp 120.256.551.835,26

Rincian per jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

### 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

<b>Target Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>
118.769.956.375,00	129.773.632.223,92	109,26

Jumlah tersebut merupakan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah selama periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, terdiri dari:

<b>Jenis Pendapatan</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>%</b>
Pajak Daerah	39.495.460.000,00	43.427.557.693,20	109,96
Retribusi Daerah	6.672.775.770,00	6.014.925.810,00	90,14
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.513.457.389,00	9.513.457.389,00	100,00
Lain-Lain PAD	63.088.563.216,00	70.817.671.331,72	112,25
<b>Jumlah PAD</b>	<b>118.769.956.375,00</b>	<b>129.773.632.223,92</b>	<b>109,26</b>

### 2) Pendapatan Transfer

<b>Target Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>
1.335.689.258.851,00	1.445.923.685.837,34	108,25

Jumlah tersebut merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sanggau, Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat selama periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, yang terdiri dari:



<b>Jenis Pendapatan</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Realisasi 2021</b>	<b>%</b>
Pendapatan transfer Pemerintah Pusat lainnya	1.249.720.934.815,00	1.359.793.528.048,00	108,81
Pendapatan Transfer antar daerah	85.968324.036,00	86.130.157.789,34	100,19
<b>Jumlah</b>	<b>1.335.689.258.851,00</b>	<b>1.445.923.685.837,34</b>	<b>108,25</b>

### 3) Lain-lain Pendapatan yang sah

<b>Target Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>Realisasi Tahun 2021 (Rp)</b>	<b>%</b>
86.064910.000,00	85.083.359.000,00	98,86

Jumlah tersebut merupakan penerimaan yang berasal dari pendapatan lain-lain yang sah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sanggau yang berupa Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Bantuan keuangan dari Provinsi dan pendapatan lainnya selama periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

## 2. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 kebijakan belanja daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta ketentuan-ketentuan terkait lainnya.



## 1. Target dan Realisasi Belanja

Target Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%
1.729.539.724.804,00	1.543.305.737.949,81	89,23%

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sanggau pada Tahun Anggaran 2021 mencapai 89,23% atau Rp 1.543.305.737.949,81 dari target anggaran dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp 1.729.539.724.804,00 atau dibawah target anggaran sebesar Rp 186.233.986.854,19.

Rincian belanja tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Target 2021	Realisasi 2021	%
Belanja Operasi	1.253.402.333.138,00	1.093.752.650.559,09	87,26
Belanja Modal	219.228.446.602,00	199.974.593.925,72	91,22
Belanja Tak Terduga	8.186.018.156,00	2.376.720.055,00	29,03
Belanja Transfer	248.722.926.908,00	247.201.773.410,00	99,39
<b>Jumlah</b>	<b>1.729.539.724.804,00</b>	<b>1.543.305.737.949,81</b>	<b>89,23</b>

### a) Belanja Operasi

Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%
1.253.402.333.138,00	1.093.752.650.559,09	87,26

Realisasi Belanja Operasi sebesar 87,26% atau Rp **1.093.752.650.559,09** merupakan pengeluaran Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sanggau selama periode 01 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021 yang telah dipertanggungjawabkan dari anggaran sebesar Rp **1.253.402.333.138,00** yang terdiri dari:

Jenis Belanja	Target 2021	Realisasi 2021	%
Belanja Pegawai	609.229.906.670,00	521.584.681.398,21	85,61
Belanja Barang	613.195.010.336,00	542.531.321.028,88	88,48





Jenis Belanja	Target 2021	Realisasi 2021	%
Belanja Hibah	29.705.416.132,00	28.363.648.132,00	95,48
Belanja Bantuan Sosial	1.273.000.000,00	1.273.000.000,00	100
<b>Jumlah</b>	<b>1.253.402.333.138,00</b>	<b>1.093.752.650.559,09</b>	<b>87,26</b>

## 2. Target dan Realisasi Pembiayaan

### a. Penerimaan Pembiayaan

Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	%
201.515.559.578,00	201.237.779.059,16	99,86

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 201.237.779.059,16 merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dengan capaian 99,86% dari target anggaran sebesar Rp 201.515.559.578,00.

### b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%
12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	100

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp 12.500.000.000,00 merupakan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dengan capaian 100% dari target anggaran sebesar Rp 12.500.000.000,00.

## 3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2021 adalah:

- 1) Terbatasnya sumber pembiayaan APBD yang berimplikasi pada terbatas pula pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran;



- 2) Waktu pelaksanaan APBD yang terlambat dari jadwal yang diperkirakan;
- 3) Sering terjadi defisit anggaran sebagai akibat tidak seimbangannya usulan anggaran dari setiap unit kerja dengan jumlah *plafond* anggaran yang tersedia;
- 4) Sering terjadinya perubahan yang mendasar terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah yang berakibat terlambatnya jadwal penyusunan APBD;
- 5) Keterbatasan jumlah dan pemahaman personil yang mengelola keuangan daerah pada tiap perangkat daerah khususnya bendaharawan pengeluaran yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pertanggungjawaban pengeluaran sehingga laporan realisasi anggaran pun menjadi terlambat.

Solusi yang telah diambil dan diupayakan adalah:

- 1) Menambah jumlah personil PNS dan memberdayakan tenaga kontrak untuk membantu tugas bendaharawan dan PPK perangkat daerah;
- 2) Mengadakan dan meningkatkan pendidikan dan pelatihan penatausahaan keuangan daerah dan akuntansi untuk meningkatkan kelancaran pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah;
- 3) Berupaya meningkatkan sumber pembiayaan APBD dengan memaksimalkan penerimaan PAD dari berbagai sektor unggulan serta menggalakkan investasi di daerah;
- 4) Perlu dibangun komitmen antara pihak eksekutif dan legislatif untuk mempercepat proses pelaksanaan APBD dengan penetapan penjadwalan pembahasan RAPBD lebih awal;
- 5) Perlu dilakukan analisis terhadap kelayakan dan kepatutan pengalokasian anggaran kepada setiap unit kerja perangkat daerah berdasarkan Tugas pokok dan fungsi masing-masing,



Arah Kebijakan Umum serta strategi dan prioritas pembangunan;

- 6) Meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menyiasati berbagai kemungkinan perubahan peraturan pemerintah yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah dengan memanfaatkan sarana komunikasi yang ada secara maksimal.

### **1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **A. PERMASALAHAN STRATEGI PEMERINTAH DAERAH**

Permasalahan pembangunan pada umumnya disebabkan oleh faktor internal pelaksanaan pembangunan yang terjadi dan factor eksternal yang mempengaruhi jalannya pembangunan di suatu daerah. Permasalahan internal dapat terjadi antara lain karena tidak teroptimalkannya sumberdaya pembangunan yang tersedia dan tidak teratasinya kelemahan yang membuat kinerja pembangunan tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam analisis internal ini diuraikan juga mengenai pengalaman akan permasalahan dan menjadi isu strategis

#### **Penetapan Isu Strategis Kabupaten Sanggau**

Mengacu pada analisis terhadap kondisi daerah, isu global, nasional dan provinsi maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis pembangunan di Kabupaten Sanggau yang dianggap layak dan relevan untuk dimasukkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019– 2024, sebagai berikut:

#### **1. Kualitas Pendidikan**

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah disamping faktor modal dan teknologi. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber kekuatan bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah



melalui hasil produktivitas dari peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan. Pemerintah Kabupaten Sanggau masih fokus pada kualitas pendidikan yang ada saat ini, meskipun berdasarkan data Mean Years of Schooling (MYS) atau rata-rata lama sekolah Kabupaten Sanggau terus mengalami peningkatan selama Tahun 2016-2020, akan tetapi masih berada di bawah angka MYS Nasional tetapi mengalami peningkatan dengan MYS Provinsi Kalimantan Barat. MYS Kabupaten Sanggau tahun 2020 sebesar 7,15 tahun di bawah Nasional 8,10 tahun, untuk perbandingan dengan MYS Provinsi Kalimantan Barat 7,05 Tahun dan MYS Kabupaten Sanggau tahun 2020 sebesar 7,15. Artinya rata-rata penduduk Kabupaten Sanggau bersekolah hanya hampir mencapai kelas satu SLTP sederajat. Sedangkan Expected Years of Schooling (EYS) atau harapan lama sekolah Kabupaten Sanggau baru mencapai 11,57 Tahun, di bawah EYS Provinsi Kalimantan Barat 12,60 tahun dan EYS Nasional 12,95 tahun. Artinya penduduk Kabupaten Sanggau diharapkan dapat bersekolah hingga mencapai kelas dua SLTA sederajat.

## **2. Kualitas Kesehatan**

Pemerintah Kabupaten Sanggau terus berkomitmen untuk meningkatkan aspek-aspek yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan meliputi ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, tenaga medis dan paramedis serta kualitas pelayanan. Walaupun jika dilihat dari jenis pusat pelayanan kesehatan, di Kabupaten Sanggau sudah tersedia RSUD Tipe B, RS Swasta, Puskesmas Non Rawat Inap, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Balai Kesehatan Masyarakat dan Pos Kesehatan Desa serta Posyandu Pratama, Madya, Purnama, maupun Posyandu Mandiri. Akan tetapi, dari aspek kualitas pelayanan kesehatan masih harus ditingkatkan. Sedangkan berdasarkan data bahwa untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Sanggau mengalami peningkatan jumlah, terutama pada



dokter umum, bidan, perawat. Jumlah tenaga kesehatan paling banyak di Kabupaten Sanggau adalah perawat, tetapi ada beberapa tenaga kesehatan yang mengalami penurunan jumlah yaitu dokter gigi, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan dan nutrisisionis. Jumlah tenaga kesehatan berimplikasi terhadap rasio jumlah penduduk dan jumlah rumah sakit. Hal ini tentunya menjadi perhatian bersama dalam proses formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, agar jumlah tenaga kesehatan setiap waktu posisinya ideal antara tenaga yang dibutuhkan dengan pelayanan yang diberikan.

### **3. Kualitas Infrastruktur**

Jalan kondisi baik dengan permukaan berupa aspal ataupun beton merupakan kondisi ideal yang diharapkan guna mendukung kelancaran akses kendaraan, orang dan barang. Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa terdapat penambahan jalan dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Realisasi persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2020 meningkat dari 77,44 km menjadi 45,08 km dari tahun 2018. Sedangkan jalan dengan kondisi sedang meningkat selaras dengan jalan dengan kondisi rusak berat yang justru mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai tahun 2020.

Jembatan merupakan hal yang sangat penting guna mendukung kelancaran akses antarwilayah di Kabupaten Sanggau mengingat topografi Kabupaten Sanggau yang dilewati oleh sungai-sungai besar dan kecil. Sedangkan jumlah jembatan dan kondisi berdasarkan administrasi pemerintahan sebanyak 292 unit jembatan di Kabupaten Sanggau. Jumlah jembatan dalam kondisi baik bertambah sebanyak 5 unit, dari 145 unit di tahun 2016 menjadi 150 unit pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan adanya perbaikan/pemeliharaan jembatan yang kondisi rusak berat oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau sebanyak 5 unit di tahun 2016.



Untuk persentase jembatan dalam kondisi baik juga mengalami peningkatan menjadi 49,14% di tahun 2017, sedangkan jaringan irigasi kondisi baik mengalami peningkatan, dari 72,14% menjadi 74,88% di tahun 2017.

Untuk distribusi saluran listrik di Kabupaten Sanggau masih belum merata. Asumsi tersebut didasarkan pada data jumlah desa yang belum mendapatkan saluran listrik Desa di Kabupaten Sanggau yang belum mendapatkan saluran listrik pada tahun 2016 adalah sebanyak 34 desa, tahun 2017 sebanyak 32 Desa dan pada tahun 2018 berkurang menjadi 30 desa yang belum mendapatkan saluran listrik. Selain itu, terdapat 10 desa yang mendapatkan saluran listrik namun dengan waktu yang terbatas.

#### **4. Kemiskinan dan Pengangguran**

Kemiskinan merupakan permasalahan penting yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. World Bank (2000) mendefinisikan kemiskinan sebagai “poverty is pronounced deprivation in well-being” yang bermakna bahwa kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan. Dalam teori ekonomi, semakin banyak barang yang dikonsumsi berartise makin tinggi pula tingkat kesejahteraan seseorang. Tingkat kesejahteraan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengakses sumber daya yang tersedia (barang yang dikonsumsi). Kemampuan akses sumber daya yang tersedia ini dapat diukur melalui jumlah pendapatan ataupun pengeluaran seseorang. Jika definisi kemiskinan dihubungkan dengan tingkat kesejahteraan, kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kesejahteraan atau kekurangan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam



rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Selain itu indikator kemiskinan dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar pelaksanaan pembangunan dalam memberikan pengaruh pada penurunan angka kemiskinan di suatu daerah. Berdasarkan data, bahwa garis kemiskinan di Kabupaten Sanggau tahun 2020 adalah 346.983 rupiah per kapita per bulan. Garis kemiskinan tersebut di bawah garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar 471.200 rupiah per kapita per bulan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin Kabupaten Sanggau berjumlah 21,16 ribu jiwa atau sekitar 4,46 persen dari jumlah penduduk pada tahun yang sam. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sanggau mengalami kenaikan mulai dari tahun 2018 sebesar 1,05 dari 3,52 persen pada tahun 2020. Hal tersebut mengakibatkan perlunya fokus penanganan oleh pemerintah terhadap isu pengangguran di Kabupaten Sanggau.

## **5. Kualitas Pelayanan Sosial dan Gender**

Persentase penduduk yang memiliki kartu sehat mengalami peningkatan dari tahun 2017, hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang semakin tinggi dalam memberikan akses layanan kesehatan terutama layanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Sanggau. Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Tahun 2014 – 2017 berjumlah 12.000 orang berdasarkan kuota kesepakatan antara Pemerintah Kab. Sanggau dengan BPJS Kesehatan (BPJS Cabang Sintang) hal ini menyesuaikan anggaran Jamkesda yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Sanggau. Pada tahun 2018 terjadi penambahan jumlah peserta PBI Jamkesda dari 12.000 menjadi 13.247 (per Agustus 2018) sedangkan sampai dengan bulan Desember 2018 target peserta PBI yang dapat dibiayai melalui Jamkesda adalah 13.400 orang. Dari aspek kehidupan sosial masyarakat, persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mencapai 4,32%.



Jumlah ini menurun dari tahun 2016 yang mencapai 5,31%. Sedangkan tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan adalah meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di pusat dan di daerah.

## **6. Wilayah Perbatasan dan Kawasan Strategis**

Pembangunan wilayah perbatasan dan kawasan strategis merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjadikan daerah perbatasan sebagai beranda terdepan yang menggambarkan kondisi umum Indonesia, melalui percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah pusat. Selain itu, pengembangan kawasan strategis dilakukan dengan mengacu pada kawasan strategis yang telah ditetapkan secara nasional dan memperhatikan kawasan strategis yang ditetapkan oleh provinsi maupun kabupaten. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini kewenangan pengelolaan perbatasan berada pada pemerintah pusat. Namun demikian pemerintah daerah juga dituntut dapat berbuat dalam rangka mendukung kemajuan pembangunan yang berada di wilayah perbatasan. Setiap gerak langkah pembangunan yang dilaksanakan tentu akan berdampak kepada masyarakat yang berdomosili di wilayah perbatasan, baik dari aspek sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya. Untuk itu, perlu adanya integrasi antara perencanaan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sehingga dapat membuat suatu kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat perbatasan.





## **7. Good Governance, Penegakan Regulasi dan Penguatan Reformasi Birokrasi**

Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 memberikan indikasi kuat perubahan arah kebijakan dan pendekatan reformasi birokrasi nasional. Arah kebijakan reformasi birokrasi adalah pembentukan infrastruktur birokrasi nasional yang ditandai dengan terbitnya sejumlah undang-undang (UU) fundamental aparatur negara beserta peraturan pelaksanaannya, diantaranya UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berangkat dari 7 program prioritas dalam RPJMN tahun 2019-2024 salah satunya yaitu meningkatkan Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, dimana negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Arah kebijakan dapat berupa penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja, penerapan e-government untuk mendukung proses bisnis pemerintahan dan pembangunan, penerapan open government, restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah, penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional, penerapan manajemen aparatur sipil negara, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Arah kebijakan ini ditempuh untuk menciptakan birokrasi yang berbasis kinerja (performance-based bureaucracy). Sehingga reformasi pada birokrasi pemerintah daerah juga harus sejalan dengan gagasan dalam RPJMN 2019- 2024 yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola



pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dan memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Gagasan tersebut merupakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari pemulihan kepercayaan publik kepada pemerintah.

Sejak gelombang besar desentralisasi dimulai pada Tahun 2001, sebagian besar urusan pelayanan publik sehari-hari diatur dan diurus oleh aparatur pemerintah daerah. Oleh sebab itu, relevansi prioritas reformasi birokrasi pada pemerintah daerah menjadi semakin tinggi, ditandai dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan *system* pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

#### **8. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Memperhatikan Keselarasan Dengan Lingkungan Hidup.**

Langkah-langkah pengarusutamaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi seluruh sektor ditempuh dalam setiap kebijakan pembangunan dalam rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup di masa mendatang. Ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik



merupakan pendukung kesinambungan pembangunan saat ini dan pembangunan di masa yang akan datang. Walaupun dirasakan telah banyak upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, masih banyak permasalahan yang belum dapat diatasi secara menyeluruh. Beberapa permasalahan pokok tersebut antara lain adalah masih rendahnya pemahaman akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkesinambungan dan dibarengi pula dengan lemahnya penegakan hukum, sehingga menyebabkan tekanan yang berlebihan terhadap fungsi lingkungan hidup, bahkan sampai mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Walaupun demikian, usaha pemanfaatan sumber daya alam tidak harus dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan pelestarian lingkungan hidup. Pemanfaatan Sumber daya alam, mutlak dilakukan untuk menjamin kesinambungan pembangunan, tetapi dilakukan dengan tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

## **9. Pandemi Covid-19**

Terjadinya kejadian luar biasa di seluruh wilayah yaitu wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit Novel Coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Corona Virus Disease (COVID-19), hingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun di daerah menunjukkan perkembangan meningkat. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar



terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2020.

Kebijakan refocusing dan realokasi anggaran di Tahun 2020 untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net). sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah. Telah dilakukan beberapa kali pergerseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19. Oleh sebab itu, dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sanggau Tahun 2021, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak COVID-19 merupakan tambahan prioritas pembangunan Kabupaten Sanggau dari 6 (enam) prioritas lainnya yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Penambahan prioritas ini ditegaskan kembali dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sanggau Tahun 2021 yang merupakan momentum penting dalam perencanaan pembangunan Tahun 2022 di tengah pandemi COVID-19, dimana ada 2 (dua) agenda penting yaitu pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan mendukung tahapan tahun kedua pencapaian visi misi dalam RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 yaitu terwujudnya Sanggau Maju dan Terdepan. Sehingga prioritas pembangunan dari 6 (enam) prioritas yang sudah ditetapkan dalam RPJMD menjadi 7 (tujuh).

Memperhatikan perkembangan kondisi nasional dan daerah akibat pandemi COVID-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran/IKU, serta indikator IKK tingkat dampak (impact) dan tingkat hasil (outcome). Selain itu, perlu ditetapkan/diambil juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 dan upaya untuk pemulihannya, sebagai kelanjutan dari upaya yang



telah dilakukan sejak triwulan pertama Tahun 2020 ini. Hubungan antara arah Pembangunan RPJMD dengan Isu Strategis Pembangunan Daerah sesuai Tabel 4.2 berikut :

**Hubungan Arah Pembangunan RPJMD dan Isu Strategis  
Tahun 2019-2024**

<b>Arahan RPJMD IV (2019-2024)</b>	<b>Isu Strategis Kabupaten Sanggau</b>
1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Sanggau yang maju, mandiri, adil dan sejahtera sebagai beranda depan Negara dengan terciptanya tata pemerintahan yang baik, berkurangnya kemiskinan, tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat, dan pemeliharaan lingkungan yang lestari. 2. Pengembangan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi wilayah, peningkatan prasarana dasar, meningkatnya kebijakan publik, pemerintah dan penegakan hukum, dan penataan ruang dan lingkungan hidup yang lestari	1. Kualitas pendidikan 2. Kualitas kesehatan 3. Kualitas infrastruktur 4. Kemiskinan dan pengangguran 5. Kualitas pelayanan sosial dan gender 6. Wilayah perbatasan dan kawasan strategis 7. <i>Good Governance</i> , penegakan regulasi dan penguatan reformasi birokrasi 8. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan keselarasan dengan lingkungan hidup 9. Bencana pandemi <i>Covid-19</i>

**B. VISI DAN MISI**

Pemerintah Kabupaten Sanggau bertekad mengamankan dan mengawal kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan dalam membangun Kabupaten Sanggau sebagai “**Rumah Kita**” untuk sebuah gerakan dengan mengedepankan “**Bekerja dengan Hati**”



serta semangat “**Dompu**” dan “**Gotong Royong**”. Sanggau yang maju dan terdepan diwujudkan dengan menjadikan Kabupaten Sanggau untuk Indonesia yang sejati-jatinya "merdeka". Merdeka dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan sebagai upaya agar berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Perumusan visi dan misi tentunya disusun dengan memperhatikan isu strategis, lingkungan strategis dan tujuan pembangunan jangka panjang daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam menuangkan visi dan misi, juga perlu penguatan kepada setiap pemangku kepentingan semangat patriotisme “**SABANG MERAH**” (Sanggau Bangga Mengukir Sejarah) yang telah dilaksanakan pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya melalui 7 (tujuh) *Brand Images*, yaitu: (1) Sanggau Pintar, (2) Sanggau Sehat, (3) Sanggau Bersih dan Indah, (4) Sanggau Tertib, (5) Sanggau Terang, (6) Sanggau Manjur (Maju Infrastruktur), dan (7) Sanggau Budiman (Berbudaya dan Beriman).

## **VISI**

Pembangunan Kabupaten Sanggau 2019–2024 merupakan implementasi visi Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Periode 2019–2024 yaitu:

### **SANGGAU MAJU DAN TERDEPAN**

**Maju**, keadaan yang menunjukkan meningkatnya berbagai indikator pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya dengan dukungan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana, pelayanan publik yang baik dan pemerintahan daerah yang



profesional, transparan, akuntabel dan demokratis berbasis elektronik.

**Terdepan**, merupakan sebuah kondisi pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan menjadikan Kabupaten Sanggau yang bermartabat di Provinsi Kalimantan Barat.

### **MISI**

Untuk mewujudkan Sanggau Maju dan Terdepan, diperlukan misi sebagai suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dalam hal ini misi merupakan pernyataan mengenai hal yang harus dicapai sebagai cerminan pelayanan dan tujuan pembangunan. Dengan demikian misi yang diemban menjawab permasalahan masyarakat, memiliki sasaran publik dan memiliki daya saing yang dapat meyakinkan masyarakat. Adapun misi pembangunan daerah untuk menuju **Sanggau Maju dan Terdepan**, sebagai berikut:

**1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.**

Misi ini dimaksudkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dasar meliputi jalan, jembatan, sarana perhubungan, dan telekomunikasi. Selain itu, permukiman yang layak perlu ditingkatkan, sehingga diperlukan penyediaan sarana dan prasarana air bersih, sanitasi, dan listrik. Penyediaan infrastruktur tersebut yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Percepatan pembangunan untuk sejumlah kebutuhan dasar masyarakat mendesak pelaksanaan pembangunannya. Peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan kebutuhan dasar mutlak diperlukan dalam mengantisipasi keterbatasan anggaran



pemerintah.

Penyediaan dan pemerataan akses infrastruktur yang berkualitas tetap berada dalam koridor menjaga kualitas lingkungan hidup sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat tetap terjaga melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi. Lingkungan hidup yang sehat mempengaruhi kelangsungan hidup generasi sekarang dan mendatang.

**2. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat, dan berdaya saing.**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, dan sosial. Masyarakat yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, bermartabat sebagai manusia yang terpenuhi kesejahteraan sosialnya sehingga memiliki daya saing dalam berperan aktif di semua bidang pembangunan.

**3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai kearifan lokal.**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan basis pemanfaatan potensi sumber daya alam dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. termasuk upaya untuk menurunkan angka kemiskinan serta menurunkan kesenjangan antarkelompok pendapatan. Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan perlu ditunjang dengan investasi yang diarahkan pada pengembangan investasi yang selaras dengan pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).

Pengembangan ekonomi hijau seiring dengan pemberdayaan masyarakat adat agar pembangunan tidak mengakibatkan masyarakat adat mengalami eksklusis sosial karena masyarakat





adat kehilangan hak penguasaan atas tanah ulayat. Oleh karena itu, dalam upaya pengentasan kemiskinan maka reforma agraria yang dapat meningkatkan legalisasi lahan dan mendorong pemanfaatannya untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan basis perhutanan sosial mutlak dilakukan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal.

Kabupaten Sanggau akan maju jika seluruh daerahnya mampu memaksimalkan potensi yang ada. Keberagaman baik dari segi sumber daya alam maupun sosial dan budaya merupakan sebuah modal *competitive advantages* bagi Kabupaten Sanggau untuk maju dan terdepan. Setiap daerah/wilayah pada umumnya memiliki potensi produk yang bisa diangkat dan dikembangkan. Perekonomian masyarakat akan bangkit menjadi perekonomian yang kuat, Tangguh, dan terhormat jika indeks daya saing berada pada tingkat yang tinggi.

#### **4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.**

Misi ini dimaksudkan untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya, dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Era baru sistem pemerintahan menginginkan transparansi serta keterbukaan informasi publik. Masyarakat juga menginginkan agar pemerintah dan masyarakat bersifat interaktif dan dialogis serta pemerintah yang responsif, yang cepat merespon keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Pemerintah yang terbuka dan profesional akan mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dari proses pengambilan kebijakan publik sampai dengan membuka ruang yang lebih lebar bagi pengawasan-



pengawasan publik.

Sistem pemerintahan berbasis *Information and Communication Technology* (ICT) atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dengan birokrasi pemerintahan dengan cara cepat dan tepat. Komunikasi dan konsultasi publik bisa dilakukan secara sistematis melalui kanal-kanal media komunikasi virtual. Demikian pula interaksi dengan masyarakat bisa dilakukan tanpa harus terhalang oleh jarak dan dengan rentang waktu yang lebih cepat. Masyarakat bisa menyampaikan masukan, kritik maupun keluhannya terhadap pelayanan publik secara langsung dengan menggunakan teknologi informasi. Karena birokrasi publik dibentuk dan diadakan untuk melayani masyarakat, sudah seharusnya birokrasi publik lebih banyak berpikir dan bertindak untuk kepentingan masyarakat.

#### **5. Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya, dan demokratis.**

Misi ini dimaksudkan untuk membangun tatanan kehidupan sosial yang mengedepankan semangat demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia guna menciptakan masyarakat yang harmonis dengan memperkuat kehadiran nilai-nilai sosial dan keagamaan dalam segala aspek kehidupan masyarakat untuk membentuk manusia yang berkualitas serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kabupaten Sanggau adalah daerah yang bercorak majemuk dengan keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama. Nilai, adat istiadat, kearifan lokal, dan seni budaya yang tumbuh di masyarakat Sanggau mutlak dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekayaan budaya yang dapat digunakan untuk membangun relasi sosial yang harmonis, dan memperkuat daya rekat sosial masyarakat sehingga menjadi kekuatan



penggerak dan modal dasar pembangunan.

**6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.**

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman, demi terciptanya ketentraman, ketertiban, serta kepastian hukum yang berkeadilan. Dengan demikian, peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik dapat memenuhi rasa aman, nyaman, dan tertib bagi seluruh warga.

**7. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan.**

Misi ini dimaksudkan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama serta membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.

**8. Meningkatkan percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan melalui sinergitas pembangunan wilayah perbatasan yang merupakan beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kewenangan dalam pengelolaan wilayah perbatasan antarnegara. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan antarnegara.

**C. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH**

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan program pembangunan daerah. Program pembangunan



daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan.

Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan demikian, program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi.

Program pembangunan daerah disajikan selama lima tahun mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yaitu akhir periode pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau periode 2019-2024. Penyajian daftar program pembangunan daerah sebagai berikut:

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN  
PERENCANAAN JANGKA MENENGAH**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>
1	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
7	Program Pengolaan Sumber Daya Air (SDA)
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
11	Program Pengembangan Permukiman
12	Program Penataan Bangunan Gedung
13	Program Penataan Bangunan Gedung
14	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
15	Program Penyelenggaraan Jalan
16	Program Pengembangan Jasa Kontruksi
17	Program Pengembangan Jasa Kontruksi
18	Program Penyelenggaraan Penataan Uang
19	Program Kawasan Pemukiman



20	Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh
21	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
22	Program Penanggulangan Bencana
23	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan PE
24	Program Pemberdayaan Sosial
25	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
26	Program Rehabilitas Sosial
27	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
28	Program Penanganan Bencana
29	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
30	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
31	Program Penempatan Tenaga Kerja
32	Program Hubungan Industrial
33	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
34	Program Perlindungan Perempuan
35	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
36	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
37	Program Perlindungan Khusus Anak
38	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemanusiaan
39	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
40	Program Penanganan Kerawanan Pangan
41	Program Pengawasan Kerawanan Pangan
42	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
43	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan
44	Program Penatagunan Tanah
45	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
46	Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup
47	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)
48	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan
49	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin P
50	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan
51	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
52	Program Penangan Pengaduan Lingkungan Hidup
53	Program Pengelolaan Persampahan
54	Program Pendaftaran Penduduk



55	Program Pencatatan Sipil
56	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
57	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
58	Program Penataan Desa
59	Program Peningkatan Kerja Sama Desa
60	Program Administrasi Pemerintahan Desa
61	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Mas
62	Program Pengendalian Penduduk
63	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
64	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
65	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
66	Program Pengelolaan Pelayaran
67	Program Informasi dan Komunikasi Publik
68	Program Aplikasi Informatika
69	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
70	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
71	Program Pemberdayaan Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro
72	Program Pengembangan Ikum Penanaman Modal
73	Program Promosi Penanaman Modal
74	Program Pelayanan Penanaman Modal
75	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
76	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
77	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
78	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
79	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
80	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
81	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
82	Program Pengembangan Kebudayaan
83	Program Pembinaan Sejarah
84	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
85	Program Pembinaan Perpustakaan
86	Program Pengelolaan Arsip
87	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
88	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
89	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
90	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
91	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
92	Program Pemasaran Pariwisata
93	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



94	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
95	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
96	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
97	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
98	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteran
99	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteran
100	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
101	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
102	Program Perizinan Usaha Pertanian
103	Program Perizinan Usaha Pertanian
104	Program Penyuluhan Pertanian
105	Program Penyuluhan Pertanian
106	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
107	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
108	Program Stabilisasi Harga Barang
109	Program Pengembangan Ekspor
110	Program Standardisasi dan perlindungan Konsumen
111	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
112	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
113	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
114	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
115	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
116	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
117	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
118	Program Perekonomian dan Pembangunan
119	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
120	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
121	Program Perencanaan ,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
122	Program Korodinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
123	Program Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah
124	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
125	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
126	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
127	Program Kepegawaian Daerah
128	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
129	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
130	Program Pengelolaan Perbatasan
131	Program Penyelenggaraan Pengawasan



132	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
133	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
134	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
135	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
136	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
137	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
138	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
139	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
140	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
141	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Kependidikan
142	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
143	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
144	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Daerah
145	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
146	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

#### **D. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
5	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
6	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
8	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
9	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
10	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
11	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)





12	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan
13	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran
14	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentral Makanan Jajanan
15	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah
16	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas ktor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
17	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
18	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
19	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
20	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
21	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha
22	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
23	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
24	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah
25	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
26	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota
27	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota
28	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
29	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
30	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
31	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
32	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
33	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota



34	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
35	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
36	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
37	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
38	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
39	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
40	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
41	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada
42	Daerah Kabupaten/Kota
43	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
44	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
45	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
46	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
47	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
48	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
49	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
50	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
51	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkast di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan
52	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis
53	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
54	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
55	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
56	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kestapslagaan Bencana Kabupaten/Kota
57	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota



58	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
59	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
60	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
61	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
62	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi
63	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah
64	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
65	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan
66	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
67	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
68	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan
69	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
70	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah
71	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
72	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
73	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
74	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah
75	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
76	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota
77	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
78	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
79	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
80	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota



81	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah
82	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
83	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
84	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
85	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
86	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
87	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
88	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
89	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
90	Penyimpanan Sementara Limbah B3
91	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah
92	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
93	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
94	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
95	Pengelolaan Sampah
96	Pelayanan trendaftaran Penduduk
97	Penataan Pendaftaran Penduduk
98	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
99	Pelayanan Pencatatan Sipil
100	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
101	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
102	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
103	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
104	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
105	Penyusunan Profil Kependudukan
106	Penyelenggaraan Penataan Desa
107	Fasilitasi Kerja sama antar Desa



108	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
109	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah
110	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
111	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
112	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
113	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
114	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah
115	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
116	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
117	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
118	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
119	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
120	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
121	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
122	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
123	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Daerah Kabupaten/Kota
124	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
125	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah
126	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
127	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
128	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota
129	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
130	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota



131	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah
132	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
133	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
134	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
135	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan
136	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
137	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
138	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
139	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
140	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
141	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,
142	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
143	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah
144	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
145	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
146	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
147	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
148	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
149	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
150	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
151	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
152	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota



153	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
154	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
155	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
156	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
157	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
158	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
159	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
160	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh)
161	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan
162	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
163	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
164	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
165	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
166	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
167	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
168	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
169	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
170	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
171	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
172	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
173	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
174	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
175	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
176	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
177	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah
178	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah
179	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain



180	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
181	Pengembangan Prasarana Pertanian
182	Pengembangan Prasarana Pertanian
183	Pembangunan Prasarana Pertanian
184	Pembangunan Prasarana Pertanian
185	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah
186	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah
187	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
188	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
189	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
190	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
191	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
192	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
193	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
194	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
195	Penerbitan Tanda Daftar Gudang
196	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
197	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
198	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
199	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 Daerah
200	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
201	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
202	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
203	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin





204	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
205	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
206	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
207	Administrasi Tata Pemerintahan
208	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
209	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
210	Fasilitasi Kerjasama Daerah
211	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
212	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
213	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
214	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
215	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
216	Pembahasan Kebijakan Anggaran
217	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
218	Peningkatan Kapasitas DPRD
219	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
220	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
221	Fasilitasi Tugas DPRD
222	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
223	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
224	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
225	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
226	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
227	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
228	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
229	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
230	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
231	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
232	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
233	Pengelolaan Barang Milik Daerah
234	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
235	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
236	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
237	Mutasi dan Promosi ASN



238	Pengembangan Kompetensi ASN
239	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
240	Pengembangan Kompetensi Teknis
241	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
242	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
243	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
244	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
245	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
246	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan
247	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
248	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
249	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
250	Pendampingan dan Asistensi
251	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
252	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
253	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
254	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
255	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
256	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
257	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
258	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
259	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
260	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
261	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
262	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
263	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
264	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah



265	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
266	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
267	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
268	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
269	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
270	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
271	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
272	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
273	Administrasi Keuangan
274	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
275	Administrasi Umum
276	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
277	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
278	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
279	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
280	Administrasi Umum Perangkat Daerah
281	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
282	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
283	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
284	Peningkatan Pelayanan BLUD
285	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
286	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
287	Penataan Organisasi
288	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
289	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
290	Layanan Administrasi DPRD



### **1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

Implikasi diterbitkannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Aturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pada peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama terkait definisi operasional, indikator kinerja, ukuran/satuan, pembilang dan penyebut, perhitungan, sumber data, langkah kegiatan dan kebutuhan sumber daya manusia. Hal ini diharapkan dengan adanya dokumen SPM maka dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan, ketanggapan kebutuhan dalam melakukan pelayanan, pembiayaan pengembangan pelayanan, kuantitas dan perluasan jangkauan pengguna. Setelah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dijalankan dengan baik maka akan berdampak pada kepuasan pengguna layanan dan kemandirian dalam pemberian layanan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu memfokuskan pencapaian SPM berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan. Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial.



## BAB II

# CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

### 3.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	2020	2021	SELISIH PERUBAHAN	PERSENTASE PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Pembanguna manusia	65,77	66,20	0,43	0,65
2.	Angka Kemiskinan (Persen)	4,46	4,55	0,09	2,02
3.	Angka Pengangguran (Persen)	3,52	3,45	-0,07	-1,99
4.	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	0,71*)	4,19**)	3,48	490,14
5.	Pendapatan Per Kapita (juta RP/Tahun)	41,89	44,37	2,48	5,91
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,279	0,330	0,051	18,46



### 3.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

#### 3.2.1 INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (*output*)

##### A. URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

###### 1. Urusan Pendidikan

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)
<b>Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD</b>		
1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	<b>44</b>	DINAS DIKBUD
2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah.	Dari <b>12</b> Sub Kegiatan yang dapat dipetakan hanya terdapat <b>2</b> sub kegiatan yang bersumber dari APBD, sehingga berdampaknya belum optimalnya pencapaian.	DINAS DIKBUD
3. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan.	Dari <b>12</b> Sub Kegiatan yang dapat dipetakan hanya terdapat <b>2</b> sub kegiatan yang bersumber dari APBD, sehingga berdampaknya belum optimalnya pencapaian.	DINAS DIKBUD
4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	<b>95</b> Pendidik	DINAS DIKBUD



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
5.	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	<b>151</b> Pendidik	DINAS DIKBUD
6.	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.	<b>56</b> Orang	DINAS DIKBUD
7.	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah.	<b>29</b> Orang	DINAS DIKBUD
<b>Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar</b>			
1.	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Sekolah Dasar: <b>1. Akre A : 31</b> <b>2. Akre B : 174</b> <b>3. Akre C : 251</b>  SMP: <b>1. Akre A : 16</b> <b>2. Akre B : 52</b> <b>3. Akre C : 42</b>	DINAS DIKBUD
2.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah.	Dari <b>12</b> Sub Kegiatan yang dapat dipetakan hanya terdapat <b>2</b> sub kegiatan yang bersumber dari APBD, sehingga berdampak belum optimalnya pencapaian.	DINAS DIKBUD
3.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama	Dari <b>12</b> Sub Kegiatan yang dapat dipetakan hanya	DINAS DIKBUD



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
	(Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	terdapat <b>2</b> sub kegiatan yang bersumber dari APBD, sehingga berdampaknya belum optimalnya pencapaian.	
4.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	SD: <b>93</b> Orang	DINAS DIKBUD
5.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	SMP: <b>70</b> Orang	DINAS DIKBUD
6.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	<b>1.480</b> Guru	DINAS DIKBUD
7.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	<b>715</b> Guru	DINAS DIKBUD
8.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	<b>3.096</b> Guru	DINAS DIKBUD
9.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	<b>1.203</b> Guru	DINAS DIKBUD
10.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	<b>259</b> Orang	DINAS DIKBUD
11.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	<b>26</b> Orang	DINAS DIKBUD
12.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	<b>103</b> Orang	DINAS DIKBUD
13.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	<b>155</b> Orang	DINAS DIKBUD
14.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	<b>2.264</b> Guru	DINAS DIKBUD





INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
15.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	<b>1073</b> Guru	DINAS DIKBUD
16.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.	<b>362</b> Kepala Sekolah	DINAS DIKBUD
17.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.	<b>110</b> Kepala Sekolah	DINAS DIKBUD
18.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	<b>60</b> Orang	DINAS DIKBUD
19.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	<b>25</b> Orang	DINAS DIKBUD
	<b>Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama</b>		
1.	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Sekolah Dasar: <b>1. Akre A : 31</b> <b>2. Akre B : 174</b> <b>3. Akre C : 251</b>  SMP: <b>1. Akre A : 16</b> <b>2. Akre B : 52</b> <b>3. Akre C : 42</b>	DINAS DIKBUD



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
2.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah.	Dari <b>12</b> Sub Kegiatan yang dapat dipetakan hanya terdapat <b>2</b> sub kegiatan yang bersumber dari APBD, sehingga berdampaknya belum optimalnya pencapaian.	DINAS DIKBUD
3.	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah.	Dari <b>12</b> Sub Kegiatan yang dapat dipetakan hanya terdapat <b>2</b> sub kegiatan yang bersumber dari APBD, sehingga berdampaknya belum optimalnya pencapaian.	DINAS DIKBUD
4.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan.	<b>SD: 93</b> orang	DINAS DIKBUD
5.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan.	<b>SMP: 70</b> Orang	DINAS DIKBUD
6.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar.	<b>1.480</b> Guru	DINAS DIKBUD
7.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama.	<b>715</b> Guru	DINAS DIKBUD
8.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	<b>3.096</b> Guru	DINAS DIKBUD
9.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama.	<b>1.203</b> Guru	DINAS DIKBUD
10.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar.	<b>259</b> Orang	DINAS DIKBUD
11.	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	<b>26</b> Orang	DINAS DIKBUD
12.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar.	<b>103</b> Orang	DINAS DIKBUD
13.	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama.	<b>155</b> Orang	DINAS DIKBUD



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
14.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik.	<b>2.264</b> Guru	DINAS DIKBUD
15.	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik.	<b>1.073</b> Guru	DINAS DIKBUD
16.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.	<b>362</b> Kepala Sekolah	DINAS DIKBUD
17.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.	<b>110</b> Kepala Sekolah	DINAS DIKBUD
18.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat.	<b>60</b> Orang	DINAS DIKBUD
19.	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat.	<b>25</b> Orang	DINAS DIKBUD
<b>Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan</b>			
1.	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta).	<b>9</b> Satuan Pendidikan	DINAS DIKBUD



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
2.	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah.	Dari <b>12</b> Sub Kegiatan yang dapat dipetakan hanya terdapat <b>2</b> sub kegiatan yang bersumber dari APBD, sehingga berdampaknya belum optimalnya pencapaian.	DINAS DIKBUD
3.	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan.	Dari <b>12</b> Sub Kegiatan yang dapat dipetakan hanya terdapat <b>2</b> sub kegiatan yang bersumber dari APBD, sehingga berdampaknya belum optimalnya pencapaian.	DINAS DIKBUD
4.	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta).	<b>16</b> Orang	DINAS DIKBUD
5.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta).	<b>93</b> Orang	DINAS DIKBUD
6.	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).	<b>67</b> Orang	DINAS DIKBUD
7.	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	<b>10</b> Orang	DINAS DIKBUD
8.	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	<b>10</b> Orang	DINAS DIKBUD



## 2. URUSAN KESEHATAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
<b>Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan</b>			
1.	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	1 (RSUD M.Th. Djaman)	DINKES
<b>Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi</b>			
1.	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	4 Rumah Sakit	DINKES
<b>Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil</b>			
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Tersedia	DINKES
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	287	DINKES
<b>Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan</b>			
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Tersedia	DINKES
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	287	DINKES
<b>Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir</b>			
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Tersedia	DINKES
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	287	DINKES
<b>Cakupan pelayanan kesehatan balia sesuai standar</b>			
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Tersedia	DINKES
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	68	DINKES
<b>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</b>			
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Tersedia	DINKES
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	77	DINKES



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
<b>Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</b>			
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Tersedia	DINKES
2.	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	b	DINKES
<b>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</b>			
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Tersedia	DINKES
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<b>57</b>	DINKES
<b>Persentase penderita hipertensi yang mendapatka pelayanan kesehatan sesuai standar</b>			
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Tersedia	DINKES
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuaistandar	<b>347</b>	DINKES
<b>Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</b>			
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Tersedia	DINKES
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<b>324</b>	DINKES
<b>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar</b>			
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Tersedia	DINKES
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<b>341</b>	DINKES
<b>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</b>			
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Tersedia	DINKES
2.	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<b>76</b>	DINKES
<b>Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</b>			
1.	Jumlah dukungan logistik	Tersedia	DINKES



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)
2.	kesehatan yang tersedia	
Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<b>39</b>	DINKES

### 3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)
<b>Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota</b>		
1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	<b>448.22 ha</b>	DBM-SDA
2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Sampai saat ini belum terdapat data pendukung yang akurat pada indikator kinerja di atas, sehingga data tersebut belum dapat kami sampaikan	DBM-SDA
3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Sampai saat ini belum terdapat data pendukung yang akurat pada indikator kinerja di atas, sehingga data tersebut belum dapat kami sampaikan	DPCKTRP
4. Panjang pantai dikawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Sampai saat ini belum terdapat data pendukung yang akurat pada indikator kinerja di atas, sehingga data tersebut belum dapat kami sampaikan	DBM-SDA
5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan	Sampai saat ini belum terdapat data pendukung yang akurat pada indikator kinerja di atas, sehingga data tersebut belum dapat kami sampaikan	DBM-SDA



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
	kabupaten/kota		
6.	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Sampai saat ini belum terdapat data pendukung yang akurat pada indikator kinerja di atas, sehingga data tersebut belum dapat kami sampaikan	DBM-SDA
7.	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Sampai saat ini belum terdapat data pendukung yang akurat pada indikator kinerja di atas, sehingga data tersebut belum dapat kami sampaikan	DBM-SDA
<b>Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/ kota</b>			
1.	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Sampai saat ini belum terdapat data pendukung yang akurat pada IKK ini.	DPCKTRP/ BPBD
2.	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Sampai saat ini belum terdapat data pendukung yang akurat pada IKK ini.	DPCKTRP/ BPBD
3.	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS	Sampai saat ini belum terdapat data pendukung yang akurat pada IKK ini.	DPCKTRP DBM-SDA
4.	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	Sampai saat ini belum terdapat data pendukung yang akurat pada IKK ini.	DBM-SDA
5.	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber	Sampai saat ini belum terdapat data pendukung yang akurat pada IKK ini.	DBM-SDA





INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
	daya air WS Kewenangan Kabupaten/kota		
6.	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Sampai saat ini belum terdapat data pendukung yang akurat pada IKK ini.	DBM-SDA
7.	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	<b>448.22 Ha</b>	DBM-SDA
<b>Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi</b>			
1.	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik.	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (45.764,053m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi primer (71.450,40m)}} \times 100\% = \mathbf{64,04\%}$	DBM-SDA
2.	Persentase panjang Jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (83,011,99m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder (226.871,01m)}} \times 100\% = \mathbf{36,59\%}$	DBM-SDA
3.	Persentase panjang Jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (28.130,12m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi tersier (177.102m)}} \times 100\% = \mathbf{15,88\%}$	DBM-SDA
<b>Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan</b>			



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
<b> jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota</b>			
1.	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	<b>Dokumen 2016</b>	DPCKTRP
2.	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada (Perbup Sanggau No.58 Tahun 2020)	DLH
3.	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	<b>1</b> (Tirta Pancur AJi)	DPCKTRP
4.	Jumlah izin yang Diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	<b>1</b> (Tirta Pancur AJi)	DPCKTRP
5.	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	-	DPCKTRP
<b>Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</b>			
1.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S	<b>84.539</b> Rumah	DPCKTRP
2.	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	<b>3.526</b> Rumah	DPCKTRP
3.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan	<b>78.313</b> Rumah	DPCKTRP



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
	rumah Untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T		
4.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Tidak ada pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja di Kabupaten Sanggau	DPCKTRP
5.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Tidak ada pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja di Kabupaten Sanggau	DPCKTRP
6.	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Tidak ada pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja di Kabupaten Sanggau	DPCKTRP
7.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik (-) $\frac{\text{Rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun } <25 \text{ jiwa/ha } (-)}{\text{Rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun } <25 \text{ jiwa/ha } (-)} \times 100\% = -\%$	DPCKTRP
8.	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	Sampai saat ini belum terdapat data pendukung yang akurat pada IKK ini.	DPCKTRP
9.	Kinerja penyediaan Pelayanan SPALD T akses aman	Sampai saat ini belum terdapat data pendukung yang akurat pada IKK ini.	DPCKTRP
10.	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	Sampai saat ini belum terdapat data pendukung yang akurat pada IKK ini.	DPCKTRP



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
11.	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Tidak ada pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja di Kabupaten Sanggau	DPCKTRP
12.	Kinerja penyediaan Prasarana pengolahan lumpur tinja	Tidak ada pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja di Kabupaten Sanggau	DPCKTRP
13.	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	Sampai saat ini belum terdapat data pendukung yang akurat pada IKK ini.	DPCKTRP
14.	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Tidak ada pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja di Kabupaten Sanggau	DPCKTRP
<b>Rasio kepatuhan IMB kab/ kota</b>			
1.	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Sampai saat ini belum terdapat data pendukung yang akurat pada IKK ini.	DPCKTRP
2.	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	<b>77 IMB</b>	DPMPTSP
3.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung	DPCKTRP
4.	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim ahli Bangunan/ Gedung	Tidak ada	DPCKTRP
5.	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	<b>8 Bangunan</b>	DPCKTRP
6.	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah Kabupaten	ada	DPCKTRP / BPKAD
7.	Jumlah bangunan	<b>3986</b>	BPKAD



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
	gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	Gedung/Bangunan Milik Pemda	
8.	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	-	BPKAD
<b>Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/ kota</b>			
1.	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	<b>1001.44 Km</b>	DBM-SDA
2.	Panjang jalan yang dibangun	<b>0 Km</b>	DBM-SDA
3.	Panjang jembatan yang dibangun	<b>50 Meter</b>	DBM-SDA
4.	Panjang jalan yang Ditingkatkan (struktur/ fungsi)	<b>17.469 Km</b>	DBM-SDA
5.	Panjang jembatan yang diganti/ dilebarkan	<b>24 Meter</b>	DBM-SDA
6.	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	<b>0.567 Km</b>	DBM-SDA
7.	Panjang jembatan yang direhabilitasi	<b>4 Meter</b>	DBM-SDA
8.	Panjang jalan yang dipelihara	<b>17.626 Km</b>	DBM-SDA
9.	Panjang jembatan yang dipelihara	<b>72 Meter</b>	DBM-SDA
<b>Rasio tenaga operator/teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi</b>			
1.	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	<b>2 Kegiatan</b>	DBM-SDA
2.	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	<b>92 Orang</b>	DBM-SDA
3.	Jumlah tenaga kerja	<b>63 Orang</b>	DBM-SDA



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
	konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota		
4.	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	<b>1</b> Dokumen	DBM-SDA
5.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	<b>411</b> paket	DBM-SDA
6.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tidak tersedia	DBM-SDA
7.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak Tersedia	DBM-SDA
8.	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	<b>377</b> Paket	DBM-SDA
9.	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi	<b>1</b> Dokumen	DBM-SDA



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
	kabupaten/kota		
10.	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	<b>2 Kegiatan</b>	DBM-SDA
11.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	<b>92 Orang</b>	DBM-SDA
12.	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	<b>63 Orang</b>	DBM-SDA
13.	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	<b>205 Badan Usaha</b>	DBM-SDA
14.	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	<b>15 Rekomendasi</b>	DBM-SDA



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
15.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	NIHIL	DBM-SDA
16.	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DBM-SDA
17.	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	NIHIL (sudah sesuai ketentuan)	DBM-SDA
18.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	205 IUJK	DBM-SDA
19.	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada Rekomendasi TDUP	DBM-SDA
20.	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	165 Badan Usaha	DBM-SDA
21.	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	28 Badan Usaha	DBM-SDA
22.	Jumlah pemenuhan	15 Rekomendasi	DBM-SDA





INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
	komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		
23.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	411 Paket Pekerjaan	DBM-SDA
24.	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada Laporan Kejadian	DBM-SDA
25.	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	DBM-SDA

#### 4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
<b>Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota</b>			
1.	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Merupakan indikator kinerja kunci hasil dari program pengembangan perumahan, belum dapat diisi pada capaian kinerja tahun 2021.	DPCKTRP
2.	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		
3.	Jumlah RT, KK dan Jiwa		



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA		
(1)		(2)	(3)		
	korban yang rumahnya terkena bencana alam	Pada APBD Tahun 2023, Dinas Perumahan Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau akan memasukkan program pengembangan perumahan dan dituangkan dalam kegiatan dan sub kegiatan pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana, penyusunan sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana, serta rehabilitasi rumah bagi korban bencana.			
4.	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi				
5.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi				
6.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi				
7.	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana				
8.	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi				
9.	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan				
<b>Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota</b>					
1.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM			Merupakan indikator kinerja kunci hasil dari program pengembangan perumahan, belum dapat diisi pada capaian kinerja tahun 2021. Pada APBD Tahun 2023, Dinas Perumahan Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau akan memasukkan program pengembangan perumahan dan dituangkan dalam kegiatan dan	DPCKTRP
2.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM				
3.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan				



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
4.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sub kegiatan pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana, penyusunan sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana, serta rehabilitasi rumah bagi korban bencana.	
5.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		
6.	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		
<b>Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani</b>			
1.	Jumlah luasan (Ha) Kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	<b>259,23</b>	DPCKTRP
2.	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	<b>95.693</b>	DPCKTRP
3.	Jumlah luasan (ha) Penanganan infrastruktur kawasan kumuh	<b>39,63</b>	DPCKTRP
<b>Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)</b>			
1.	Jumlah rumah di kab/kota	<b>142.501</b>	DPCKTRP
2.	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	<b>95.693</b>	DPCKTRP
3.	Jumlah rumah tidak layak huni	<b>46.808</b>	DPCKTRP
4.	Jumlah rumah yang tidak dihuni	<b>1.400</b>	DPCKTRP
5.	Rasio rumah dan KK	<b>144.195</b> X 100% = <b>101,19%</b> <b>142.501</b>	DPCKTRP
6.	Jumlah rumah Pembangunan baru	<b>7.125</b>	DPCKTRP
<b>Jumlah perumahan yang</b>			



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
<b>sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)</b>			
1.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	<b>1607</b>	DPCKTRP
2.	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	<b>55.825</b>	DPCKTRP
3.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	-	DPCKTRP
4.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	<b>81.839</b>	DPCKTRP
5.	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	-	DPCKTRP
6.	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	-	DPCKTRP
7.	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	-	DPCKTRP
8.	Jumlah pengembang yang teregistrasi	<b>27</b>	DPCKTRP
9.	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	-	DPCKTRP

## 5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
<b>Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan</b>			
1.	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	<b>19</b> Pengaduan	SAT POL-PP
2.	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Dari tahun 2019 sampai saat ini masih proses pendataan.	SAT POL-PP
3.	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Perda Nomor 15 tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Perbup Nomor 47 Tahun 2020)	SAT POL-PP
4.	Jumlah Polisi Pamong	<b>3 (tiga)</b> orang yang memiliki kualitas	SAT



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
	Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	sebagai PPNS	POL-PP
5.	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	GAKUMDA ( Perbup Nomor 18 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis standar oprasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau) TRANTIBUM Permen tentang SOP ( Nomor 54 tahun 2011) Perbup tentang SOP (Nomor 18 Tahun 2015) Perda tentang ketertiban umum (Nomor 15 Tahun 2017)	SAT POL-PP
6.	Tersedianya sarana prasarana minimal	Terdiri dari ; 1. Floting Pump 2. Breating aparatur 3. Baju pelampung 4. Alat pemadam api ringan 5. Perlengkapan penyelamatan	SAT POL-PP
<b>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>			
1.	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun $\frac{\text{Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan}}{\text{Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\% = 0\%$	BPBD
2.	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai Jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana (46.189) $\frac{\text{Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana (272.564)}}{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana (46.189)}} \times 100\% = 16,95\%$	BPBD
<b>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>			



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.	Persentase penyelesaian dokumen RPB Sampai dinyatakan sah/legal	Tidak ada	BPBD
2.	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Tidak ada	BPBD
3.	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan (25)}}{\text{Di kawasan rawan bencana (276.564)}} \times 100\% = 0,01\%$	BPBD
4.	Persentase warga Negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang ikut pelatihan (36)}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana (276.564)}} \times 100\% = 0,01\%$	BPBD
5.	Persentase warga Negara yang mendapat layanan Pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops}}{\text{Di kawasan rawan bencana}} \times 100\% = 0\%$	BPBD
6.	Persentase warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan (0)}}{\text{Di kawasan rawan bencana (0)}} \times 100\% = 0\%$	BPBD
<b>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>			
1.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	$\frac{\text{kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa (KLB) 1}}{\text{Jumlah seluruh Penetapan Status kejadian luar}} \times 100\% = 100\%$	BPBD



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
		biasa (KLB) <b>1</b>	
2.	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah Kecepatan Respon kurang dari 24 Jam untuk setiap penetapan darurat bencana (2)}}{\text{Jumlah seluruh Penetapan Status darurat bencana (2)}} \times 100\% = \mathbf{100\%}$	BPBD
3.	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	$\frac{\text{Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana (21)}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana (51)}} \times 100\% = \mathbf{41.18\%}$	BPBD
4.	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	$\frac{\text{Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi (33.591)}}{\text{Keseluruhan dari bencana (33.591)}} \times 100\% = \mathbf{100\%}$	BPBD
<b>Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>			
1.	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	<b>15</b> kejadian Kebakaran	SAT POL-PP
2.	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	<b>15</b> Pos Sektor (Kecamatan)	SAT POL-PP
3.	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara	Tidak tersedianya Aparatur selama 24 (jam) yang melaksanakan shift di Kantor Kecamatan	SAT POL-PP



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA																																																																						
(1)		(2)	(3)																																																																						
	bergantian (shift) di kantor kecamatan																																																																								
4.	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	Kelurahan Ilir Kota, 2 Pos Damkar: 1. Yayasan bhakti bersama (pasar sgu) 2. Yayasan swadaya masyarakat (ilir kota)	SAT POL-PP																																																																						
5.	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	<p>Tersedia di 15 Kecamatan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Fire Truck Dyna</td><td>1</td></tr> <tr><td>Fire Truck Ragasa</td><td>1</td></tr> <tr><td>Fire Truck 6000 Lt</td><td>1</td></tr> <tr><td>Fire Truck 4000 Lt</td><td>1</td></tr> <tr><td>Mobil Hilux</td><td>13</td></tr> <tr><td>Mobil Tangki</td><td>6</td></tr> <tr><td>Mobil Pick Up</td><td>1</td></tr> <tr><td>Mobil Damkar</td><td>3</td></tr> <tr><td>Mobil Minibus</td><td>1</td></tr> <tr><td>Mobil Kijang</td><td>1</td></tr> <tr><td>Mesin Kohler</td><td>2</td></tr> <tr><td>Mesin Fortabel</td><td>6</td></tr> <tr><td>Mesin Tohatsu</td><td>5</td></tr> <tr><td>Mesin Alkon</td><td>3</td></tr> <tr><td>Mesin Pompa Air Damkar</td><td>19</td></tr> <tr><td>Mesin Robin</td><td>2</td></tr> <tr><td>Mesin RS :L20</td><td>1</td></tr> <tr><td>Mesin Tangki Air 500 Lt</td><td>1</td></tr> <tr><td>Selang</td><td>27</td></tr> <tr><td>Selang 2,5"</td><td>139</td></tr> <tr><td>Selang 1,5"</td><td>17</td></tr> <tr><td>Selang 2"</td><td>25</td></tr> <tr><td>Nozzel</td><td>19</td></tr> <tr><td>Nozzel 1,5"</td><td>4</td></tr> <tr><td>Nozzel 2,5"</td><td>16</td></tr> <tr><td>Nozzel Cabang</td><td>1</td></tr> <tr><td>Nozel Pistol</td><td>1</td></tr> <tr><td>Floating Pump</td><td>13</td></tr> <tr><td>HT</td><td>2</td></tr> <tr><td>APAR</td><td>5</td></tr> <tr><td>Pembagi 2,5"</td><td>1</td></tr> <tr><td>Respirator</td><td>6</td></tr> <tr><td>Kepala Selang</td><td>4</td></tr> <tr><td>Penunjang Mesin Damkar</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	Nama	Jumlah	Fire Truck Dyna	1	Fire Truck Ragasa	1	Fire Truck 6000 Lt	1	Fire Truck 4000 Lt	1	Mobil Hilux	13	Mobil Tangki	6	Mobil Pick Up	1	Mobil Damkar	3	Mobil Minibus	1	Mobil Kijang	1	Mesin Kohler	2	Mesin Fortabel	6	Mesin Tohatsu	5	Mesin Alkon	3	Mesin Pompa Air Damkar	19	Mesin Robin	2	Mesin RS :L20	1	Mesin Tangki Air 500 Lt	1	Selang	27	Selang 2,5"	139	Selang 1,5"	17	Selang 2"	25	Nozzel	19	Nozzel 1,5"	4	Nozzel 2,5"	16	Nozzel Cabang	1	Nozel Pistol	1	Floating Pump	13	HT	2	APAR	5	Pembagi 2,5"	1	Respirator	6	Kepala Selang	4	Penunjang Mesin Damkar	2	SAT POL-PP
Nama	Jumlah																																																																								
Fire Truck Dyna	1																																																																								
Fire Truck Ragasa	1																																																																								
Fire Truck 6000 Lt	1																																																																								
Fire Truck 4000 Lt	1																																																																								
Mobil Hilux	13																																																																								
Mobil Tangki	6																																																																								
Mobil Pick Up	1																																																																								
Mobil Damkar	3																																																																								
Mobil Minibus	1																																																																								
Mobil Kijang	1																																																																								
Mesin Kohler	2																																																																								
Mesin Fortabel	6																																																																								
Mesin Tohatsu	5																																																																								
Mesin Alkon	3																																																																								
Mesin Pompa Air Damkar	19																																																																								
Mesin Robin	2																																																																								
Mesin RS :L20	1																																																																								
Mesin Tangki Air 500 Lt	1																																																																								
Selang	27																																																																								
Selang 2,5"	139																																																																								
Selang 1,5"	17																																																																								
Selang 2"	25																																																																								
Nozzel	19																																																																								
Nozzel 1,5"	4																																																																								
Nozzel 2,5"	16																																																																								
Nozzel Cabang	1																																																																								
Nozel Pistol	1																																																																								
Floating Pump	13																																																																								
HT	2																																																																								
APAR	5																																																																								
Pembagi 2,5"	1																																																																								
Respirator	6																																																																								
Kepala Selang	4																																																																								
Penunjang Mesin Damkar	2																																																																								
6.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar kualifikasi pemadam	Jumlah Aparatur yang memenuhi standar kualifikasi adalah 11 (sebelas) orang	SAT POL-PP																																																																						





INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
	sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran		
7.	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Pada Tahun 2021 tidak terdapat Relawan Kebakaran.	SAT POL-PP
8.	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	8 (delapan) Aparatur, sudah mengikuti pendidikan dan latihan pemadam kebakaran.	SAT POL-PP

## 6. URUSAN SOSIAL

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
<b>Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)</b>			
1.	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	- <b>POTSAWI (1 Layanan Data dan Pengaduan)</b>	DINSOS P3AKB
2.	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	- Disabilitas = <b>2.063</b> Jiwa - Lansia = <b>749</b> Jiwa	DINSOS P3AKB
3.	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	<b>48</b> Orang	DINSOS P3AKB
4.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	- Disabilitas = <b>275</b> Jiwa - Lansia = <b>225</b> Jiwa	DINSOS P3AKB
5.	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus	<b>2</b> (dua) Buah Unit	DINSOS P3AKB



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
	layanan kedaruratan yang dimiliki		
6.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanaan sesuai standar gizi	Lansia = <b>749</b> Jiwa	DINSOS P3AKB
7.	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Pembangunan rumah singgah/shelter yang sesuai standar membutuhkan biaya yang sangat besar, karena yang harus disediakan tidak hanya bangunan tapi harus dilengkapi dengan prasarana lainnya. Pembangunan sudah diajukan pada Tahun 2021 dan rencana realisasi Tahun 2022	DINSOS P3AKB
8.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Tidak ada	DINSOS P3AKB
9.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Disabilitas = <b>20</b> Jiwa	DINSOS P3AKB
10.	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	Tidak ada	DINSOS P3AKB
11.	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	Tidak ada	DINSOS P3AKB
12.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Tidak ada	DINSOS P3AKB
13.	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Tidak ada	DINSOS P3AKB
14.	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	<b>4</b> Orang	DINSOS P3AKB
15.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak	Tidak ada	DINSOS P3AKB



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
	terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial		
16.	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	<b>245</b> Jiwa Orang	DINSOS P3AKB
17.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Tidak ada	DINSOS P3AKB
18.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	Tidak ada	DINSOS P3AKB
19.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	<b>2</b> Orang	DINSOS P3AKB
20.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	<b>2</b> Orang	DINSOS P3AKB
21.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	<b>1</b> Orang	DINSOS P3AKB
<b>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota</b>			
1.	Jumlah korban bencana yang	<b>35.467</b> Jiwa	DINSOS



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
	mendapatkan makanan		P3AKB
2.	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Tidak ada	DINSOS P3AKB
3.	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Tidak ada	DINSOS P3AKB
4.	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Tidak ada	DINSOS P3AKB
5.	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Tidak ada	DINSOS P3AKB
6.	Jumlah pekerja sosial profesional/tenagakesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	TKSK = <b>16</b> Orang	DINSOS P3AKB



## B. URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR.

### 1. URUSAN TENAGA KERJA

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
<b>Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja</b>			
1.	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	<i>1 dokumen</i>	NAKERTRANS
2.	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	$\frac{\text{Realisasi indikator} - \text{target indikator } 15,19}{\text{Realisasi (3)}} \times 100\% = 5,06\%$	NAKERTRANS
3.	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Tidak ada perusahaan yang menyusun RTK	NAKERTRANS
<b>Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi</b>			
1.	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi kluster	Tidak ada program kualifikasi kluster yang diterapkan	NAKERTRANS
2.	Persentase Instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n (2)}}{\text{jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n (2)}} \times 100\% = 100\%$	NAKERTRANS
3.	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{\text{Jumlah instruktur pada tahun n (2)}}{\text{jumlah peserta pelatihan pada tahun n (16)}} \times 100\% = 12,50\%$	NAKERTRANS
4.	Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n (2)}}{\text{jumlah seluruh LPK pada tahun n (2)}} \times 100\% = 100\%$	NAKERTRANS



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
5.	Persentase LPK yang memiliki perizinan	$\frac{\text{Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun } n(2)}{\text{jumlah LPK yang terdata pada tahun } n(2)} \times 100\% = 100\%$	NAKERTRANS
6.	Jumlah penganggur yang dilatih	16 Orang	NAKERTRANS
7.	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun } n(16)}{\text{Jumlah orang yang dilatih pada tahun } n(16)} \times 100\% = 100\%$	NAKERTRANS
8.	Persentase penyerapan lulusan	$\frac{\text{Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun } n(2)}{\text{jumlah lulusan pada tahun } n(16)} \times 100\% = 12,5\%$	NAKERTRANS
9.	Lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun } n(16)}{\text{jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pada tahun } n(16)} \times 100\% = 100\%$	NAKERTRANS
10.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan Pelatihan	$\frac{\sum \text{CPMI dilatih}}{\sum \text{CPMI terdaftar}} \times 100\% = \text{Tidak ada}$	NAKERTRANS
11.	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Tidak ada	NAKERTRANS
<b>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</b>			



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0 perusahaan	NAKERTRANS
2.	Data tingkat produktivitas total	Tidak ada	NAKERTRANS
<b>Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)</b>			
1.	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun } n \text{ (17)}}{10 \text{ orang atau lebih (117)}} \times 100\% = \mathbf{60,68\%}$	NAKERTRANS
2.	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun } n \text{ (33)}}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB (35)}} \times 100\% = \mathbf{60,68}$	NAKERTRANS
3.	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	<b>35 SP/SB</b>	NAKERTRANS
4.	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah (90)}}{\text{jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau}} \times 100\% = \mathbf{76,92\%}$	NAKERTRANS



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
		<b>PKB (117)</b>	
5.	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan (93)}}{\text{jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor(378)}} \times 100\% = \mathbf{24,60\%}$	NAKERTRANS
6.	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang berselisih (8)}}{\text{jumlah perusahaan pada tahun n (378)}} \times 100\% = \mathbf{2,12\%}$	NAKERTRANS
7.	Jumlah mogok kerja	Tidak Ada Mogok Kerja Tahun 2021	NAKERTRANS
8.	Jumlah penutupan perusahaan	Tidak ada penutupan perusahaan tahun 2021	NAKERTRANS
9.	Jumlah perselisihan kepentingan	Tidak ada perselisihan kepentingan tahun 2021	NAKERTRANS
10.	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Tidak ada perselisihan antara SP/Sb	NAKERTRANS
11.	Jumlah perselisihan PHK	<b>13</b> Perselisihan PHK	NAKERTRANS
12.	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	<b>13</b> Orang Pekerja/Buruh ter-PHK	NAKERTRANS
13.	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	<b>1</b> Perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	NAKERTRANS
14.	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	<b>1</b> LKS Tripartit	NAKERTRANS





INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
15.	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	<p><i>Jumlah Perjanjian Bersama (1)</i></p> <p>_____ X100% = <b>12,50%</b></p> <p><i>Jumlah kasus perselisihan (8)</i></p>	NAKERTRANS
<b>Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota</b>			
1.	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	<b>4</b> Lowongan	NAKERTRANS
2.	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kab/Kota	<b>1.610</b> Orang	NAKERTRANS
3.	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah Kab/Kota	<b>14</b> BKK SMK	NAKERTRANS
4.	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Tidak ada tenaga kerja khusus yang terdaftar	NAKERTRANS
5.	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	<b>2</b> Orang Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	NAKERTRANS
6.	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Tidak ada LPTKS antar Kerja lokal	NAKERTRANS



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
7.	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	Tidak ada perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas.	NAKERTRANS
8.	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	<b>239</b> orang tenaga kerja yang ditempatkan melalui IPK Online (SISNAKER)	NAKERTRANS
9.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\frac{\sum CPMI/CTKI \text{ yang mendapatkan sosialisasi}}{\sum CPMI/CTKI} \times 100\% = \text{Tidak ada Sosialisasi}$	NAKERTRANS
10.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	<b>3.188</b> Orang CPMI/CTKI	NAKERTRANS
11.	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	$\frac{\sum \text{fasilitasi PMI yang dipulangkan (66)}}{\sum \text{PMI yang pulang (3.188)}} \times 100\% = \mathbf{2,07\%}$	NAKERTRANS
12.	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Tidak ada yang mendapatkan Pendidikan dan pelatihan kerja	NAKERTRANS



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
13.	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Tidak ada pemberdayaan PMI/TKI Purna dan keluarganya	NAKERTRANS
14.	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	$\frac{\sum \text{LTSA yang terbentuk (1)}}{\text{Jumlah daerah kantong PMI/TKI (15)}} \times 100\% = 6,67\%$	NAKERTRANS

## 2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
<b>Persentase ARG pada belanja langsung APBD</b>			
1.	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	<b>2 Lembaga</b>	DINSOSP3AKB
2.	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	<b>2 Program</b>	DINSOSP3AKB
<b>Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten</b>			
1.	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	<b>28 Media Masa</b>	DINSOSP3AKB
2.	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	<b>9 Panti Asuhan 1 P2TP2A 1 UPPQ Polres Sanggau 1 PUSPAG SAMA DULI ANAK</b>	DINSOSP3AKB



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
3.	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	<b>0,69%</b>	DINSOSP3AKB
4.	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	<b>2 Lembaga PUSPAGA SAMA DULI ANAK P2TP2A DARANATE</b>	DINSOSP3AKB
5.	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	PUSPAGA SAMA DULI ANAK P2TP2A DARANATE	DINSOSP3AKB
<b>Rasio Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk perempuan)</b>			DINSOSP3AKB
1.	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	<b>32 Organisasi</b>	DINSOSP3AKB
2.	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	<b>65 Orang</b>	DINSOSP3AKB
3.	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	<b>6 Lembaga</b>	DINSOSP3AKB
4.	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	<b>6 Lembaga</b>	DINSOSP3AKB



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
5.	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	<b>3</b> Sub Kegiatan	DINSOSP3AKB
6.	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah Terstandardisasi	<b>2</b> Lembaga	DINSOSP3AKB
7.	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	<b>100%</b>	DINSOSP3AKB

### 3. URUSAN PANGAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
<b>Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)</b>			
1.	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada 1 Infrastruktur pergudangan	DKPTPHP
2.	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	<b>23</b>	DKPTPHP
3.	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak Ada	DKPTPHP
4.	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	<b>28</b>	DKPTPHP
5.	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	<b>1</b>	DKPTPHP



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
6.	Tertanganinya kerawanan pangan	<b>23</b>	DKPTPHP
7.	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak Ada	DKPTPHP
8.	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	<b>30</b>	DKPTPHP

#### 4. URUSAN PERTANAHAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
<b>Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan</b>			
1.	SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan ditambah jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya) (2) Dalam 1 tahun (2) X100% = <b>100%</b>	Kantor Petanahan Kab. Sanggau
		<b>1. PT. Sekayam Prisma Energi 84,77 Ha</b> <b>2. PT. Beginjan Jaya Makmur 215,91 Ha</b>	
2.	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Tidak ada SK Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Kantor Petanahan Kab. Sanggau



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
3.	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee	Tidak ada SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Kantor Petanahan Kab. Sanggau
4.	Dokumen Izin membuka tanah	Tidak ada izin membuka tanah	Kantor Petanahan Kab. Sanggau
5.	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Terlampir Penetapan Lokasi Tahun 2021 <b>1. Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 255/DPCKTRP/2021</b> <b>2. Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 262/DPCKTRP/2021</b> <b>3. Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 263/DPCKTRP/2021</b>	Kantor Petanahan Kab. Sanggau

## 5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/ Kota</b>			
1.	Hasil perhitungan Kabupaten terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	Berdasarkan perhitungan kualitas air Kabupaten Sanggau Tahun 2021 yaitu dengan nilai : IKA 50.00 maka IKA Kabupaten Sanggau Tahun 2020 berada pada kategori cemar 'RINGAN' Indeks Kualitas Udara (IKU)=93,99 (Unggul) Indeks Tutupan Lahan (ITH)= 32,48	DLH
<b>Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota</b>			
1.	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Tersedia	DLH



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)
<b>Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota</b>		
1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten (12) $\times 100\% = 100\%$ Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi (12)	DLH
2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/ Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah PPLHD yang ada (0) $\times 100\% = 0\%$ Jumlah kegiatan dan atau usaha yang ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (27) (Dinas Lingkungan Kabupaten Sanggau belum memiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di daerah (PPLHD))	DLH
3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	Jumlah MHA yang diakui (8) $\times 100\% = 63\%$ Jumlah usulan MHA (8)	DLH
4. Terasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang mendapatkan pelatihan (0) $\times 100\% = 0\%$ Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang ada (0)	DLH
5. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang	Jumlah lembaga kemasyarakatan	DLH





INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
	diberikan diklat	yang diberikan diklat/rencana $\frac{\text{Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberi diklat}}{\text{Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberi diklat}} \times 100\% = 0\%$	
6.	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	Pengaduan masyarakat yang ditangani (0) $\frac{\text{Total Pengaduan masyarakat yang teregristrasi (0)}}{\text{Total Pengaduan masyarakat yang teregristrasi (0)}} \times 100\% = \text{Tidak adak pada tahun 2021\%}$	DLH

## 6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
<b>Perekaman KTP-el</b>			
1.	Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan (2.933) $\frac{\text{Peristiwa perkawinan yang dilaporkan (2.993)}}{\text{Peristiwa perkawinan yang dilaporkan (2.993)}} \times 100\% = 100\%$	DINAS DUKCAPIL
2.	Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan (24) $\frac{\text{Peristiwa perceraian yang dilaporkan (24)}}{\text{Peristiwa perceraian yang dilaporkan (24)}} \times 100\% = 100\%$	DINAS DUKCAPIL
3.	Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan (943) $\frac{\text{Peristiwa kematian yang dilaporkan (943)}}{\text{Peristiwa kematian yang dilaporkan (943)}} \times 100\% = 100\%$	DINAS DUKCAPIL
4.	Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten kota dalam satu tahun (2) $\frac{\text{2 Tahun (2)}}{\text{2 Tahun (2)}} \times 100\% = 100\%$	DINAS DUKCAPIL



## 7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(4)		(5)	(6)
<b>Persentase Pengentasan Desa</b>			
1.	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	1	DPM-PEMDES
2.	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	5	
3.	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	20	DPM-PEMDES
4.	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	20	DPM-PEMDES

## 8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
<b>TFR (Angka Kelahiran Total)</b>			
1.	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1 SK Bupati "Tim penyusun (GDPK) Th 2021-2024	
2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia $62.545/97.280*100=64.29\%$	



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFR_i = \frac{b_i}{p^f} \times k$ Jumlah kelahiran remaja ( <b>39</b> ) X 100% = <b>0,27%</b> Jumlah perempuan kelompok usia 15-19 Tahun ( <b>14.671</b> )	DINSOSP3AKB
4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar KKBPK (advokasi dan KIE) ( <b>62.554</b> ) X 100% = <b>64.30%</b> Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE) ( <b>97.280</b> )	DINSOSP3AKB
5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	<b>24</b> stakeholders/ Pembangku kebijakan, mitra kerja.	DINSOSP3AKB
<b>Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)</b>			
1.	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP ( <b>29</b> ) X 100% = <b>100%</b> Jumlah Faskes ( <b>29</b> )	DINSOSP3AKB
2.	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB aktif ( <b>10.799</b> ) X 100% = <b>11,08%</b> Jumlah PUS ( <b>97.280</b> )	DINSOSP3AKB



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
3.	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	<b>162 (BKB 41, BKR 21, BKL 62, UPPKS 19, PIK-R 18, UPPKA 1)</b>	DINSOSP3AKB
4.	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern <b>(4.562)</b> $\frac{\text{Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan (8.624)}}{\text{Jumlah peserta KB pasca persalinan (4.562)}} \times 100\% = 51,52$	DINSOSP3AKB
<b>Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (unmet need)</b>			
1.	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah; <b>Sekayam ;Balai Karangan 553(43.99%) Kembayan ;Sebuduh 123 (44.24%) Entikong; Pala Pasang 100 (74.07). Parindu; Meringin Jaya 243 (51.48%) Beduai ;Mawang Muda 178 (56.69%) Toba ;Kampung Baru 111 (66.47%) Noyan; Empoto 13 (56.52%)</b>	DINSOSP3AKB
2.	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI <b>(13.572)</b> $\frac{\text{Jumlah keluarga PBI (62.545)}}{\text{Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI (13.572)}} \times 100\% = 21,70 \%$	DINSOSP3AKB



## 9. URUSAN PERHUBUNGAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
<b>Rasio konektivitas Kab/Kota</b>			
1.	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penampung angkutan jalan Tipe C yang tersedia (11) $\times 100\% = 100\%$ Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penampung angkutan jalan sesuai dengan pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan (11)	DISHUB
2.	Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun (3.245) $\times 100\% = 36,54\%$ Jumlah kendaraan yang wajib diuji (8.880)	DISHUB
3.	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan (1) $\times 100\% = 100\%$ Jumlah lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota (1)	DISHUB
4.	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten/ kota (494) $\times 100\% = 73,18\%$ Target kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten/ Kota (675)	DISHUB
<b>V/C Ratio di Jalan Kab/Kota</b>			
1.	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten/ kota (494) $\times 100\% = 73,18\%$ Target kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten/ Kota (675)	DISHUB



## 10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)
<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</b>		
1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo (30) $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah (43)}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah (43)}} \times 100\% = 69,77\%$	DISKOM INFO
2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo (30) $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah (43)}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah (43)}} \times 100\% = 69,77\%$ <b>Akses internet berkualitas :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat realibilitas (SLA) 97-98%</li> <li>• Tingkat ketersediaan (semua perangkat daerah sampai ke desa sudah tersedia)</li> <li>• Besarnya bandwidth yang memadai (min.2 mbps)</li> </ul>	DISKOM INFO
3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra Pemerintah	YA	DISKOM INFO



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
<b>Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</b>			
1.	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Koinfo Nomor 5 Tahun 2015	<p>Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara negara sesuai dengan Peraturan Menteri Koinfo Nomor 5 tahun 2015 (47)</p> <hr/> <p>Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah (47)</p> <p style="text-align: right;"><math>X100\% = 100\%</math></p>	DISKOM INFO
2.	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	<p>Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standart (43)</p> <hr/> <p>Jumlah Perangkat Daerah (43)</p> <p style="text-align: right;"><math>X100\% = 100\%</math></p>	DISKOM INFO
3.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	<p>Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (43)</p> <hr/> <p>Jumlah Perangkat Daerah (43)</p> <p style="text-align: right;"><math>X100\% = 100\%</math></p>	DISKOM INFO
4.	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah di implementasikan	DISKOM INFO



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
	bisnis yang telah di implementasikan secara elektronik	secara elektronik (6) $\frac{\text{Jumlah layanan (7)}}{\text{secara elektronik (6)}} \times 100\% = 85,7\%$ Layanan yang digunakan : 1. SIPD 2. LPSE 3. E-PHYO 4. PPID 5. SiRUP 6. MySAPK  Layanan yang ada : 1. SIPD 2. LPSE 3. E-PHYO 4. PPID 5. SiRUP 6. SRIKANDI 7. MySAPK	
5.	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik $\frac{\text{Jumlah layanan SPBE}}{\text{Jumlah layanan}} \times 100\% = \text{Tidak ada pada Tahun 2021}$	DISKOM INFO
6.	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (33) $\frac{\text{Jumlah Sistem elektronik (40)}}{\text{Jumlah sistem elektronik yang terdaftar}} \times 100\% = 54,09\%$ Daftar aplikasi termuat di dokumen Master Plan E-Government Kabupaten Sanggau 2020-2024	DISKOM INFO
7.	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung	DISKOM INFO





INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
	system penghubung layanan pemerintah	<p>layanan pemerintah (6)</p> $\frac{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi (7)}}{\text{Layanan yang terintegrasi:}}$ <p>1. SIPD 2. LPSE 3. E-PHYO 4. PPID 5. SiRUP 6. MySAPK</p> <p>Jumlah Layanan :</p> <p>1. SIPD 2. LPSE 3. E-PHYO 4. PPID 5. SiRUP 6. SRIKANDI 7. MySAPK</p>	X100% = 85,7 %
8.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	<p>Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah (43)</p> $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah (43)}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah (43)}}$	X100% = 100 %
9.	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	<p>perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah (43)</p> $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah (43)}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah (43)}}$	X100% = 100 %
10.	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	<p>Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya (43)</p> $\frac{\text{Jumlah perangkat daerah (43)}}{\text{Jumlah perangkat daerah (43)}}$	X100% = 100 %
11.	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai (43)	



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
		Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah (43) X100% = 100 %	
12.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city (43)  Jumlah Perangkat Daerah (43) X100% = 34,88%	DISKOM INFO
13.	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo (2)  Jumlah ASN pengelola TIK (10) X100% = 37,5%	DISKOM INFO
14.	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	<p><b>a.</b> Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran</li> <li>• Penganggaran</li> <li>• Strategi</li> <li>• Peta Jalan</li> <li>• Arah Kebijakan</li> <li>• Cetak biru teknis/Peta rencana strategi</li> </ul> <p><b>b.</b> Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penugasan pejabat</li> <li>• Kewenangan</li> <li>• Tugas dan tanggung jawab</li> </ul>	DISKOM INFO
<b>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten</b>			



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten	<p>Komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemda Kabupaten yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah (23) <math>\times 100\% = 100\%</math></p> <p>Komunitas masyarakat atau mitra komunikasi pemerintah Daerah Kabupaten (23)</p> <p>(23 KIM)</p>	DISKOM INFO
2.	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	<p>Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) (977) <math>\times 100\% = 100\%</math></p> <p>Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi (977)</p>	DISKOM INFO
3.	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	<p>Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP (2045) <math>\times 100\% = 100\%</math></p> <p>Diseminasi dan layanan informasi public (2045)</p>	DISKOM INFO

## 11. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
<b>Meningkatnya Koperasi yang berkualitas</b>			
	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang	DPPKUM



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
	koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	dilaporkan (0) $X100\% = 0\%$  Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam (163)	
2.	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan (5)}}{\text{Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan (5)}} X100\% = 100\%$	DPPKUM
3.	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diperiksa dan awasi (61)}}{\text{Jumlah koperasi yang ada (436)}} X100\% = 7,79\%$	DPPKUM
4.	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya (27)}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada (163)}} X100\% = 16,56\%$	DPPKUM
5.	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (53)}}{\text{Jumlah Koperasi yang ada (436)}} X100\% = 13,16\%$	DPPKUM
6.	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti	Jumlah anggota Koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian (80)	DPPKUM



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
	pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah anggota Koperasi yang ada <b>(2.713)</b> X100% = <b>2,94%</b>	
7.	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan <b>(0)</b> Jumlah Koperasi yang ada <b>(436)</b> X100% = <b>0%</b>	DPPKUM
8.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	<b>0</b> Koperasi	
9.	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang telah diterbitkan sertifikat nomor induk koperasi <b>(75)</b> Jumlah Koperasi yang ada <b>(436)</b> X100% = <b>17,20%</b>	DPPKUM
10.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan <b>(0)</b> Jumlah Koperasi yang ada <b>(436)</b> X100% = <b>0%</b>	DPPKUM
11.	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha <b>(8)</b> Jumlah Koperasi yang ada <b>(436)</b> X100% = <b>1,83%</b>	DPPKUM
12.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan <b>(270)</b> X100% = <b>62,07%</b>	DPPKUM



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
	pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang ada <b>(436)</b>	
13.	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan (178)}}{\text{Jumlah Koperasi yang ada (436)}} \times 100\% = 40,83\%$	DPPKUM
<b>Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha</b>			
1.	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	$\frac{\text{Jumlah Pertumbuhan wirausaha baru (603)}}{\text{Jumlah wirausaha yang ada (4780)}} \times 100\% = 12,62\%$	DPPKUM
2.	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang iinput kedalam system data online (ODS) (2.806)}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada (5624)}} \times 100\% = 49,89\%$	DPPKUM
3.	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang bermitra (0)}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada (5.624)}} \times 100\% = 0\%$	DPPKUM
4.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi (0)}}{\text{Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standart dan sertifikasi produk (5.624)}} \times 100\% = 0\%$	DPPKUM
5.	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran <b>(0)</b>	DPPKUM



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
	fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran (5.624) X100% = 0 %	
6.	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan (40) X100% = 0,71% Jumlah usaha mikro yang ada (5.624)	DPPKUM
7.	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha (90) X100% = 1,60% Jumlah usaha mikro yang ada (5.624)	DPPKUM

## 12. URUSAN PENANAMAN MODAL

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
<b>Persentase Peningkatan investasi di kabupaten/kota</b>			
1.	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Surat Keterangan (Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, belum berjalan optimal dikarenakan belum tersusunnya Peraturan Bupati yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Selain itu, mengingat dengan ditetapkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka Perda Nomor 2 Tahun 2018 direncanakan akan dilakukan revisi terhadap beberapa pasal)	DPMPSTP



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
2.	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Surat Keterangan (Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, belum berjalan optimal dikarenakan belum tersusunnya Peraturan Bupati yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Selain itu, mengingat dengan ditetapkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka Perda Nomor 2 Tahun 2018 direncanakan akan dilakukan revisi terhadap beberapa pasal)	DPMPSTSP
3.	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Surat Keterangan (Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, belum berjalan optimal dikarenakan belum tersusunnya Peraturan Bupati yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Selain itu, mengingat dengan ditetapkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka Perda Nomor 2 Tahun 2018 direncanakan akan dilakukan revisi terhadap beberapa pasal)	DPMPSTSP
4.	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1 Kegiatan (Forum Konsultasi Publik Tahun 2021)	DPMPSTSP
5.	Kegiatan pameran penanaman modal	1 Kegiatan (APKASI)	DPMPSTSP
6.	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Surat Keterangan (Pada Tahun 2021 tidak ada kegiatan penerimaan misi penanaman modal dalam hal ini kegiatan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), dikarenakan kegiatan tersebut sudah terakomodir pada tahun 2020 dalam bentuk Peraturan Bupati Sanggau Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sanggau Tahun 2020 – 2025)	DPMPSTSP
7.	Konsultasi perizinan dan non perizinan	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal (13 Konsultasi melalui chatbot, 2 Pengaduan	DPMPSTSP





INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
	penanaman modal	terdiri dari 1 tatap muka 1 melalui surat)	
8.	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman Modal	2.002 Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman Modal yang terdiri dari OSS versi 1.1 (IUMK dan Non IUMK), OSS RBA, NON OSS (Si Cantik dan Manual).	DPMPTSP
9.	Laporan realisasi penanaman modal	Ada (515.640.000.000,00 Realisasi sampai Triwulan IV)	DPMPTSP
10.	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	ASN yang telah memiliki sertifikat/kompetensi Urusan Penanaman Modal berjumlah 2 orang.	DPMPTSP
11.	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Pembinaan dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali bertempat di <i>Meeting Room Hotel Emerald Sanggau</i>	DPMPTSP
12.	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima sebanyak 2 permintaan	DPMPTSP

### 13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(4)
<b>Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri</b>			
1.	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	<b>20</b> Orang	DISPORAPAR
2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	<b>20</b> Orang	
<b>Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan</b>			
1.	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader	<b>46</b> Orang	DISPORAPAR



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(4)
	pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		
2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	<b>26</b>	
<b>Peningkatan Prestasi Olahraga</b>			
1.	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	<b>11</b> Orang	DISPORAPAR
2.	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	<b>0</b> Kegiatan	DISPORAPAR

#### 14. URUSAN STATISTIK

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</b>			
1.	Tersedianya buku profil daerah	Ada	DISKOM INFO
2.	Jumlah survey statistic sektoral yang dilakukan	Survey statistic sektoral dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah	DISKOM INFO
3.	Jumlah kompilasi statistic sektoral yang dilakukan	<b>2</b> ( Kompilasi produk administrasi)	DISKOM INFO
4.	Jumlah survey statistic Sectoral yang mendapat rekomendasi BPS	<b>1</b> (survey yang mendapatkan rekomendasi dari BPS)	DISKOM INFO
5.	Jumlah kompilasi statistic Sectoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Tidak pernah mengajukan permohonan	DISKOM INFO



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
6.	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata kegiatan statistic sektoral (13)}}{\text{Jumlah kegiatan statistic sektoral (13)}} \times 100\% = 100\%$	DISKOM INFO
7.	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata indicator statistic sektoral (3)}}{\text{Jumlah indikator statistik sektoral (3)}} \times 100\% = 37,5\%$ (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)	DISKOM INFO

### 15. URUSAN PERSANDIAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
<b>Tingkat keamanan informasi pemerintah</b>			
1.	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan strategis teramankan (47)}}{\text{Jumlah kegiatan strategis yang ada (263)}} \times 100\% = 17,87\%$	DISKOM INFO
2.	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	$\frac{\text{Jumlah Sistem Elektronik yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian (2)}}{\text{Jumlah Sistem Elektronik yang ada (40)}} \times 100\% = 5\%$	DISKOM INFO
3.	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori	$\frac{\text{Jumlah SE atau asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah (0)}}{\text{Jumlah Sistem}} \times 100\%$ Sistem elektronik belum pernah diaudit dari BSSN ataupun pihak ketiga	DISKOM INFO



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
	rendah	Elektronik yang ada ( <b>40</b> )	
4.	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	<p>Jumlah titik teramankan (<b>43</b>)</p> <p>Jumlah titik pada PHKS (<b>43</b>)</p> $\frac{\text{Jumlah titik teramankan (43)}}{\text{Jumlah titik pada PHKS (43)}} \times 100\% = \mathbf{100\%}$	DISKOM INFO

### 16. URUSAN KEBUDAYAAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
<b>Terlestarikannya Cagar Budaya</b>			
1.	Jumlah obyek kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	<b>35</b>	DIKBUD
2.	Jumlah obyek kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	<b>35</b>	DIKBUD
3.	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	<b>35</b>	DIKBUD
4.	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	<b>123</b> Lembaga dan Sanggar Seni Budaya	DIKBUD
5.	Register Cagar Budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	<b>35 BCB</b>	DIKBUD
6.	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi,	<b>35 BCB</b>	DIKBUD



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
	pemeliharaan dan pemugaran)		
7.	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	(Tidak ada)	DIKBUD
8.	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	<b>6 Cagar Budaya</b>	DIKBUD
9.	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	<b>6 Cagar Budaya</b>	DIKBUD
10.	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	<b>2 Cagar Budaya</b>	DIKBUD
11.	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	(Tidak ada)	DIKBUD
12.	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	(Tidak ada)	DIKBUD
13.	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Ada	DIKBUD
14.	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	(Tidak ada)	DIKBUD
15.	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	(Tidak ada)	DIKBUD
16.	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	<b>35 Orang juru pelihara</b>	DIKBUD
17.	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	<b>35 Juru pelihara</b>	DIKBUD
18.	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	(Tidak ada)	DIKBUD
19.	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	(Tidak ada)	DIKBUD



## 17. URUSAN PERPUSTAKAAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
<b>Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat</b>			
1.	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	$\frac{\text{Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam Eksamplar) (35.066)}}{\text{Jumlah Penduduk di wilayahnya (489.605)}} \times 100\% = 7,16\%$	DKP
2.	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite (25.714)}}{\text{Jumlah Penduduk di wilayahnya (489.605)}} \times 100\% = 5,25\%$	DKP
3.	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	$\frac{\text{Ketersediaan tenaga perpustakaan diberbagai perpustakaan di wilayahnya (915)}}{\text{Jumlah Penduduk di wilayahnya (489.605)}} \times 100\% = 0,10\%$	DKP
4.	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (0)}}{\text{Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya (614)}} \times 100\% = 0\%$	DKP
5.	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	36 Kegiatan	DKP
<b>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat</b>			
1.	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	7 Buah	DKP



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
2.	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	1 Buah	DKP
3.	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	13 Item	DKP

### 18. URUSAN KEARSIPAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
<b>Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</b>			
1.	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip ( <b>94.027</b> ) Jumlah seluruh arsip aktif ( <b>94.027</b> ) X 100% = <b>100 %</b>	DKP
2.	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip ( <b>90.953</b> ) Jumlah seluruh arsip inaktif ( <b>90.953</b> ) X 100% = <b>100%</b>	DKP
3.	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik ( <b>248</b> ) Jumlah seluruh arsip statis ( <b>248</b> ) X 100% = <b>100%</b>	DKP
4.	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN ( <b>61</b> ) Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan X 100% = <b>1,85%</b>	DKP



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
		kabupaten (3.306)	
<b>Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat</b>			
1.	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	<b>965</b>	DKP
2.	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	(Tidak Ada)	
3.	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di Provinsi	<b>1.777</b>	DKP
4.	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	<b>61</b>	DKP
5.	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	(Tidak Ada)	DKP
6.	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	(Tidak Ada)	DKP





## C. URUSAN PILIHAN

### 1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)
<b>Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)</b>		
1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	<b>1.233 RTP</b>	DKPTPHP
2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Tidak terdapat tempat pelelangan ikan di Kabupaten Sanggau	DKPTPHP
3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ Kota yang diterbitkan	(Tidak Ada)	DKPTPHP
4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahun sebanyak <b>44</b> .	DKPTPHP
5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahun ( <b>552.694 Ekor</b> )	DKPTPHP

### 2. URUSAN PARIWISATA

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)
<b>Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan</b>		
1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	<b>40 ODTW</b>	DISPORA PAR
2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan	<b>36 Aset</b>	DISPORA PAR



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
	fasilitas pariwisata		
3.	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	<b>2021 = 16</b>	DISPORA PAR
4.	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	<b>38 Orang</b>	DISPORA PAR
5.	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	<b>2 Kegiatan</b>	DISPORA PAR
6.	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	(tidak ada)	DISPORA PAR
7.	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	(tidak ada)	DISPORA PAR
8.	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi (0) / Jumlah tenaga kerja pariwisata (0) X100% = 0%	DISPORA PAR
9.	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sector kepariwisataan (75) / Jumlah sasaran pembekalan sector kepariwisataan (75) X100% = 100%	DISPORA PAR
10.	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	<b>1 Lokasi</b>	DISPORA PAR

### 3. URUSAN PERTANIAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
<b>Produktivitas pertanian perhektar pertahun</b>			
1.	Jumlah Sarana dan	<b>41 Unit</b>	DKPTPHP



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
	prasana pertanian yang diberikan		
2.	Prasaran pertanian yang digunakan	<b>41 Unit</b>	DKPTPHP
3.	Penerbitan izin usaha pertanian	<b>30 izin usaha pertanian</b>	DKPTPHP
4.	Persentase prasarana yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah prasarana yang aktif digunakan (41)}}{\text{Jumlah prasarana yang dibangun (41)}} \times 100\% = 100\%$	DKPTPHP
5.	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	<b>100 %</b>	DKPTPHP
<b>Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular</b>			
1.	Persentase fasilitasi penanggulangan Bencana	<p>Jumlah Hewan Penular Rabies yg di Vaksin 23.343 dibagi Populasi Hewan Penular Rabies 48.091</p> $\frac{23.343}{48.091} \times 100\% = 48,53\%$ <p>Target Vaksinasi Tahun 2021 sebanyak 20.000 HPR Realisasi Vaksinasi 23.343 HPR</p> $\frac{23.343}{20.000} \times 100\% = 116,71\%$	DISBUNAK

#### 4. URUSAN KEHUTANAN

Sejak tahun anggaran 2015, urusan Kehutanan dilimpahkan kewenangannya dari Pemerintah Kabupaten Sanggau ke Provinsi Kalimantan Barat. Pelimpahan kewenangan tersebut digariskan dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.



## 5. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sejak tahun anggaran 2015, urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilimpahkan kewenangannya dari Pemerintah Kabupaten Sanggau ke Provinsi Kalimantan Barat. Pelimpahan kewenangan tersebut digariskan dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

## 6. URUSAN PERDAGANGAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)
<b>Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/ SIUP Toko Swalayan)</b>		
1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :		
a. Pusat Pembelanjaan	$\frac{\text{Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan } \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar}} \times 100\%$ = Tidak Ada Pada Tahun 2021	DPPKUM
b. Toko Swalayan	$\frac{\text{Jumlah izin took swalayan yang diterbitkan } \leq 5 \text{ hari kerja (17 Toko)}}{\text{Jumlah permohonan izin took swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar (17 Toko)}} \times 100\%$ = 100 %	DPPKUM
2. Persentase penerbitan TDG	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan TDG } \leq 5 \text{ hari kerja (6 TDG)}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan TDG (6 TDG)}} \times 100\%$ = 100 %	DPPKUM



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
3.	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan TDG (0)}}{\text{Jumlah gudang yang ada di Kabupaten (0)}} \times 100\% = 0\%$	DPPKUM
4.	Persentase Penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	Tidak ada pada tahun 2021	
	a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Tidak ada pada tahun 2021	DPPKUM
	b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	Tidak ada pada tahun 2021	
	c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Tidak ada pada tahun 2021	DPPKUM
5.	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	<p>Jumlah fasilitas pemeriksaan penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten.</p> <p>Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer.</p> <p>Tidak ada pada tahun 2021.</p>	DPPKUM
6.	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	<p><i>Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja (1 x 24 jam)</i></p> <p><i>Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar</i></p> <p>Tidak ada pada tahun 2021.</p>	DPPKUM
7.	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	<p><b>K = (a + b) x 100%</b></p> <p>K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</p> <p>a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai</p>	DPPKUM



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
		target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5) $\frac{0}{0} \times 100\% = 0,00\%$	
8.	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Tidak ada pada tahun 2021	
<b>Persentase kinerja pupuk</b>			
1.	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = \frac{a}{b \times c} \times 100\% = 0,01\%$ $X = \frac{(16.187,22)}{(33.850,80 \times 37.612)}$ <p>X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan</p> <p>a = Jumlah pupuk yang disalurkan</p> <p>b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK)</p> <p>c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)</p>	DPPKUM
<b>Persentase alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku</b>			
1.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	<p>Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan (334)</p> $\frac{\text{Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan (334)}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten (2385)}} \times 100\% = 14,00\%$	DPPKUM
2.	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	<p>Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku (12)</p> $\frac{\text{Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan (12)}}{\text{Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan (18)}} \times 100\% = 66,67\%$	DPPKUM



## 7. URUSAN PERINDUSTRIAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)
<b>Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota</b>		
1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Tidak Terdapat IKM yang mengajukan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI)	DPPKUM
<b>Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK</b>		
1. Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK: <b>100%</b>  Tahapan : a. Tersusunnya naskah akademik (30%) b. Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c. Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d. Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e. Penetapan Perda RPIK (10%)  Keterangan: penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK	DPPKUM
<b>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait</b>		



INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan (294)}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk (323)}} \times 100\% = 91\%$	DPPKUM
<b>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang di keluarkan oleh instansiterkait</b>			
1.	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Tidak Terdapat IKM yang mengajukan perizinan perluasan usaha industri	DPPKUM
<b>Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini</b>			
1.	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/ Kota	$\frac{\text{Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten di SIINas (20)}}{\text{Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten (848)}} \times 100\% = 2,36\%$	DPPKUM





## 8. URUSAN TRANSMIGRASI

INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	<b>2 KP</b>	NAKERTRANS
2.	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	<b>1 SP</b>	NAKERTRANS
3.	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	<b>1SP</b>	NAKERTRANS



### 3.2.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (outcome)

#### A. URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

##### 1. URUSAN PENDIDIKAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)
1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD (1.797)}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan (16.066)}} \times 100\% = \mathbf{11,18\%}$	DIKBUD
2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Dasar (48.859)}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan (52.614)}} \times 100\% = \mathbf{92,86\%}$	DIKBUD
3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama (14.993)}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan (24.965)}} \times 100\% = \mathbf{60,05\%}$	DIKBUD
4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{\text{Jumlah anak 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan (246)}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan (103.680)}} \times 100\% = \mathbf{0,23\%}$	DIKBUD



## 2. KESEHATAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan ( <b>214</b> )	RSU M.T.H. DJAMAN/ DUKCAPIL
		$\frac{\text{Jumlah penduduk di kabupaten (489.605)}}{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan (214)}} \times 100\% = 0.044\%$	
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah rumah sakit rujukan terakreditasi (1)	DINKES/ RSU M.T.H. DJAMAN
		$\frac{\text{Jumlah rumah sakit rujukan terakreditasi (1)}}{\text{Jumlah rumah sakit di kabupaten (4)}} \times 100\% = 25,00\%$	
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ( <b>7.684</b> )	DINKES
		$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan (7.684)}}{\text{Jumlah ibu hamil di kabupaten (9.037)}} \times 100\% = 85.028\%$	
4.	Persentase tingkat ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan persalinan ( <b>7.055</b> )	DINKES
		$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (7.055)}}{\text{Jumlah ibu bersalin di kabupaten (8.624)}} \times 100\% = 81.807\%$	
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ( <b>6.771</b> )	DINKES
		$\frac{\text{Jumlah bayi lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (6.771)}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di kabupaten (7.913)}} \times 100\% = 85.568\%$	
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ( <b>24.589</b> )	DINKES
		$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (24.589)}}{\text{Jumlah balita di kabupaten (35.679)}} \times 100\% = 68.917\%$	
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	Jumlah anak usia pendidikan yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar ( <b>1.298</b> )	DINKES
		$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar (1.298)}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten (7.771)}} \times 100\% = 16.757\%$	



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
	standar	kabupaten ( <b>7.746</b> )	
8.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	<p>Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar (<b>13.616</b>)</p> <p>Jumlah orang usia 15-59 di kabupaten (<b>302.645</b>)</p> $\frac{13.616}{302.645} \times 100\% = 4.499\%$	DINKES
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	<p>Jumlah warga Negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (<b>631</b>)</p> <p>Jumlah orang usia 60 tahun ke atas di kabupaten (<b>1.374</b>)</p> $\frac{631}{1.374} \times 100\% = 45.924\%$	DINKES
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<p>Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (<b>5</b>)</p> <p>Jumlah penderita hipertensi di kabupaten (<b>12.902</b>)</p> $\frac{5}{12.902} \times 100\% = 0.039\%$	DINKES
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<p>Jumlah penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (<b>1.067</b>)</p> <p>Jumlah penderita DM di kabupaten (<b>4.330</b>)</p> $\frac{1.067}{4.330} \times 100\% = 24.64\%$	DINKES
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	<p>Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (<b>477</b>)</p> <p>Jumlah penderita ODGJ di kabupaten (<b>979</b>)</p> $\frac{477}{979} \times 100\% = 48.723\%$	DINKES
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	<p>Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (<b>3.266</b>)</p> <p>Jumlah Penderita TBC di kabupaten (<b>5.467</b>)</p> $\frac{3.266}{5.467} \times 100\% = 59.74\%$	DINKES



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
14.	persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV (pelayanan kesehatan HIV) sesuai standar	<p>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar <b>(3.968)</b></p> <p>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten <b>(11000)</b></p> <p><math>\frac{3.968}{11000} \times 100\% = 36.073\%</math></p>	DINKES

### 3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	<p>Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (<b>448.22</b>)</p> <p>Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (<b>448.22</b>)</p> <p><math>\frac{448.22}{448.22} \times 100\% = 100\%</math></p>	DPCKTRP
2.	Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan	<p>luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (<b>m</b>) (<b>0</b>)</p> <p>Luas kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan kabupaten (<b>m</b>) (<b>0</b>)</p> <p><math>\frac{0}{0} \times 100\% = \text{SUKET}</math></p>	DPCKTRP
3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan	Luas daerah irigasi kewenangan	DBM-SDA



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
	kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) <b>(7.727,11)</b> Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten <b>(9.599)</b> $\frac{7.727,11}{9.599} \times 100\% = 80.49\%$	
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten <b>(61536)</b> $\frac{61536}{144195} \times 100\% = 42.67\%$ Jumlah total proyeksi rumah tangga diseluruh kabupaten <b>(144195)</b>	DPCKTRP
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	(Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan cubluk)+(jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah PLT)+(jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbanya diolah di IPALD) <b>(81.839)</b> $\frac{81.839}{144.195} \times 100\% = 56.75\%$ Jumlah rumah di kabupaten <b>(144.195)</b>	DPCKTRP



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
6.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya (77)}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku (77)}} \times 100\% = \mathbf{100\%}$	DPMPTSP
7.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap (371.97 Km)}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten (1001.44 Km)}} \times 100\% = \mathbf{40,75\%}$	DBM-SDA
8.	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja kontruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis (63)}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten (411)}} \times 100\% = \mathbf{18,80\%}$	DBM-SDA
9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (411)}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya (411)}} \times 100\% = \mathbf{100\%}$	DBM-SDA



#### 4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(4)		(5)	(6)
<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>			
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n (0)}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n (0)}} \times 100\% = \text{SUKET}$	DPCKTRP /BPBD
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	$\frac{(\text{Rumah tangga penerima fasilitas pengganti hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan}) + (\text{rumah tangga penerima subsidi uang sewa}) + (\text{rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni}) (0)}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan (0)}} \times 100\% = \text{SUKET}$	DPCKTRP
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha yang ditangani (39,63 ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha (259,23 ha)}} \times 100\% = 15.28 \%$	
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni (46.808)}}{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten (142.501)}} \times 100\% = 32.84 \%$	DPCKTRP





INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(4)		(5)	(6)
5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitas PSU (1.607)}}{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten (142.501)}} \times 100\% = 1,12\%$	DPCKTRP

### 5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani (19)}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk (22)}} \times 100\% = 86.36\%$	SAT POL-PP
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakan (3)}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan perkada yang memuat sanksi (16)}} \times 100\% = 18.75\%$	SAT POL-PP
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = <b>46.189</b> Warga	BPBD
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = <b>36</b> Warga	BPBD
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (1420)}}{\text{Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan (SUKET)}} \times 100\% = 1420\%$	BPBD
6.	Persentase pelayanan	Jumlah layanan pemadam, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak	SAT POL-PP



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
	penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah + jumlah layanan di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah <b>(15)</b> Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten <b>(15)</b> X 100% = <b>100%</b>	
7.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran = <b>11.53 Menit</b>	SAT POL-PP

## 6. SOSIAL

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti <b>(500)</b> Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis <b>(2812)</b> X 100% = <b>17,78%</b>	DINSOS P3AKB
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat	Jumlah korban bencana alam dan social di daerah kabupaten kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran <b>(35.467)</b> Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah X 100% = <b>100%</b>	DINSOS P3AKB



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)
dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten <b>(35.467)</b>	

**B. URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**  
**1. URUSAN TENAGA KERJA**

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)
1. Mengukur persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD <b>(5)</b> $\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/ Kota (5)}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan}} \times 100\% = \mathbf{100\%}$	DINAS NAKER TRANS
2. Mengukur Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi <b>(16)</b> $\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi (16)}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan (361.686)}} \times 100\% = \mathbf{0,004\%}$	DINAS NAKER TRANS
3. Mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) <b>(13.790,45)</b> $\frac{\text{PDRB tahun berjalan (13.790,45)}}{\text{Jumlah tenaga kerja (361.686)}} \times 100\% = \mathbf{3,813\%}$	DINAS NAKER TRANS
4. Mengukur persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak <b>(117)</b> $\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (117)}}{\text{Jumlah perusahaan (378)}} \times 100\% = \mathbf{30,95\%}$	DINAS NAKER TRANS



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)
5. Mengukur persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ( <b>239</b> )  Jumlah pencaker yang terdaftar ( <b>1610</b> ) X 100% = <b>14,85%</b>	DINAS NAKER TRANS

## 2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)
1. Mengukur persentase anggaran responsif gender pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD ( <b>1.168.458.212</b> )  Jumlah seluruh belanja langsung di APBD ( <b>1.414.745.358</b> ) X 100% = <b>82,59%</b>	DINSOS P3AKB
2. Mengukur persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun korban kekerasan) yang ditangani instansi tingkat Kabupaten/ Kota yang didampingi ( <b>34</b> )  Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) ( <b>157.191</b> ) X 100% = <b>0,022%</b>	DINSOS P3AKB
3. Mengukur rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ( <b>10</b> )  Jumlah penduduk perempuan ( <b>233.374</b> ) X 100% = <b>4,28 %</b>	DINSOS P3AKB



### 3. URUSAN PANGAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.	Mengukur persentase ketersediaan pangan Kabupaten/ Kota	$\frac{\text{Jumlah Cadangan pangan (63.213,73 Ton)}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan (54.608,26 Ton)}} \times 100\% = 115.759\%$ <p>(Persentase Ketersediaan berdasarkan Surplus+CPPD)</p>	DKPTPHP

### 4. URUSAN PERTANAHAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.	Mengukur persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi (300.68)}}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi (300.68)}} \times 100\% = 100\%$	Kantor Petanahan Kab. Sanggau
2.	Mengukur persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	$\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (3)}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (3)}} \times 100\% = 100\%$	Kantor Petanahan Kab. Sanggau
3.	Mengukur persentase lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya diatas izin lokasi (300.68)}}{\text{Luas izin lokasi yang diterbitkan (300.68)}} \times 100\% = 100\%$	Kantor Petanahan Kab. Sanggau



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
4.	Mengukur persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	$\frac{\text{Jumlah penerima Tanah Obyek Landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 5 ha (7.403)}}{\text{Jumlah penerima tanah Landreform (13.384)}} \times 100\% = 55.31\%$	
5.	Mengukur persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah Kegiatan belum dilaksanakan di Kabupaten Sanggau Luas izin membuka tanah yang diterbitkan	Kantor Petanahan Kab. Sanggau
6.	Mengukur persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani (5)}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan (5)}} \times 100\% = 100\%$	Kantor Petanahan Kab. Sanggau

#### 4. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	IKLH Kab/Kota = <b>63,98 (Sedang)</b> IKA = Indeks Kualitas Air ( <b>50,00</b> ) IKD = Indeks Kualitas Udara ( <b>93,99</b> ) ITH = Indeks Tutupan Hutan ( <b>32,48</b> )	DLH
2.	Mengukur capaian pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/ Kota	$\frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani (408.94 ton/th)}}{\text{Total volume timbunan sampah Kabupaten/Kota (1318.75 ton/th)}} \times 100\% = 31,01\%$	DLH



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
3.	Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah Kab/Kota <b>(16)</b> $\frac{\text{Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan (116)}}{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah Kab/Kota (16)}} \times 100\% = \mathbf{13,79\%}$	DLH

### 5. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.	Mengukur tingkat perekaman KTP elektronik di Kabupaten/ Kota	Jumlah penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP <b>(336.010)</b> $\frac{\text{Jumlah penduduk 17 tahun keatas (354.133)}}{\text{Jumlah penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP (336.010)}} \times 100\% = \mathbf{94,88\%}$	DUKCAPIL
2.	Mengukur persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA <b>(44.713)</b> $\frac{\text{Jumlah anak usia 0 - 17 tahun (135.276)}}{\text{Jumlah anak usia 0 - 17 tahun yang memiliki KIA (44.713)}} \times 100\% = \mathbf{33.05\%}$	DUKCAPIL
3.	Mengukur tingkat kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0 - 18 tahun yang sudah memiliki akta lahir <b>(127.549)</b> $\frac{\text{Jumlah anak usia 0 - 18 tahun (146.873)}}{\text{Jumlah anak usia 0 - 18 tahun yang sudah memiliki akta lahir (127.549)}} \times 100\% = \mathbf{86.84\%}$	DUKCAPIL



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
4.	Mengukur persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama)	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama <b>(11)</b> <hr/> Jumlah OPD <b>(43)</b> X 100% = <b>25,58%</b>	DUKCAPIL

## 6. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.	Mengukur persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun <b>(22)</b> <hr/> Jumlah desa tertinggal (per awal tahun n) <b>(49)</b> X 100% = <b>44.89%</b>	DPM-PEMDES
2.	Mengukur perkembangan desa yang mengalami peningkatan status menjadi desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun <b>(14)</b> <hr/> Jumlah desa berkembang (per awal tahun n) <b>(81)</b> X 100% = <b>17.284%</b>	DPM-PEMDES





## 7. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)
1. Mengukur angka kelahiran total (Total Fertility Rate)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ <p>Jumlah kelahiran total = 8.624 Jumlah kumulatif wanita pada kelompok (15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49) = 2.231</p> $= \frac{2.231}{1000} \times 100\% = 2,23\%$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (446) bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu (446) pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama (136.342) i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24, i=7 untuk kelompok Umur 45-49) k = Bilangan Konstanta biasanya 1000</p>	DINSOSP 3AKB
2. Mengukur tingkat pemakaian kontrasepsi modern	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif modern (63.901)}}{\text{Jumlah pasangan usia subur (97.280)}} \times 100\% = 65,68\%$	DINSOS P3AKB
3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani (9.633)}}{\text{Jumlah pasangan Usia Subur (97.280)}} \times 100\% = 9,902\%$	DINSOS P3AKB



## 8. URUSAN PERHUBUNGAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)
1. Mengukur rasio konektivitas Kabupaten/Kota	<p><b>IK1 :</b> Jumlah Trayek yang melayani Angkutan Umum = 24 Trayek. Jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten Sanggau adalah 32 trayek, terdapat 5 trayek Angkutan perintis yang diusulkan Dishub Sanggau ke BPTD Wil.XIV Provinsi Kalimantan Barat pada tahu 2021, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Noyan – Sanggau</li><li>• Bonti – Sanggau</li><li>• Mukok – Sanggau</li><li>• Malenggang – Entikong</li><li>• Sungai Dangin- Entikong</li></ul> <p>Jadi, Jumlah Kebutuhan trayek pada tahun 2021 adalah 32 trayek.</p> <p><b>IK2 :</b> Jumlah trayek yang melayani Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan = 6 Bobot trayek atau lintas yang digunakan Angkutan darat yaitu = 0,8 dengan frekuensi sedang (3-4x dalam seminggu) Bobot trayek atau lintas yang digunakan Angkutan sungai yaitu = 1 dengan frekuensi tinggi ( &gt;5x dalam seminggu)</p> <p>Jadi, Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot Angkutansungai,danau dan penyeberangan) = <math>((24 \times 0,8 / 32) \times 70) + ((\frac{6 \times 1}{6}) \times 30)</math> = <math>(0,6 \times 70) + (1 \times 30)</math> = 42 + 30 = <b>72</b></p>	DISHUB
2. Mengukur kinerja lalu lintas Kabupaten/ Kota	V/C Kinerja Jalan Di Kabupaten Sanggau adalah <b>1:234</b>	DISHUB



## 9. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.	Mengukur persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo <b>(43)</b> $X 100\% = 100\%$ Jumlah OPD <b>(43)</b>	DISKOMINFO
2.	Mengukur persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi <b>(8)</b> $X 100\% = 100\%$ Jumlah Layanan Publik <b>(8)</b>	DISKOMINFO
3.	Mengukur persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Kab/Kota <b>(375.496 jiwa)</b> $X 100\% = 76.69\%$ Jumlah penduduk <b>(489.605 jiwa)</b>	DISKOMINFO

## 10. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.	Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset <b>(61)</b> $X 100\% = 13.991\%$ Jumlah seluruh koperasi <b>(436)</b>	DPPKUM



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
2.	Mengukur persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha (4.780)}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan (5.624)}} \times 100\% = 84.993\%$	DPPKUM

### 11. URUSAN PENANAMAN MODAL

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.	Mengukur persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	$\frac{\text{Jumlah investasi tahun n (515.640.000.000,00)} - \text{jumlah investasi tahun n-1 (1.221.648.820.000,00)}}{\text{jumlah investasi tahun n-1 di Kab/Kota (1.221.648.820.000,00)}} \times 100\% = -57.791\%$	DPMPSTP

### 12. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16 - 30 Tahun) yang berwirausaha di Kabupaten (40)}}{\text{Jumlah pemuda (16 - 30 Tahun) di Kab/Kota (129.286)}} \times 100\% = 0.031\%$	DISPORA PAR
2.	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16 - 30 Tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan di Kab/Kota (1.330)}}{\text{Jumlah pemuda (16 - 30 Tahun) di Kab/Kota (129.286)}} \times 100\% = 1.029\%$	DISPORA PAR



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA
(1)		(2)		(3)
		Jumlah pemuda (16 – 30 Tahun) di Kab/Kota <b>(129.286)</b>		
3.	Mengukur peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	<b>1 Mendali Emas, Cabor Tarung Derajat PON XX 2021 Prov.Papua</b>	DISPORA PAR

### 13. URUSAN STATISTIK

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA
(1)		(2)		(3)
1.	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah <b>(43)</b>	$\frac{\text{Jumlah OPD (43)}}{\text{Jumlah OPD (43)}} \times 100\% = 100\%$	DISKOM INFO
2.	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah <b>(43)</b>	$\frac{\text{Jumlah OPD (43)}}{\text{Jumlah OPD (43)}} \times 100\% = 100\%$	DISKOM INFO

### 14. URUSAN PERSANDIAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA
(1)		(2)		(3)
1.	Mengukur tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah nilai per area keamanan informasi <b>(271)</b>	$\frac{\text{Jumlah area penilaian (645)}}{\text{Jumlah area penilaian (645)}} \times 100\% = 2,17\%$	DISKOM INFO
		<b>645</b> merupakan rumus baku dari ISO		



## 16. URUSAN KEBUDAYAAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.	Mengukur tingkat pelestarian cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (35) $\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata (35)}}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata (35)}} \times 100\% = 100\%$	DIKBUD

## 17. URUSAN PERPUSTAKAAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.	Mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) <b>33.2</b> SEDANG	DKP
2.	Mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan (82,84) UPLM 2 = Ketercukupan koleksi (124,9) UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan (0,18) UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan (5,25) UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP (0) UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan (6,21) UPLM 7 = Anggota perpustakaan (0,22)  Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\sum \frac{291,6}{7} \times 100 = 31,37\%$	DKP



## 18. URUSAN KEARSIPAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)
1. Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (a + i + s + j)/4$ $75,46\% = (100+100+100+1,85)/4$ <p>T = Tingkat ketersediaan arsip            a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip            i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip            s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik            j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p>	DKP
2. Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ $50\% = T = (100+ 0 + 100 + 100 + 0 + 0)/6$ <p>T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban            m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK            b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK (Suket)            g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK            a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK            c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK            i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p>	DKP



## C. URUSAN PILIHAN

### 1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota = <b>10.895.49 Kg</b> (one data KKP)	DKPTPHP

### 2. URUSAN PARIWISATA

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan tahun 2021 (38)- Jumlah wisatawan tahun 2020 (2788)= <b>(-2750)</b> X100% = <b>-98.637%</b>	DISPORA PAR
		Jumlah wisatawan tahun 2020 ( <b>2.788</b> )	
2.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/ Kota	Jumlah wisatawan tahun 2021 - Jumlah wisatawan tahun 2020 = <b>(-21903)</b> X100% = <b>-27.452%</b>	DISPORA PAR
		Jumlah wisatawan tahun 2020 ( <b>79.786</b> )	
3.	Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar yang terjual ( <b>46.402</b> ) X100% = <b>15.28%</b>	DISPORA PAR
		Jumlah kamar yang tersedia ( <b>303.680</b> )	
4.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	<b>315.770</b> (Penyediaan Akomodasi dan makan Minum) (PDRB Atas Dasar harga Berlaku)	DISPORA PAR
5.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (Pajak Hotel + Pajak Restoran) <b>(3.286.991.751)</b> X 100% = <b>2.53%</b>	DISPORA PAR
		Jumlah Total PAD ( <b>129.773.632.223,92</b> )	





### 3. URUSAN PERTANIAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan perhektar pertahun <b>(1.623.456,4)</b> Luas Panen <b>(44.703,55)</b> $X 100\% = 3.631,60\%$	DKPTPHP
2.	Persentas Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) - Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya= <b>(-483)</b> $X 100\% = -55.011\%$ Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya <b>(878)</b>	DISBUNNAK

### 4. URUSAN KEHUTANAN

Sejak tahun anggaran 2015, urusan Kehutanan dilimpahkan kewenangannya dari Pemerintah Kabupaten Sanggau ke Provinsi Kalimantan Barat. Pelimpahan kewenangan tersebut digariskan dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

### 5. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sejak tahun anggaran 2015, urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilimpahkan kewenangannya dari Pemerintah Kabupaten Sanggau ke Provinsi Kalimantan Barat. Pelimpahan kewenangan tersebut digariskan dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.



## 6. URUSAN PERDAGANGAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan (17) $\frac{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten (17)}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten (17)}} \times 100\% = 100\%$	DPPKUM
2.	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi (16187,22) RDKK (37.612,00) $\frac{16187,22}{37.612,00} \times 100\% = 43.0375\%$	DPPKUM
3.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan (217) $\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan (217)}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten (2.067)}} \times 100\% = 10.49\%$	DPPKUM

## 7. URUSAN PERINDUSTRIAN

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/ Kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 (115) $\frac{115}{733} \times 100\% = 15.69\%$	DPPKUM
2.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)%	DPPKUM



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)
industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)%  Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut adalah <b>2,62%</b>  Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kab. Sanggau Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2016 - 2036. Dimana Sasaran Pembangunan Industri Daerah Diharapkan Tumbuh Diatas 6%	
3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ( <b>91</b> ) $\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan (91)}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan (104)}} \times 100\% = \mathbf{87,5\%}$	DPPKUM
4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Tidak ada IKM yang mengajukan perizinan perluasan usaha industri di Kabupaten Sanggau Tahun 2021.	DPPKUM
5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota	Tidak ada IKM yang mengajukan perizinan perluasan usaha kawasan industri di Kabupaten Sanggau Tahun 2021.	DPPKUM



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
6.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	<b>95%</b> (Tersedia dalam Direktori Data Industri Kecil Menengah dan Sistem Informasi Industri Daerah Kab. Sanggau)  1) Keterkinian informasi industri: - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%)  2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)  Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	DPPKUM

## 8. URUSAN TRANSMIGRASI

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	<b>2 kawasan (kecamatan) dan 3 Desa</b>	NAKER TRANS



### 3.2.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

#### 1. FUNGSI PENUNJANG URPEM (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan <b>(228.840.063.019,00)</b> Jumlah APBD <b>(1.742.039.724.804,00)</b> $X100\% = 13,13\%$	BPKAD
2.	Rasio PAD	Jumlah PAD <b>(118.769.958.375,00)</b> Jumlah PDRB Non Migas (Dalam Juta Rupiah) <b>(21678774)</b> $X100\% = 0.548\%$	BPKAD
3.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP <b>Level 3 (Terdefinisi)</b>	INSPEKTORAT
4.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP <b>Level 3 (Integrated)</b>	INSPEKTORAT
5.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah benaja urusan pemerintahan – transfer expenditures <b>(1.486.414.239.094,00)</b> Jumlah belanja APBD <b>(1.729.539.724.804,00)</b> $X100\% = 85,94\%$	BPKAD
6.	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. <b>WTP (WAJAR TANPA PENGECCUALIAN)</b>	BPKAD



## 2. FUNGSI PENUNJANG URPEM (PENGADAAN)

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	(Tidak ada Proyek Konstruksi dengan nilai besar yang dibawa ke tahun berikutnya.)	BPKAD
2.	Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan Metode Kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (190 Paket) $\times 100\% = 1,9\%$ Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif (9883 Paket)	BPKAD/ BPBJ
3.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan (244.598.636.398,00) $\times 100\% = 22,36\%$ Total belanja langsung (1093752650559,09)	BPKAD

## 3. FUNGSI PENUNJANG URPEM (KEPEGAWAIAN)

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke (3205) $\times 100\% = 251,57\%$ Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah (1274)	BKPSDM



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
2.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah Pegawai PNS Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) (105)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (158)}} \times 100\% = 6,63\%$	BKPSDM
3.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat Kompetensi (188)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai non fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (105)}} \times 100\% = 179,05\%$	BKPSDM

#### 4. FUNGSI PENUNJANG URPEM (MANAJEMEN KEUANGAN)

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\frac{\text{Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi (1.543.305.737.949,81)}}{\text{Total belanja APBD (1.729.539.724.804,00)}} \times 100\% = 10,76\%$	BPKAD
2.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam Realisasi (129.773.632.223,92)}}{\text{Total PAD dalam APBD (118.748.456.375)}} - 1 \times 100\% = 1,092 (9,28\%)$	BAPENDA
3.	Assets Management	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya)</li><li>2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya)</li><li>3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya)</li><li>4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya)</li></ol>	BPKAD



INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
4.	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA <b>(306.212.714.170,61)</b>  Total belanja anggaran tahun sebelumnya <b>(1.741.553.864.591,68)</b>  $X 100\% = 17.58\%$	BPKAD

### 5. FUNGSI PENUNJANG URPEM (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)

INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
(1)		(2)	(3)
1.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda <b>(4.930.227.600)</b>  Realisasi Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda <b>(4.334.916.778,94)</b>  $X100\% = 113.73\%$	
2.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah document yang dipublikasi di website pemda <b>(1)</b>  Total jumlah dokumen yang telah dirinci <b>(1)</b>  $X 100\% = 100\%$	





### 3.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Manajemen berbasis kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan pada dasarnya bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, akan tetapi lebih dari itu. Esensi dari manajemen berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya (anggaran) adalah alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran (*output*), hasil (*outcome*) maupun dampak (*impact*).

Pendekatan manajemen berbasis kinerja adalah sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Dalam rangka pengendalian dan pertanggungjawaban atas program/kegiatan pemerintah daerah guna mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pengukuran guna mengetahui sampai sejauhmana capaian dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis. Dari hasil pengukuran tersebut dilakukan penilaian dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penilaian capaian kinerja dari hasil pengukuran terhadap target kinerja diberikan interpretasi dengan kriteria sebagaimana dalam tabel 1, dibawah ini :



Tabel 1  
Kriteria Penilaian Kinerja

NO	INTERVAL CAPAIAN KINERJA	INTERPRETASI	KETERANGAN
1	≥ 91	Sangat Tinggi	ST
2	≥ 76 – 90,99	Tinggi	T
3	≥ 66 – 75,99	Sedang	S
4	≥ 51 - 65,99	Rendah	R
5	≤ 50,99	Sangat Rendah	SR

### I. Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

Capaian indikator kinerja merupakan tingkatan atau ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja berdasarkan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi (realisasi) dengan kinerja yang diharapkan (target). Target indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sanggau secara lengkap dapat dilihat dalam Tabel 2, dibawah ini :

Tabel 2  
Perjanjian Kinerja  
Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana jalan, perhubungan dan telekomunikasi	1	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap (Baik dan sedang)	41.75
		2	Persentase jalan poros desa dan perkotaan dalam kondisi baik (>40 km/jam)	60.19
		3	Persentase kemantapan jalan di wilayah perbatasan antar negara	49.18
		4	Persentase prasarana perhubungan darat	65.00
		5	Persentase layanan telekomunikasi	66.82
2	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana permukiman		Rasio rumah layak huni	0.1348
3	Meningkatnya sarana dan prasarana publik dan permukiman di wilayah		Indeks infrastruktur wilayah perbatasan antar negara.	49.18



NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
	perbatasan antarnegara			
4	Meningkatnya kualitas air dan udara	1	Indeks kualitas air	50.02
		2	Indeks kualitas udara	93.67
5	Meningkatnya tutupan lahan		Indeks Kualitas lahan	43.47
6	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang		Ketaatan terhadap RTRW	100
7	Meningkatnya kualitas pendidikan	1	Harapan lama sekolah	11.67
		2	Rata-rata lama sekolah	7.15
8	Meningkatnya kualitas kesehatan	1	Angka harapan hidup	72.03
		2	Laju pertumbuhan penduduk	1.34
9	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1	Persentase PMKS yang tertangani	96.97
		2	Pengeluaran Per Kapita	8.381
10	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	81.11
11	Meningkatnya pertumbuhan PDRB	1	Kontribusi sektor pertanian. Kehutanan. dan Perikanan terhadap PDRB	6,911,466
		2	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	19.27
		3	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12.15
		4	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	292.973
12	Meningkatnya investasi daerah		Pertumbuhan Investasi PMDN	8.85
13	Menurunnya angka pengangguran		Tingkat partisipasi angkatan kerja	68.31
			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,30
14	Meningkatnya kinerja sektor pertanian daerah		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100
15	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat		Indeks Ketahanan Pangan	80.63
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1	Nilai SAKIP	50
		2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3.12
		3	Tingkat maturitas SPIP	3.00
17	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1	Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah	7.06
		2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	1.167



NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
18	Meningkatnya profesionalitas ASN		Rasio ASN	0.010
19	Meningkatnya kualitas layanan publik	1	Indeks penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).	2.05
		2	Indeks kepuasan masyarakat	85
20	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama	1	Cakupan konflik SARA yang ditangani	100
		2	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0.00205
21	Meningkatnya ketentraman masyarakat (IKM)		Indeks ketentraman masyarakat (IKM)	91,45
22	Meningkatnya ketertiban umum (IKU)		Indeks ketertiban umum (IKU)	85,00
23	Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan dan ketanggapan darurat bencana		Persentase penanganan bencana daerah	100
24	Meningkatnya kemandirian desa	1	Indeks Ketahanan Sosial	0.7843
		2	Indeks Ketahanan Ekonomi	0.5317
		3	Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan	0.6723
25	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa		Persentase tata kelola pemerintahan desa yang baik	75.5

## II. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

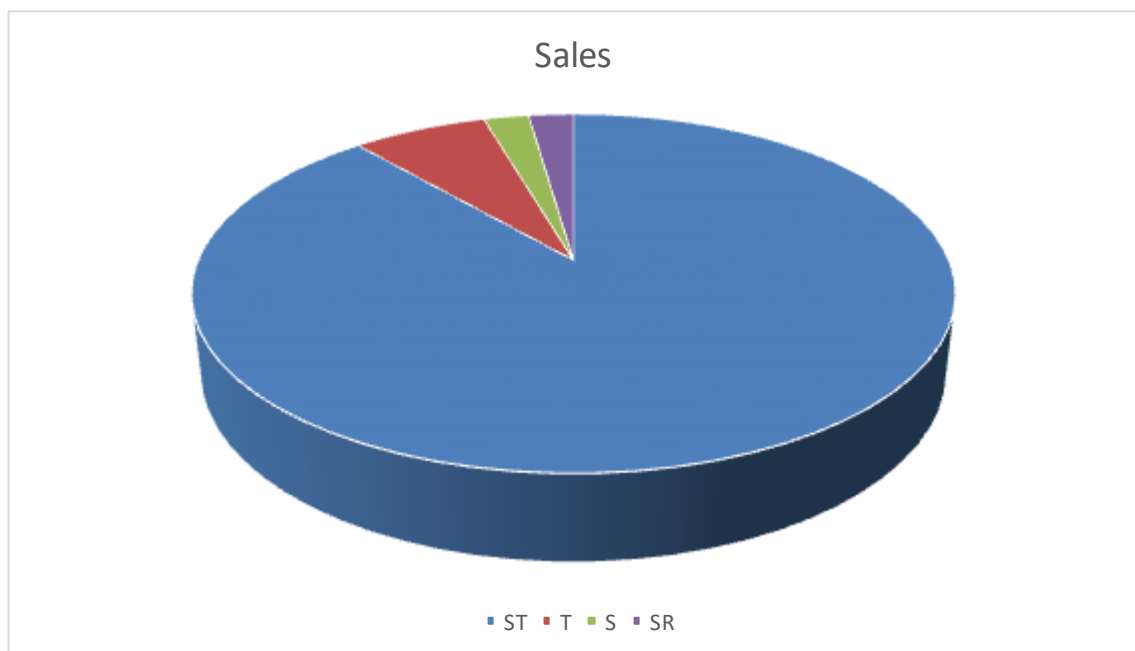
Evaluasi dan analisis capaian kinerja merupakan uraian yang menjelaskan secara umum terhadap pencapaian sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis capaian kinerja juga dilakukan terhadap efisiensi penggunaan sumberdaya, dimana penggunaan sumberdaya juga harus berdasarkan prinsip akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah kemampuan instansi pemerintah dalam menetapkan besaran anggaran terhadap program/kegiatan berdasarkan prinsip *money follow program* dan *program follow result* sehingga mampu mewujudkan penggunaan anggaran yang efisien, efektif, dan ekonomis. Penggunaan sumberdaya (keuangan) dapat dikatakan efisien, efektif, dan ekonomis (akuntabel) apabila penganggaran sumber daya dapat direncanakan dan dimanfaatkan pada program/kegiatan yang benar-

benar bermanfaat bagi masyarakat dan pencapaian kinerja instansi pemerintah. Efisiensi dinilai apabila pemanfaatan sumber daya dalam pencapaian target serapan anggaran dengan kategori tinggi.

Secara umum pengukuran capaian kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan target kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2021. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 44 indikator kinerja sesuai sasaran strategis sebagaimana tabel 2 di atas, diperoleh bahwa 88,64% atau 39 indikator dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”, 6,82% atau 3 indikator dengan kriteria “Tinggi”, 2,27% atau 1 indikator dengan kriteria “Sedang” dan 2,27% atau 1 indikator dengan kriteria “Sangat Rendah”. Secara rinci capai indikator kinerja dapat dilihat dalam Grafik 1 dibawah ini :

Grafik 1  
Persentase capaian indikator kinerja sasaran tahun 2021



Evaluasi dan analisis capaian kinerja dari indikator kinerja masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:



## 1. Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana jalan, perhubungan dan telekomunikasi

### 1.1. Realisasi Kinerja Tahun 2021

Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana jalan, perhubungan dan telekomunikasi merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi gabungan diantaranya misi 1 yaitu “Membangun dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” dan misi 8 yaitu “Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat”. Sarana dan prasana jalan, perhubungan dan telekomunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah disamping faktor modal dan teknologi. Sarana dan prasana jalan, perhubungan dan telekomunikasi yang mantap adalah sumber kekuatan bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 5 indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatnya pelayanan sarana dan prasana jalan, perhubungan dan telekomunikasi”, diperoleh 4 indikator capaian kinerjanya dengan kriteria “Sangat Tinggi” dan 1 indikator dengan capaian “Tinggi”. Secara rata-rata, capaian kinerja mencapai 111,75%. Secara rinci capaian kinerja sasaran strategis pertama dapat dilihat dalam tabel 3, dibawah ini :

Tabel 3  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>	<b>KET</b>
		<b>I</b>	<b>(%)</b>	
Persentase jalan kabupaten kondisi mantap (baik dan sedang)	41,75	37,14	88,96	T
Persentase jalan poros desa dan perkotaan dalam kondisi baik (>40 km/jam)	60,19	59,35	98,60	ST



INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISAS I	CAPAIAN (%)	KET
Persentase kemantapan jalan di wilayah perbatasan antar negara	49,18	68,16	138,59	ST
Persentase ketersediaan sarana perhubungan darat	65,00	73,14	112,52	ST
Persentase layanan telekomunikasi	66,82	80,23	120,07	ST
<b>RATA-RATA KINERJA</b>			<b>111,75</b>	<b>ST</b>

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 1, dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran strategis	Program	Anggaran			Capaian kinerja	Tingkat efisiensi
		TARGET	REALISASI	%		
Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana jalan, perhubungan dan telekomunikasi	Program Penyelenggaraan Jalan	62,225,583,470	58,425,062,192	93.89	ST	6.11
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	60,508,837,773	57,726,772,049	95.40	ST	4.60
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	3,316,446,145	3,285,384,817	99.06	ST	0.94
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	8,304,575,614	8,155,124,578	98.20	ST	1.80
	Program Pengelolaan Pelayaran	543,317,274	534,657,049	98.41	ST	1.59
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1,755,530,363	1,703,210,290	97.02	ST	2.98
	Program Aplikasi Informatika	2,089,896,549	2,041,342,047	97.68	ST	2.32
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	818,543,696	703,903,202	85.99	T	14.01



Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, pencapaian target sasaran kinerja pada Sasaran 1 dinilai sudah sangat tinggi.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran 1, yaitu Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana jalan, perhubungan dan telekomunikasi telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 4 di atas. Dari 8 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 7 program dengan capaian kinerja sangat tinggi, 1 program dengan capaian kinerja tinggi.

Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap program-program yang belum dilaksanakan secara maksimal, yaitu program pengembangan jasa konstruksi.

**1.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.





Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 1 tahun 2021 dan realisasi kinerja 2 tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target RPJMD
	2019	2020	2021	
Persentase jalan kabupaten kondisi mantap (baik dan sedang)	35,64	40,75	44,75	44,75
Persentase jalan poros desa dan perkotaan dalam kondisi baik (>40 km/jam)	57,71	59,35	59,35	62,71
Persentase kemantapan jalan di wilayah perbatasan anatar negara	45,98	68,16	68,16	53,98
Persentase prasarana perhubungan darat	70,00	73,73	73,14	92,00
Persentase layanan telekomunikasi	58,61	59,61	80,23	67,02

### 1.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

#### a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- Komitmen yang tinggi dari Pimpinan dalam meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi menjadi faktor yang menentukan dalam keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1, baik berupa penyediaan dana maupun penyiapan sumber daya yang berkompeten.



### **b. Permasalahan dan hambatan**

- Kondisi geografis Kabupaten Sanggau yang terdiri dari bukit-bukit dan terdapat banyak sungai menjadi hambatan tersendiri dimana dalam hal pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi membutuhkan dana yang besar.

### **c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Pemerintah Kabupaten Sanggau terus berupaya melakukan kerjasama baik dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta Pihak Swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi terutama pada daerah terpencil dan perbatasan.

## **2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana permukiman**

### **2.1. Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana permukiman, juga merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi gabungan diantaranya misi 1 yaitu “Membangun dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” dan misi 8 yaitu “Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat”. Tersedianya akses ini akan mendukung pada tercapainya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sanggau, yang secara makro diukur dari indeks pembangunan manusia.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 1 indikator kinerja dari sasaran strategis “Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana permukiman”, diperoleh 1 indikator capaian kinerjanya dengan kriteria “Sangat Tinggi”. Dengan rata-rata, capaian kinerja mencapai 145,03% atau kategori “Sangat Tinggi”. Secara rinci capaian kinerja sasaran strategis kedua dapat dilihat dalam tabel 6, dibawah ini :



Tabel 6  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>	<b>KET</b>
Rasio rumah layak huni	0,1348	0,1955	145,03	ST
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>145,03</b>	<b>ST</b>

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 2, dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini:

Tabel 7  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>			<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>TINGKAT EFISIENSI</b>
		<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>		
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	12.817.531.917	12.630.538.554	98,54	ST	1,46
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.179.515.737	4.143.947.116	99,15	ST	0,85
	Program Pengembangan Permukiman	20.174.779.609	20.103.029.766	99,64	ST	0,36
	Program Penataan Bangunan Gedung	30.941.807.994	29.908.539.959	96,66	ST	3,34
	Program Kawasan Permukiman	2.316.467.912	2.267.741.366	97,90	ST	2,10

Berdasarkan tabel 7 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin dan kinerja, pencapaian target sasaran kinerja pada Sasaran 2 dinilai sudah sangat tinggi.



### **b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada Sasaran 2 telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 7 di atas. Dari 5 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 5 program dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

### **2.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara timeseries dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 2 tahun 2021 dan realisasi kinerja 2 tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini:



Tabel 8

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target
	2019	2020	2021	RPJMD
Rasio rumah layak huni	0,1343	0,1341	0,1955	0,1363

### 2.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

#### a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang sehat merupakan faktor utama keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 ini. Tanpa dukungan dari masyarakat, program-program penyehatan lingkungan tidak bisa berjalan secara maksimal.

#### b. Permasalahan dan hambatan

- Kondisi jangkauan pelayanan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang luas sampai pada daerah terpencil merupakan kendala utama dalam memberikan pelayanan terutama ketersediaan listrik bagi masyarakat.

#### c. Solusi/upaya pemecahan masalah

- Pemerintah Kabupaten Sanggau terus berupaya melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang sehat serta penyediaan sarana dan prasarananya.

### 3. Meningkatnya sarana dan prasarana publik dan permukiman di wilayah perbatasan antarnegara

#### 3.1. Realisasi kinerja tahun 2021

Meningkatnya sarana dan prasarana publik di wilayah perbatasan antar negara merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi gabungan juga diantaranya misi 1 yaitu “Membangun dan meningkatkan



infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” dan misi 8 yaitu “Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat”. Sarana dan prasarana publik di wilayah perbatasan antar negara merupakan permasalahan penting dalam meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya di daerah perbatasan antar negara yang berpengaruh pada tingkat tingkat kepuasan masyarakat. Sarana dan prasarana publik di wilayah perbatasan antar negara harus terus ditingkatkan demi terwujudnya pemerataan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 1 indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatnya sarana dan prasarana publik di wilayah perbatasan antar negara”, 1 indikator yang ada dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”, secara rata-rata capaian dikinerja mencapai 138,25%. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis kedua belas dapat dilihat pada tabel 9 :

Tabel 9  
Capaian kinerja sasaran strategis 3

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>	<b>KET</b>
Indeks infrastruktur wilayah perbatasan antar negara.	49,18	67,99	138,25	ST
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>138,25</b>	<b>ST</b>

#### a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja sasaran strategi 3, dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini:

Tabel 10  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>			<b>CAPAIAN KINERJA A</b>	<b>TINGKAT EFISIEN SI</b>
		<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>		
Meningkatnya sarana dan prasarana	Program Pengelolaan Perbatasan	133.068.447	133.068.447	95,73	ST	4,27



publik di wilayah perbatasan antar negara						
---	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel 10 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 3 dinilai sudah sangat tinggi.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 3, yaitu Meningkatnya sarana dan prasarana publik di wilayah perbatasan antar negara telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 10 di atas. Dari program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa capaian kerjanya tinggi.

**3.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.



Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 3 tahun 2021 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 11 di bawah ini:

Tabel 11

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET RPJMD
	2019	2020	2021	
Indeks infrastruktur wilayah perbatasan antar negara.	62,84	67,99	67,99	53,98

### **3.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

#### **a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Ketetapan Pemerintah Pusat yang menyatakan daerah perbatasan sebagai beranda depan negara.

#### **b. Permasalahan dan hambatan**

- Kondisi geografis yang luas dengan medan yang berbukit-bukit membutuhkan sumber daya yang banyak dalam pemenuhan sarana dan prasarana publik.

#### **c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam penyediaan sarana dan prasarana publik di daerah perbatasan.





#### 4. Meningkatnya kualitas air dan udara

##### 4.1. Realisasi Kinerja Tahun 2021

Meningkatnya kualitas air dan udara merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi gabungan juga diantaranya misi 1 yaitu “Membangun dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” dan misi 8 yaitu “Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat”. Perekonomian daerah yang mempunyai daya saing menjadi daya tarik baik investor untuk mengembangkan perekonomian daerah sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah meningkat yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sanggau.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 2 indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatkan kualitas air dan udara”, diperoleh 2 indikator capaian kinerjanya dengan kriteria “Sangat Tinggi”. Secara rinci capaian kinerja sasaran strategis ketiga dapat dilihat dalam tabel 12, dibawah ini :

Tabel 12  
Capaian kinerja sasaran strategis 4

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISAS I</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>	<b>KE T</b>
Indeks kualitas air	50,02	50	99,96	ST
Indeks kualitas udara	93,67	93,99	100,34	ST
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>100,15</b>	<b>ST</b>

##### a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 4, dapat dilihat pada tabel 13 di bawah ini:



Tabel 13  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	%		
Meningkatnya kualitas air dan udara	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	99,930,000	99,555,000	99.62	ST	0.38
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	755,322,170	738,376,781	97.76	ST	2.24
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1,642,406,255	1,637,983,661	99.73	ST	0.27
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	27,567,912	27,517,912	99.82	ST	0.18
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	127,979,024	121,153,274	94.67	ST	5.33
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	16,347,848	16,297,848	99.69	ST	0.31



SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	%		
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	2,790,117	0	0.00	SR	100
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	28,338,740	16,181,240	57.10	R	42.90
	Program Pengelolaan Persampahan	2,402,669,623	2,371,201,849	98.69	ST	1.31

Berdasarkan tabel 13 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin sehingga secara kinerja, pencapaian target sasaran kinerja pada Sasaran 4 dinilai sudah tinggi.

#### **b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada Sasaran 4, yaitu Meningkatnya kualitas air dan udara telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 13 di atas. Dari 9 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 7 program dengan capaian kinerja “sangat tinggi”, 1 program dengan capaian kinerja “rendah” dan 1 program dengan capaian kinerja “sangat rendah”. Perlu dilakukannya evaluasi terhadap beberapa program yang tidak optimal dalam pelaksanaannya, sehingga pada perencanaan ditahun berikutnya bisa dipertimbangkan dalam prioritas penganggaran.

#### **4.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target perencanaan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam



mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara timeseries dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 4 tahun 2021 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 14 di bawah ini:

Tabel 14  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target RPJMD
	2019	2020	2021	
Indeks kualitas air	48,18	50	50	51,52
Indeks kualitas udara	91,14	92,03	93,99	93,70

### **4.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

#### **a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Komitmen dalam pemberantasan kegiatan penambangan ilegal dan penertiban pengelolaan perkebunan sawit menjadi faktor pendukung utama dalam penyehatan lingkungan terutama air dan udara.



#### **b. Permasalahan dan hambatan**

- Beberapa oknum masyarakat masih melakukan pelanggaran dalam kegiatan penambangan dan perkebunan terutama sawit, sehingga masih di khawatirkan terjadinya pencemaran air akibat *mercury* dan pupuk kimia.

#### **c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Menjalin kerjasama dengan aparat keamanan dalam melakukan tindakan sosialisasi dan penindakan terhadap oknum masyarakat yang berbuat pelanggaran.

### **5. Meningkatnya tutupan lahan**

#### **5.1. Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Meningkatnya tutupan lahan merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi gabungan juga diantaranya misi 1 yaitu “Membangun dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” dan misi 8 yaitu “Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat”. Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang berbasis pada potensi lokal. Sebagai daerah yang berbasis dan memiliki potensi besar dibidang pertanian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, pariwisata, perdagangan dan industri, diharapkan ekonomi lokal kerakyatan dapat lebih berdaya guna menghadapi persaingan baik tingkat provinsi, nasional maupun tingkat Asean.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 1 indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatnya tutupan lahan”, diperoleh sebanyak 1 indikator dicapai dengan kriteria “Sedang”. Secara rinci capaian kinerja sasaran strategis keempat dapat dilihat dalam tabel 12, dibawah ini :



Tabel 14  
Capaian kinerja sasaran strategis 5

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
Indeks tutupan lahan	43,47	32,48	74,72	S
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>74,72</b>	<b>S</b>

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 5, dapat dilihat pada tabel 15 di bawah ini:

Tabel 15  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	%		
Meningkatnya tutupan lahan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	99,930,000	99,555,000	99.62	ST	0.38
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	755,322,170	738,376,781	97.76	ST	2.24
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1,642,406,255	1,637,983,661	99.73	ST	0.27
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	27,567,912	27,517,912	99.82	ST	0.18
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	127,979,024	121,153,274	94.67	ST	5.33



SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	%		
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	16,347,848	16,297,848	99.69	ST	0.31
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	2,790,117	0	0.00	SR	100
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	28,338,740	16,181,240	57.10	R	42.90
	Program Pengelolaan Persampahan	2,402,669,623	2,371,201,849	98.69	ST	1.31

Berdasarkan tabel 15 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada Sasaran 5, yaitu meningkatnya tutupan lahan telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 15 di atas. Dari 9 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan program sasaran 5 ini sama dengan program prioritas pada sasaran 4 yaitu “meningkatkan kualitas air dan udara”.

Pada dasarnya pencapaian target sasaran strategis 5 ini sama dengan pencapaian sasaran strategis 4, di mana dari 9 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 7 program dengan pencapaian kinerja “sangat tinggi”, 1 program dengan pencapaian kinerja “rendah” dan 1 program dengan pencapaian kinerja “sangat rendah”, tetapi



dalam rangka meningkatkan meningkatnya tutupan lahan sangat penting untuk dilakuakn evaluasi lebih lanjut guna mewujudkan lingkungan yang sehat bagi masyarakat.

## 5.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target perencanaan jangka menengah

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara timeseries dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 5 tahun 2021 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 16 di bawah ini:

Tabel 16

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target RPJMD
	2019	2020	2021	
Indeks tutupan lahan	44,02	43,75	32,48	42,74





### **5.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

#### **a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mensukseskan pemanfaatan lahan berkelanjutan turut memiliki andil dalam meningkatkan indkes kualitas tutupan lahan.

#### **b. Permasalahan dan hambatan**

- Beralihnya fungsi lahan pertanian yang potensial menjadi lahan perkebunan yang semakin sulit dikontrol.

#### **c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Terus melakukan dan meningkatkan sosialisasi terkait pemanfaatan lahan secara sehat dan berkelanjutan.

## **6. Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang**

### **6.1. Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi gabungan juga diantaranya misi 1 yaitu “Membangun dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” dan misi 8 yaitu “Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat”. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan harapan dan dambaan masyarakat sebagai pengguna barang/jasa yang disediakan pemerintah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pelayanan berkualitas perlu optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan disemua tingkatan.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 1 indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang”, diperoleh sebanyak 1 indikator dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”. Secara rinci capaian kinerja sasaran strategis kelima dapat dilihat dalam tabel 17, dibawah ini :



Tabel 17  
Capaian kinerja sasaran strategis 6

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGE T</b>	<b>REALISAS I</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>	<b>KET</b>
Ketaatan terhadap RTRW	100	100	100	ST
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>100</b>	<b>ST</b>

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 5, dapat dilihat pada tabel 16 di bawah ini:

Tabel 18  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>			<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>TINGKAT EFISIENSI</b>
		<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>		
Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	258,206,680	201,320,076	77.97	T	22.03

Berdasarkan tabel 18 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, meskipun dari sisi serapan anggaran cukup rendah dibawah 80% namun secara kinerja, pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 6 dinilai sangat tinggi.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 5, yaitu meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang telah ditetapkan program prioritas seperti tergambar pada tabel 18 di atas. Dari 1 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 1 program dengan capaian kinerja "Tinggi".



## 6.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara timeseries dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 6 tahun 2021 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 19 di bawah ini:

Tabel 19

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target RPJMD
	2019	2020	2021	
Ketaatan terhadap RTRW	100	100	100	100

## 6.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

### a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- Komitmen dari kepala daerah dan seluruh pimpinan di tingkatan top manajemen yang didukung seluruh aparatur dalam mewujudkan sanggau tertib.



### **b. Permasalahan dan hambatan**

- Kondisi geografis Kabupaten Sanggau yang luas dan keterbatasan sumber daya menyebabkan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang belum mampu terlaksana secara maksimal.

### **c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Melakukan sosialisasi secara bertingkat mulai dari kecamatan, desa dan dusun dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan pemanfaatan ruang.

## **7. Meningkatnya kualitas pendidikan**

### **7.1. Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Meningkatnya kualitas pendidikan merupakan sasaran dalam mewujudkan misi 2 yaitu “Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat dan berdaya saing”. Ketertiban dan ketentraman masyarakat merupakan salah satu pendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 2 indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatnya kualitas pendidikan”, diperoleh 2 indikator dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi” dengan rata-rata capaian kinerja 101,34%. Secara rinci capaian kinerja sasaran strategis 7 dapat dilihat dalam tabel 20, dibawah ini :

Tabel 20  
Capaian kinerja sasaran strategis 7

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>	<b>KET</b>
Harapan lama sekolah	11,67	11,59	99,31	ST
Rata-rata lama sekolah	7,15	7,39	103,36	ST
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>101,34</b>	<b>ST</b>

### **a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 7, dapat dilihat pada tabel 21 di bawah ini:



Tabel 21  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	%		
Meningkatnya kualitas pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	93.395.059.327	89.551.825.522	95,88	ST	4,12
	Program Pembinaan Perpustakaan	851.515.492	791.711.795	92,98	ST	7,02

Berdasarkan tabel 21 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, dan secara kinerja, pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 7 dinilai dengan kategori sangat tinggi.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 7, yaitu meningkatnya kualitas pendidikan telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 21 di atas. Dari 2 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 2 program dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

**7.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas



yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara timeseries dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 7 tahun 2021 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 22 di bawah ini:

Tabel 22

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target
	2019	2020	2021	RPJMD
Harapan lama sekolah	11,56	11,57	11,59	11,97
Rata-rata lama sekolah	6,95	7,15	7,39	7,33

### **7.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

#### **a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin tinggi dan akses terhadap dunia pendidikan semakin terbuka.

#### **b. Permasalahan dan hambatan**

- Penyebaran informasi terkait pendidikan belum maksimal dilakukan terutama pada daerah-daerah terpencil.

#### **c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Terus mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat di daerah terpencil dan ikut mensukseskan upaya Pemerintah Pusat dalam penugasan Guru Garis Depan (GGD).



## 8. Meningkatnya kualitas kesehatan

### 8.1. Realisasi Kinerja Tahun 2021

Meningkatnya kualitas kesehatan merupakan sasaran dalam mewujudkan misi 2 yaitu “Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat dan berdaya saing”.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 2 indikator kinerja dari sasaran strategis “Meningkatnya kualitas kesehatan”, diperoleh 1 indikator dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi” dan 1 indikator dengan capaian “Tinggi”. Secara rinci capaian kinerja sasaran strategis ketujuh dapat dilihat dalam tabel 21, dibawah ini :

Tabel 23  
Capaian kinerja sasaran strategis 7

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
Angka harapan hidup	72,03	71,42	99,15	ST
Laju pertumbuhan penduduk	1,34	1,03	76,87	T
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>88,01</b>	<b>T</b>

#### a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 8, dapat dilihat pada tabel 24 di bawah ini:

Tabel 24  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	%		
Meningkatnya kualitas kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	488,229,799,017	397,202,166,666	81,36	T	17,64
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	22,897,057,318	18,594,426,204	81,21	T	18,79



Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	785,522,099	443,440,883	56,45	R	43,55
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3,460,147,986	3,020,222,124	87,29	T	12,71
Program Pengendalian Penduduk	177,311,926	91,734,075	51,74	R	48,26
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4,838,319,696	3,912,101,738	80,86	T	19,14
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1,094,301,570	885,723,430	80,94	T	19,06
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaa	2,163,455,607	2,036,444,882	94,13	ST	5,87

Berdasarkan tabel 24 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, meskipun masih ada beberapa program yang serapan anggarannya masih lemah di bawah 75% namun secara kinerja, pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 8 dinilai sudah tinggi.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 8, yaitu terwujudnya pengelolaan sumber daya





alam yang selaras dengan lingkungan hidup telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 24 di atas. Dari 8 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 1 program dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi”, 5 program dengan capaian kinerja “Tinggi”, dan 1 program dengan capaian kinerja “Rendah”.

Pada sasaran strategis 8, terdapat 1 program dengan capaian rendah akan tetapi dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang selaras dengan lingkungan hidup sangat penting untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut guna mendukung keberlangsungan lingkungan hidup.

## **8.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara timeseries dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 8 tahun 2021 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 23 di bawah ini:



Tabel 25

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target RPJMD
	2019	2020	2021	
Angka harapan hidup	71,35	71,42	99,15	73,88
Laju pertumbuhan penduduk	1,65	1,54	1,03	1,28

### 8.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

#### a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- Komitmen Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menjaga lingkungan yang nyaman dan sehat serta semangat hidup sehat dalam masyarakat yang semakin terpelihara.

#### b. Permasalahan dan hambatan

- Permasalahan terjadi terutama dalam meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Sanggau terkait mewabahnya covid 19.

#### c. Solusi/upaya pemecahan masalah

- Meningkatkan sosialisasi pola hidup sehat dalam masyarakat dan menyediakan sarana prasarana kebersihan.

## 9. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

### 9.1. Realisasi Kinerja Tahun 2021

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat merupakan sasaran dalam mewujudkan misi 2 yaitu “Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat dan berdaya saing”.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 2 indikator kinerja dari sasaran strategis “Meningkatnya kesejahteraan masyarakat”, diperoleh semua indikator dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”. Secara rinci capaian kinerja sasaran strategis kedelapan dapat dilihat dalam tabel 24, dibawah ini:



Tabel 26  
Capaian kinerja sasaran strategis 9

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
Persentase PMKS yang tertangani	96,97	97,34	100,38	ST
Pengeluaran Per Kapita	8.381	8.245	98,38	ST
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>			<b>99,38</b>	<b>ST</b>

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 9, dapat dilihat pada tabel 27 di bawah ini:

Tabel 27  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	%		
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Program Pemberdayaan Sosial	293,589,159	291,799,237	99.39	ST	0.61
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	37,043,817	36,708,378	99.09	ST	0.91
	Program Rehabilitasi Sosial	1,456,554,883	1,454,714,691	99.87	ST	0.13
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	2,132,849,750	1,880,576,964	88.17	ST	11.83
	Program Penanganan Bencana	126,305,041	124,463,277	98.54	ST	1.46
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	263,724,228	263,472,000	99.90	ST	0.10

Berdasarkan tabel 27 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja



pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, baik dari persentase serapan anggaran program maupun secara kinerja pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 9 dinilai sudah sangat tinggi.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 9, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 27 di atas. Dari 6 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 6 program dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

Pada sasaran strategis 9, tidak terdapat program dengan capaian rendah akan tetapi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya dan humanis sangat penting untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut guna mendukung Kabupaten Sanggau yang humanis dan berbudaya.

**9.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja



sasaran secara timeseries dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 9 tahun 2021 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 28 di bawah ini:

Tabel 28

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target RPJMD
	2019	2020	2021	
Persentase PMKS yang tertangani	99,20	99,85	97,34	96,97
Pengeluaran Per Kapita	8.410	8.245	8.245	8.791

### **9.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

#### **a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Komitmen pimpinan dalam pemeratakan kesejahteraan masyarakat sampai ke daerah pelosok dan terpencil.

#### **b. Permasalahan dan hambatan**

- Masyarakat masih belum terbuka terkait informasi-informasi PMKS disekitarnya.

#### **c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Terus menggalakkan kegiatan sosialisasi, pencegahan dan penanganan PMKS sampai pada daerah-daerah terpencil.

## **10. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak**

### **10.1. Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak merupakan sasaran dalam mewujudkan misi 2 yaitu “Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak”. Hasil pengukuran terhadap satu indikator kinerja dari sasaran strategis “Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan



anak”, diperoleh nilai dicapaian dengan kriteria “Sangat Tinggi”. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel 29, dibawah ini :

Tabel 29  
Capaian kinerja sasaran strategis 10

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
Indeks pembangunan gender (IPG)	81,11	81,04	99,91	ST
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>99,91</b>	<b>ST</b>

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 10, dapat dilihat pada tabel 30 di bawah ini:

Tabel 30  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	%		
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1,267,564,532	1,263,922,919	99.71	ST	0.29
	Program Perlindungan Perempuan	147,184,826	136,816,870	92.96	ST	7.04
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	44,400,372	44,085,372	99.29	ST	0.71
	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	155,643,923	152,165,600	97.77	ST	2.23
	Program Perlindungan Khusus Anak	165,492,912	163,050,748	98.52	ST	1.48

Berdasarkan tabel 30 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin



dan secara kinerja, pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 10 dinilai sudah “Sangat Tinggi”.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 10, yaitu Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 30 di atas. Dari 5 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 5 program dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi”. Pada sasaran strategis 10, tidak terdapat program dengan capaian rendah akan tetapi dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan Kabupaten Sanggau.

**10.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara timeseries dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 10 tahun 2021 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 31 di bawah ini:



Tabel 31

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target RPJMD
	2019	2020	2021	
Indeks pembangunan gender	61,35	81,04	81,04	81,47

### 10.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

#### a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- Komitmen Para Pemangku Kepentingan dan masyarakat dalam meningkatkan rasa aman dan nyaman di Kabupaten Sanggau turut berpengaruh terhadap peningkatan peran serta perempuan dan anak.

#### b. Permasalahan dan hambatan

- Letak geografis Kabupaten Sanggau yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia membuka peluang terjadinya tindak pidana penjualan manusia terutama menasar kaum perempuan dan anak.

#### c. Solusi/upaya pemecahan masalah

- Membuka saluran sebesar-besarnya bagi perempuan dan anak untuk berpartisipasi dalam upaya pembangunan baik fisik maupun non fisik serta membuka saluran dalam mengantisipasi peluang terjadinya tindak pidana penjualan manusia.

## 11. Meningkatnya pertumbuhan PDRB

### 11.1. Realisasi Kinerja Tahun 2021

Meningkatnya pertumbuhan PDRB merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 3 yaitu “Meningkatnya taraf hidup masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai kearifan lokal”. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan penunjang dan salah satu daya





bagi tarik investor menanamkan modal ke daerah dalam rangka pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 4 indikator kinerja dari sasaran strategis “Meningkatnya pertumbuhan PDRB”, diperoleh 4 indikator dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”. Secara rinci hasil pengukuran dapat dilihat dalam tabel 32, dibawah ini :

Tabel 32  
Capaian kinerja sasaran strategis 11

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI I	CAPAIAN (%)	KET
Kontribusi sektor pertanian. Kehutanan. dan Perikanan terhadap PDRB	6.911.466	7.110.742	102,88	ST
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	19,27	19,32	100,26	ST
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,15	12,13	99,84	ST
Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	292.973	315.770	107,78	ST
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>102,69</b>	<b>ST</b>

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 10, dapat dilihat pada tabel 33 di bawah ini:

Tabel 33  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	%		
Meningkatnya pertumbuhan PDRB	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	4,275,300,575	2,980,804,539	69.72	S	30.28
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	16,271,463,952	15,761,391,253	96.87	ST	3.13



SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	%		
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	764,715,187	747,070,953	97.69	ST	2.31
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	279,158,717	278,594,245	99.80	ST	0.20
	Program Perizinan Usaha Pertanian	192,523,986	191,573,534	99.51	ST	0.49
	Program Penyuluhan Pertanian	288,402,534	285,979,247	99.16	ST	0.84
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	588,742,088	385,633,242	65.50	R	34.50
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1,593,104,289	1,581,660,882	99.28	ST	0.72
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	162,185,271	159,093,783	98.09	ST	1.91
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	20,997,511	20,143,354	95.93	ST	4.07
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	366,647,232	358,489,181	97.77	ST	2.23
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	92,100,820	91,726,609	99.59	ST	0.41
	Program Pengembangan Ekspor	24,932,972	23,658,400	94.89	ST	5.11
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	93,493,012	89,974,081	96.24	ST	3.76
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	26,724,498	24,094,498	90.16	T	9.84



SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	%		
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	5,445,907,895	4,306,553,122	79.08	T	20.92
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	37,828,478	37,733,298	99.75	ST	0.25
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	61,803,463	59,889,763	96.90	ST	3.10
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	147,832,712	147,442,782	99.74	ST	0.26
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	390,303,842	382,363,050	97.97	ST	2.03
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	23,605,023	23,342,403	98.89	ST	1.11
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	676,371,429	634,275,252	93.78	ST	6.22
	Program Pemasaran Pariwisata	86,869,377	81,237,520	93.52	ST	6.48
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	135,827,735	131,132,230	96.54	ST	3.46
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2,346,502,673	2,109,966,578	89.92	T	10.08

Berdasarkan tabel 33 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, meskipun masih ada beberapa program yang serapan anggarannya masih lemah di bawah 75% namun secara kinerja, pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 11 dinilai sudah sangat tinggi.



**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 11, yaitu terwujudnya kebutuhan infrastruktur daerah telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 33 di atas. Dari 25 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 20 program dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi”, 3 program dengan capaian kinerja “Tinggi”, 1 program dengan capaian kinerja “Sedang” dan 1 program dengan capaian kinerja “Rendah”.

Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap program-program yang belum dilaksanakan secara maksimal, yaitu program-program yang capaian kinerja sedang dan terutama yang rendah seperti Program pengelolaan perikanan tangkap.

**11.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara timeseries dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 11 tahun 2021 dan realisasi kinerja tahun-



tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 34 di bawah ini:

Tabel 34  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target RPJMD
	2019	2020	2021	
Kontribusi sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	5.646.388	6.405.029	7.110.742	8.683.953
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	19,38	19,32	19,32	19,18
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,1	12,13	12,13	12,2
Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	370.550	288.397	315.770	307.139

### 11.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

#### a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah.

#### b. Permasalahan dan hambatan

- Keberadaan sarana dan prasarana pendukung yang masih sangat terbatas dan belum merata.

#### c. Solusi/upaya pemecahan masalah

- Menyelaraskan program baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun yang didukung oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta dukungan dari Pemerintah Desa.



## 12. Meningkatnya investasi daerah

### 12.1. Realisasi Kinerja Tahun 2021

Meningkatnya investasi daerah merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 3 yaitu “Meningkatnya taraf hidup masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai kearifan lokal”. Pemerataan merupakan permasalahan penting dalam pembangunan ekonomi disamping permasalahan kemiskinan dan pertumbuhan. Permasalahan pemerataan terjadi karena tidak meratanya distribusi pendapatan dan hasil-hasil pembangunan yang diterima oleh masyarakat.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 1 indikator kinerja dari sasaran strategis “Meningkatnya investasi daerah”, 1 indikator yang ada dicapai dengan kriteria “Sangat Rendah”. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis kesebelas dapat dilihat pada tabel 35 :

Tabel 35  
Capaian kinerja sasaran strategis 12

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
Pertumbuhan Investasi PMDN	8.85	0.43	4.86	SR
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>4.86</b>	<b>SR</b>

#### a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 12, dapat dilihat pada tabel 36 di bawah ini:

Tabel 36  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	%		
Meningkatnya investasi daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	75,645,206	72,525,035	95.88	ST	4.12
	Program Promosi Penanaman Modal	201,350,508	198,979,646	98.82	ST	1.18



SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	%		
	Program Pelayanan Penanaman Modal	308,511,120	303,153,584	98.26	ST	1.74
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	367,154,612	180,775,640	49.24	SR	50.76
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	46,725,480	46,660,480	99.86	ST	0.14

Berdasarkan tabel 36 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, meskipun masih ada beberapa program yang serapan anggarannya masih lemah di bawah 50% namun secara kinerja, pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 12 dinilai sudah sangat tinggi.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 12, yaitu meningkatnya investasi daerah telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 36 di atas. Dari 5 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 4 program dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi” dan 1 program dengan capaian kinerja “Sangat Rendah”.

Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap program-program yang belum dilaksanakan secara maksimal, yaitu program-program yang capaian kinerja sangat rendah seperti Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.



## 12.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara timeseries dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 12 tahun 2021 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 32 di bawah ini:

Tabel 37  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target RPJMD
	2019	2020	2021	
Pertumbuhan Investasi PMDN	8,50	9,00	0,43	5,50

## 12.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

### a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- Meningkatnya keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sanggau serta letak geografis yang strategis membuat semakin banyak investor yang tertarik berinvestasi.





#### **b. Permasalahan dan hambatan**

- Salah satu andalan Kabupaten Sanggau adalah sektor pertambangan, dengan ditariknya kewenangan urusan pertambangan menjadi kewenangan pusat membuat proses investasi di bidang pertambangan mengalami perlambatan.

#### **c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Terus meningkatkan rasa aman dan nyaman di Kabupaten Sanggau guna menarik semakin banyak investor untuk berinvestasi.

### **13. Menurunnya angka pengangguran**

#### **13.1. Realisasi kinerja tahun 2021**

Menurunnya angka pengangguran merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 3 yaitu “Meningkatnya taraf hidup masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai kearifan lokal”. Pengangguran merupakan permasalahan penting dalam pembangunan ekonomi disamping permasalahan kemiskinan dan pertumbuhan. Permasalahan pengangguran terjadi karena tidak meratanya lapangan pekerjaan dan tingkat keterampilan masyarakat.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 2 indikator kinerja dari sasaran strategis “Menurunnya angka pengangguran”, 2 indikator yang dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”, secara rata-rata capaian dikinerja mencapai 122,47%. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis 13 dapat dilihat pada tabel 38.

Tabel 38  
Capaian kinerja sasaran strategis 13

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGE T</b>	<b>REALISAS I</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>	<b>KET</b>
Tingkat partisipasi angkatan kerja	68,31	69,41	101,61	ST
Tingkat patisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,30	0,43	143,33	ST
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>122,47</b>	<b>ST</b>



**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 12, dapat dilihat pada tabel 34 di bawah ini:

Tabel 39  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	%		
Menurunnya Angka Pengangguran	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	191,359,739	191,359,739	100.00	ST	0.00
	Program Penempatan Tenaga Kerja	61,276,325	60,850,000	99.30	ST	0.70
	Program Hubungan Industrial	106,734,652	106,734,652	100.00	ST	0.00
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	95,615,473	85,800,000	89.73	T	10.27
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	22,686,833	21,600,000	95.21	ST	4.79
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	902,259,522	873,486,752	96.81	ST	3.19

Berdasarkan tabel 39 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 12 dinilai sudah sangat tinggi.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 12, yaitu menurunnya angka pengangguran telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 39 di



atas. Dari 6 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 5 program dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi” dan 1 program dengan capaian kinerja “Tinggi”.

### 13.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir tahun 2024

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara timeseries dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 13 tahun 2021 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 40 di bawah ini:

Tabel 40

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target RPJMD
	2019	2020	2021	
Tingkat partisipasi angkatan kerja	-	-	69,41	66,02
Tingkat patisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,23	0,27	0,43	0,40



### **13.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

#### **a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Meningkatnya kualitas SDM Kabupaten Sanggau setiap tahun turut membantu menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai.

#### **b. Permasalahan dan hambatan**

- Semangat wirausaha pada angkatan kerja terutama anak muda belum tinggi dan kurangnya informasi terkait pengembangan usaha mikro kecil menengah.

#### **c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Membuka peluang sebesar-besarnya bagi wirausaha muda dalam mengembangkan usahanya dengan penyediaan modal dan akses terhadap teknologi yang dibutuhkan.

## **14. Meningkatnya kinerja sektor pertanahan daerah**

### **14.1. Realisasi kinerja tahun 2021**

Meningkatnya kinerja sektor pertanahan daerah merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 3 yaitu “Meningkatnya taraf hidup masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai kearifan lokal”. Kepastian kepemilikan hak atas tanah merupakan permasalahan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berpengaruh pada permasalahan kemiskinan. Permasalahan kepemilikan hak atas tanah terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kepemilikan tanah.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 1 indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatkan kinerja sektor pertanahan daerah”, 1 indikator yang ada dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”, secara rata-rata capaian dikinerja mencapai 100%. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis kedua belas dapat dilihat pada tabel 41



Tabel 41  
Capaian kinerja sasaran strategis 14

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGE T</b>	<b>REALISAS I</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>	<b>KET</b>
Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100	100	100	ST
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>100</b>	<b>ST</b>

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 13, dapat dilihat pada tabel 42 di bawah ini:

Tabel 42  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>			<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>TINGKAT EFISIENSI</b>
		<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>		
Meningkatnya kinerja sektor pertanahan daerah	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	65,810,500	41,157,200	62.54	R	37.46
	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	207,317,218	16,409,372	7.92	SR	92.08
	Program Penatagunaan Tanah	1,497,763,401	238,734,955	15.94	SR	84.06

Berdasarkan tabel 42 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah kurang dimanfaatkan dengan maksimal, dikarenakan rata-rata serapan anggarannya masih lemah di bawah 70% namun secara kinerja, pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 14 dinilai sudah sangat tinggi.



**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 14, yaitu meningkatnya kinerja sektor pertanian daerah telah ditetapkan program prioritas seperti tergambar pada tabel 42 di atas. Dari 3 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 2 capaian kinerjanya “Sangat Rendah” dan 1 capaian kinerjanya “Rendah”.

Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap program yang belum dilaksanakan secara maksimal.

**14.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir tahun 2024**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara timeseries dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 14 tahun 2021 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 43 di bawah ini:



Tabel 43  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target RPJMD
	2019	2020	2021	
Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100	100	100	0

#### 14.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

##### a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- Upaya pengakuan hak atas tanah merupakan program nasional yang dalam berpa tahun telah dilakukan dan perlu peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung kegiatan dimaksud.

##### b. Permasalahan dan hambatan

- Tingkat kepedulian masyarakat akan pentingnya dokumen pertanahan masih lemah.

##### c. Solusi/upaya pemecahan masalah

- Perlu ditingkatkan kembali kegiatan sosialisasi akan pentingnya dokumen kepemilikan hak atas tanah serta membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam rangka mempermudah proses penerbitan dokumen.

#### 15. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat

##### 15.1. Realisasi kinerja tahun 2021

Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 3 yaitu “Meningkatnya taraf hidup masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai kearifan lokal”. Ketahanan pangan merupakan permasalahan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berpengaruh pada



permasalahan kemiskinan. Permasalahan ketahanan pangan terjadi karena kurangnya pola pangan harapan dan cadangan pangan.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 1 indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatnya kinerja sektor pertanian daerah”, 1 indikator yang ada dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”, secara rata-rata capaian dikinerja mencapai 100%. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis kedua belas dapat dilihat pada tabel 44.

Tabel 44  
Capaian kinerja sasaran strategis 15

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>	<b>KET</b>
Indeks Ketahanan Pangan	80,63	80,63	100	ST
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>100</b>	<b>ST</b>

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 15, dapat dilihat pada tabel 45 di bawah ini:

Tabel 45  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>			<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>TINGKAT EFISIENSI</b>
		<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>		
Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	582,083,922	577,233,782	99.17	ST	0.83
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	586,882,690	558,054,301	95.09	ST	4.91
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	66,612,426	60,967,426	91.53	ST	8.47





	Program Pengawasan Keamanan Pangan	53,239,223	46,684,223	87.69	T	12.31
--	------------------------------------	------------	------------	-------	---	-------

Berdasarkan tabel 45 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 15 dinilai sudah sangat tinggi.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 15, yaitu Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat telah ditetapkan program prioritas seperti tergambar pada tabel 45 di atas. Dari program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 3 capaian kinerjanya “Sangat Tinggi” dan 1 capaian kinerja “Tinggi”. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap program yang belum dilaksanakan secara maksimal.

**15.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja



sasaran secara timeseries dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 15 tahun 2021 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 46 di bawah ini:

Tabel 47

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET
	2019	2020	2021	RPJMD
Indeks Ketahanan Pangan	73,63	78,20		85,45

### 15.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

#### a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- Masyarakat sudah terbiasa dengan pola pertanian tradisional secara organik sehingga baik persediaan maupun keamanan pangan masih bisa dijaga dengan baik.

#### b. Permasalahan dan hambatan

- Semakin berkurangnya lahan pertanian produktif akibat alih fungsi ke perkebunan terutama sawit.

#### c. Solusi/upaya pemecahan masalah

- Optimalisasi teknologi pertanian modern dalam rangka memaksimalkan produksi pertanian dengan memanfaatkan lahan yang semakin terbatas.

## 16. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

### 16.1. Realisasi kinerja tahun 2021

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 4 yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik”. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan permasalahan penting dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berpengaruh pada tingkat kepuasan



masyarakat. Permasalahan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah terjadi karena belum optimalnya pengintegrasian kinerja antar perangkat daerah.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 3 indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah”, 2 indikator yang ada dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi” dan 1 indikator dengan capaian “Tinggi”, secara rata-rata capaian dikinerja mencapai 93,07%. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis kedua belas dapat dilihat pada tabel 48.

Tabel 48  
Capaian kinerja sasaran strategis 16

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
Nilai SAKIP	50	50,60	101,61	ST
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,12	3,02	96,79	ST
Tingkat maturitas SPIP	3,30	2,68	81,21	T
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>93,07</b>	<b>ST</b>

#### a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 15, dapat dilihat pada tabel 49 di bawah ini:

Tabel 49  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	%		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	25,305,588,078	23,610,537,820	93.30	ST	6.70
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	248,480,828	227,730,566	91.65	ST	8.35

Berdasarkan tabel 49 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja



pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 16 dinilai sudah sangat tinggi.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 16, yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 49 di atas. Dari 2 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 2 program dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

**16.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Untuk penilaian SAKIP tahun 2021 belum ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 16 tahun 2021 dan realisasi kinerja tahun-



tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 50 di bawah ini:

Tabel 50  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target RPJMD
	2019	2020	2021	
Nilai SAKIP	47,41	50,60	50,60	71
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,0036	3,0036	3,0200	3,4200
Tingkat maturitas SPIP	Level 3	Level 3	2,68	3,90

### **16.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

#### **a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Komitmen pimpinan akan pentingnya akuntabilitas dalam pemerintahan semakin kuat sehingga setiap program penguatan akuntabilitas dapat berjalan dengan baik.

#### **b. Permasalahan dan hambatan**

- Sumber daya aparatur dalam penerapan akuntabilitas masih sangat kurang baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

#### **c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Optimalisasi sumber daya aparatur yang ada terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan terkait akuntabilitas kinerja.

## **17. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah**

### **17.1. Realisasi kinerja tahun 2021**

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 4 yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik”. Pengelolaan keuangan daerah merupakan permasalahan penting dalam meningkatkan pelayanan



kepada masyarakat yang berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat. Permasalahan pengelolaan keuangan daerah terjadi karena belum optimalnya pengintegrasian kinerja dan keuangan antar perangkat daerah.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 2 indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah”, 1 indikator yang ada dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi” dan 1 indikator yang ada dicapai dengan kriteria “Tinggi”, secara rata-rata capaian dikinerja mencapai 99,06%. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis kedua belas dapat dilihat pada tabel 51.

Tabel 51  
Capaian kinerja sasaran strategis 17

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISAS I</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>	<b>KET</b>
Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah	7,06	7,81	110,62	ST
Indeks pengelolaan keuangan daerah	1,167	1,021	87,49	T
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>99,06</b>	<b>ST</b>

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 16, dapat dilihat pada tabel 45 di bawah ini:

Tabel 52  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>			<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>TINGKAT EFISIENSI</b>
		<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	262,001,265,261	254,091,448,628	96.98	ST	3.02
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,905,665,620	1,846,255,954	96.88	ST	3.12
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2,252,676,789	2,182,999,634	96.91	ST	3.09



Berdasarkan tabel 52 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 17 dinilai sudah sangat tinggi.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 17, yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 52 di atas. Dari 3 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 3 program dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

**17.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 17 tahun 2021 dan realisasi kinerja tahun-



tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 53 di bawah ini:

Tabel 53  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target RPJMD
	2019	2020	2021	
Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah	7,10	7,75	7,81	5,59
Indeks pengelolaan keuangan daerah	0,778	1,035	1,021	1,585

### **17.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

#### **a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Komitmen yang kuat dari pimpinan untuk terus mewujudkan transparansi, efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran sangat membantu terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.

#### **b. Permasalahan dan hambatan**

- Peraturan terkait pengelolaan keuangan yang terus berkembang seiring perkembangan teknologi informasi perlu penyesuaian yang cepat dan dengan prinsip kehati-hatian.

#### **c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Mengoptimalkan pendampingan baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang yang berkualitas.

## **18. Meningkatnya profesionalitas aparatur sipil negara**

### **18.1. Realisasi kinerja tahun 2021**

Meningkatnya profesionalitas aparatur sipil negara merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 4 yaitu “Meningkatnya tata





kelola pemerintahan yang baik”. Profesionalitas aparatur sipil negara merupakan permasalahan penting dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berpengaruh pada tingkat kepuasan masyarakat. Permasalahan profesionalitas aparatur sipil negara terjadi karena belum budaya kompetisi di dalam aparatur sipil negara.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 1 indikator kinerja dari sasaran strategis “Meningkatnya profesionalitas aparatur sipil negara”, dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis kedua belas dapat dilihat pada tabel 54.

Tabel 54  
Capaian kinerja sasaran strategis 18

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>	<b>KET</b>
Rasio ASN	0,010	0,010	100	ST
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>100</b>	<b>ST</b>

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 18, dapat dilihat pada tabel 55 di bawah ini:

Tabel 55  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 18

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>			<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>TINGKAT EFISIENSI</b>
		<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>		
Meningkatnya profesionalitas ASN	Program Kepegawaian Daerah	2,663,686,183	2,412,607,486	90.57	Tinggi	9.43

Berdasarkan tabel 55 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, dan secara kinerja pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 18 dinilai sudah tinggi.



**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 18, telah ditetapkan program prioritas seperti tergambar pada tabel 18 di atas. Dari 1 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 1 program dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

**18.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara timeseries dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 18 tahun 2021 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 56 di bawah ini:

Tabel 56

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 18 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target RPJMD
	2019	2020	2021	
Rasio ASN	0,011	0,010	0,010	0,010



### **18.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

#### **a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Berkembangnya pola pengembangan karir dan pemberian tambahan penghasilan sangat berpengaruh dan memacu Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya masing-masing.

#### **b. Permasalahan dan hambatan**

- Mewabahnya virus covid 19 menyebabkan beberapa kegiatan peningkatan kompetensi pegawai gagal untuk dilaksanakan.

#### **c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Membuka peluang kerja sama dengan institusi pengembangan kompetensi baik tingkat provinsi maupun pusat dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi secara *online*.

## **19. Meningkatnya kualitas layanan publik**

### **19.1. Realisasi kinerja tahun 2021**

Meningkatnya kualitas layanan publik merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 4 yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik”. Kualitas layanan publik merupakan permasalahan penting dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berpengaruh pada tingkat kepuasan masyarakat. Permasalahan kualitas layanan publik terjadi karena belum optimalnya pengembangan teknologi informasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 2 indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatnya kualitas layanan publik”, 2 indikator yang ada dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”, secara rata-rata capaian dikinerja mencapai 100%. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis kedua belas dapat dilihat pada tabel 57.



Tabel 57  
Capaian kinerja sasaran strategis 19

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISAS I</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>	<b>KET</b>
Indeks penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik (SPBE)	2,05	2,27	110,73	ST
Indeks kepuasan masyarakat	85	89,18	104,92	ST
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			107,83	<b>ST</b>

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 19, dapat dilihat pada tabel 58 di bawah ini:

Tabel 58  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 19

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>			<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>TINGKAT EFISIENSI</b>
		<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>		
Meningkatnya kualitas layanan publik	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.732.536.472	2.544.991.262	93,14	ST	6,86
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	2.443.796.960	2.252.146.581	92,16	ST	7,84
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	908.212.921	674.878.054	74,31	S	25,69
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	751.993.344	540.924.014	71,93	S	28,07
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.919.661.932	1.593.871.882	83,03	T	16,97
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	309.150.000	149.017.271	48,20	SR	51,80



SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	%		
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	18.341.688.286	15.260.291.538	83,20	T	16,80
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	170.963.313	119.553.724	69,93	S	30,07
	Program Pengelolaan Arsip	204.902.914	201.531.992	98,35	ST	1,65
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	98.090.678	96.108.205	97,98	ST	2,02
	Program Pendaftaran Penduduk	1.985.206.400	1.360.056.310	68,51	S	31,49
	Program Pencatatan Sipil	697.088.400	563.290.572	80,81	T	19,19
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.052.570.900	206.995.418	19,67	SR	80,33
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	58.562.300	22.712.142	38,78	SR	61,22

Berdasarkan tabel 58 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 19 dinilai sudah sangat tinggi.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 19, yaitu Meningkatnya kualitas layanan publik telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 58 di atas. Dari 14 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 4 program dengan capaian kinerja “Sangat



Tinggi”, 3 program dengan capaian kinerja “Tinggi” , 4 program dengan capaian kinerja “Sedang”, dan 3 program dengan capaian kinerja “Sangat Redah”.

### **19.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 19 tahun 2021 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 59 di bawah ini:

Tabel 59

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 19 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target RPJMD
	2019	2020	2021	
Indeks penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik (SPBE)	2,36	2,03	2,27	2,40
Indeks kepuasan masyarakat	88,74	85,00	89,18	95,00



**19.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

**a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Komitmen yang kuat dari pimpinan untuk selalu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

**b. Permasalahan dan hambatan**

- Beberapa kewenangan dalam pelayanan masih bergantung pada Pemerintah Pusat sehingga belum mampu dilaksanakan semaksimal mungkin seperti penerbitan perizinan tertentu.

**c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 

**20. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama**

**20.1. Realisasi kinerja tahun 2021**

Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 5 yaitu “Meningkatnya tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya dan demokratis”. Kehidupan sosial beragama merupakan permasalahan penting dalam meningkatkan keharmonisan dalam masyarakat yang berpengaruh pada tingkat produktivitas kehidupan masyarakat. Permasalahan kehidupan sosial beragama harus terus dikembangkan demi keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 2 indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatnya kualitas kehidupan social beragama”, 2 indikator yang ada dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”, secara rata-rata capaian dikinerja mencapai 100%. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis 20 dapat dilihat pada tabel 60.



Tabel 60  
Capaian kinerja sasaran strategis 20

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
1. Cakupan konflik SARA yang ditangani	100	100	100	ST
2. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,00205	0,00205	100	ST
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>100</b>	<b>ST</b>

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 20, dapat dilihat pada tabel 61 di bawah ini:

Tabel 61  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 20

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	%		
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama	Program Pengembangan Kebudayaan	3.436.013.863	3.236.997.788	94,21	Sangat Tinggi	5,79
	Program Pembinaan Sejarah	43.999.228	43.864.228	99,69	Sangat Tinggi	0,31
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	2.234.665.584	1.176.953.969	52,67	Rendah	47,33
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	462.488.368	423.577.321	91,59	Sangat Tinggi	8,41
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	759.112.206	743.719.948	97,97	Sangat Tinggi	2,03
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	336.675.974	306.881.861	91,15	Sangat Tinggi	8,85





SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	%		
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	392.642.761	381.032.442	97,04	Sangat Tinggi	2,96
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	326.476.217	325.245.450	99,62	Sangat Tinggi	0,38

Berdasarkan tabel 61 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 20 dinilai sudah sangat tinggi.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 20, yaitu Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 61 di atas. Dari 8 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 7 program dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi” dan 1 program dengan capaian kinerja “Rendah”.

**20.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan



sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 20 tahun 2020 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 58 di bawah ini:

Tabel 62

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 20 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target RPJMD
	2019	2020	2021	
Cakupan konflik SARA yang ditangani	100	100	100	100
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,00205	0,28491	0,00205	0,00199

### 20.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

#### a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- Kesadaran masyarakat akan pentingnya keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama sudah sangat tinggi.

#### b. Permasalahan dan hambatan

- Semakin kuatnya arus informasi seiring dengan perkembangan teknologi informasi menyebabkan isu-isu intoleransi dalam masyarakat semakin sulit untuk dibendung.

#### c. Solusi/upaya pemecahan masalah

- Pemerintah bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama terus menggalakkan kegiatan bersama dalam rangka terus memupuk kebersamaan dalam keberagaman.



## 21. Meningkatnya ketentraman masyarakat

### 21.1. Realisasi kinerja tahun 2021

Meningkatnya ketentraman masyarakat merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 6 yaitu “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat”. Ketentraman dan keamanan merupakan permasalahan penting dalam meningkatkan keharmonisan dalam masyarakat yang berpengaruh pada tingkat produktivitas kehidupan masyarakat. Permasalahan budaya dan kehidupan masyarakat harus terus dikembangkan demi keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 1 indikator kinerja dari sasaran strategis “Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban sosial dan stabilitas politik”, 1 indikator yang ada dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”, secara rata-rata capaian dikinerja mencapai 92,95%. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis kedua belas dapat dilihat pada tabel 63.

Tabel 63  
Capaian kinerja sasaran strategis 21

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
Indeks ketentraman masyarakat (IKM)	91,45	85	92,95	ST
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>92,95</b>	<b>ST</b>

#### a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 21, dapat dilihat pada tabel 64 di bawah ini:

Tabel 64  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 21

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	%		
Meningkatnya ketentraman masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	1.894.749.650	1.861.449.031	98,24	ST	1,76



	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	943.009.737	892.143.749	94,61	ST	5,39
--	---	-------------	-------------	-------	----	------

Berdasarkan tabel 64 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, dan secara kinerja pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 21 dinilai sudah sangat tinggi.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 21, yaitu meningkatnya ketentraman masyarakat telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 64 di atas. Dari 2 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan capaian kinerja sangat tinggi.

**21.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja



sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 21 tahun 2021 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 32 di bawah ini:

Tabel 65  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 21 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target RPJMD
	2019	2020	2021	
Indeks ketentraman masyarakat (IKM)	89,80	83,57	85	93,10

### 21.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

#### a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- Komitmen dalam mewujudkan sanggau tentram sudah melekat dalam masyarakat Kabupaten Sanggau.

#### b. Permasalahan dan hambatan

- Segala bentuk penegakkan hukum baik Perda maupun Perkada harus selalu diikuti dengan solusi pemecahan masalah, pelanggaran Perda dan Perkada sering terjadi pada sektor perdagangan, perlu anggaran yang cukup besar dalam menertibkan pedagang terkait relokasi ke tempat yang layak.

#### c. Solusi/upaya pemecahan masalah

- Memperkuat kerjasama dengan Pemerintah Pusat dalam pembangunan pasar yang layak bagi pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran.

## 22. Meningkatnya ketertiban umum

### 22.1. Realisasi kinerja tahun 2021

Meningkatnya ketertiban umum merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 6 yaitu “Meningkatnya ketentraman dan



ketertiban masyarakat”. Meningkatkan ketertiban masyarakat yang berpengaruh pada tingkat produktivitas kehidupan masyarakat. Ketertiban masyarakat harus dijaga dalam rangka mendorong sanggau tertib.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 1 indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatnya ketertiban umum”, 1 indikator yang ada dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”, secara rata-rata capaian dikinerja mencapai 94,12%. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis kedua belas dapat dilihat pada tabel 66.

Tabel 66  
Capaian kinerja sasaran strategis 22

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>	<b>KET</b>
Indeks ketertiban umum (IKU)	85,00	80,00	94,12	ST
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>94,12</b>	<b>ST</b>

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 22, dapat dilihat pada tabel 67 di bawah ini:

Tabel 67  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 22

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>			<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>TINGKAT EFISIENSI</b>
		<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>		
Meningkatnya ketertiban umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.066.908.660	1.946.318.645	94,17	ST	5,83

Berdasarkan tabel 67 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin,



dan secara kinerja, pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 22 dinilai sudah sangat tinggi.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 22, telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 67 di atas. Dari 1 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 1 program dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

**22.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 22 tahun 2021 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 68 di bawah ini:



Tabel 68  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 22 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Trget RPJMD
	2019	2020	2021	
Indeks ketertiban umum (IKU)	78,50	86,20	80,00	95,00

### **22.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

#### **a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Komitmen dalam mewujudkan sanggau tertib yang merupakan salah satu dari 7 brand image Kabupaten Sanggau sudah melekat dalam masyarakat Kabupaten Sanggau.

#### **b. Permasalahan dan hambatan**

- Segala bentuk penegakkan hukum baik Perda maupun Perkada harus selalu diikuti dengan solusi pemecahan masalah.

#### **c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Mengoptimalkan dan melibatkan aparatur dan stakeholder serta di perkuat dengan adanya sosialisasi tentang ketertiban umum.

### **23. Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan dan ketanggapdaruratan bencana**

#### **23.1. Realisasi kinerja tahun 2021**

Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan dan ketanggapdaruratan bencana merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 6 yaitu “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat”. Kesiapsiagaan dan ketanggapdaruratan bencana merupakan permasalahan penting dalam meningkatkan keamanan dalam masyarakat yang berpengaruh pada tingkat produktivitas kehidupan masyarakat. Permasalahan bencana harus terus diantisipasi demi terjaminnya kewanaman masyarakat.





Secara umum hasil pengukuran terhadap 1 indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatnya kualitas kesiapsiagaan dan ketanggaptaruratan bencana”, 1 indikator yang ada dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”, secara rata-rata capaian dikinerja mencapai 100%. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis kedua belas dapat dilihat pada tabel 69.

Tabel 69  
Capaian kinerja sasaran strategis 23

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
Persentase penanganan bencana daerah	100	100	100	ST
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>ST</b>

#### c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 23, dapat dilihat pada tabel 70 di bawah ini:

Tabel 70  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 23

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	%		
Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan dan ketanggaptaruratan bencana	Program Penanggulangan Bencana	1.894.749.650	1.861.449.031	98,24	ST	1,76

Berdasarkan tabel 70 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, dan secara kinerja pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 23 dinilai sudah sangat tinggi.

#### d. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 23, yaitu Meningkatkan kualitas kesiapsiagaan



dan ketanggapdaruratan bencana telah ditetapkan program prioritas seperti tergambar pada tabel 70 di atas. Dari 1 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 1 program dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

### **23.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 23 tahun 2021 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 71 di bawah ini:

Tabel 71

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 23 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Trget RPJMD
	2018	2019	2020	
Persentase penanganan bencana daerah	100	100	100	100



**23.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

**d. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Kesadaran masyarakat akan bahaya bencana sudah sangat tinggi.

**e. Permasalahan dan hambatan**

- Sumber daya masih terbatas baik personel maupun sarana prasarana diperparah dengan daerah jangkauan pelayanan yang luas.

**f. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Mengoptimalkan dan melibatkan aparatur yang ada di kecamatan serta di perkuat dengan sarana dan prasarana yang memadai.

**24. Meningkatnya kemandirian desa**

**24.1. Realisasi kinerja tahun 2021**

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 7 yaitu “Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan”. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan permasalahan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berpengaruh pada tingkat produktivitas kehidupan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat harus terus dikembangkan demi terwujudnya pemerataan pembangunan.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 3 indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatnya kemandirian desa”, 3 indikator yang ada dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”, secara rata-rata capaian dikinerja mencapai 108,90%. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis 24 dapat dilihat pada tabel 72.



Tabel 72  
Capaian kinerja sasaran strategis 24

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISAS I	CAPAIAN (%)	KET
Indeks Ketahanan Sosial	0,784	0,777	99,07	ST
Indeks Ketahanan Ekonomi	0,531	0,567	106,80	ST
Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan	0,672	0,812	120,83	ST
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>108,90</b>	<b>ST</b>

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 24, dapat dilihat pada tabel 73 di bawah ini:

Tabel 73  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 24

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	%		
Meningkatnya kemandirian desa	Program Penataan Desa	210.748.264	167.113.667	79,30	T	20,70
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	118.931.204	95.906.123	80,64	T	19,36
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	440.441.615	374.800.672	85,10	T	14,90

Berdasarkan tabel 73 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, dan secara kinerja pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 24 dinilai sudah tinggi.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 24, yaitu Meningkatkan kemandirian desa telah



ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 73 di atas. Dari 3 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 3 program dengan capaian kinerja “Tinggi”.

#### **24.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 24 tahun 2021 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 74 di bawah ini:

Tabel 74

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 24 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target RPJMD
	2019	2020	2021	
Indeks Ketahanan Sosial	0,7315	0,7623	0,777	0,8159
Indeks Ketahanan Ekonomi	0,4959	0,5168	0,567	0,5531
Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan	0,6270	0,6534	0,812	0,6994



**24.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

**a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Pemerintahan Desa yang semakin mandiri dalam proses perencanaan dan pemanfaatan anggaran desa dengan sebaik-baiknya.

**b. Permasalahan dan hambatan**

- Kondisi geografis yang luas menghambat upaya pembinaan sehingga belum mampu berjalan secara optimal.

**c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Memaksimalkan peran aparaturnya kecamatan dalam membina pemerintahan desa agar lebih baik.

**25. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa**

**25.1. Realisasi kinerja tahun 2021**

Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 7 yaitu “Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan”. Manajemen pemerintahan desa merupakan permasalahan penting dalam meningkatkan pelayanan masyarakat desa yang berpengaruh pada tingkat tingkat kepuasan masyarakat. Manajemen pemerintahan desa harus terus dibina demi terwujudnya pemerataan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 1 indikator kinerja dari sasaran strategis “Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa”, 1 indikator yang ada dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”, secara rata-rata capaian dikinerja mencapai 95,80%. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis kedua belas dapat dilihat pada tabel 71.



Tabel 75  
Capaian kinerja sasaran strategis 24

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
Persentase tata kelola pemerintahan desa yang baik	75,50	74,00	98,01	ST
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>			<b>95,80</b>	<b>ST</b>

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 25, dapat dilihat pada tabel 76 di bawah ini:

Tabel 76  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 25

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	%		
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	537.909.502	386.237.528	71,80	S	28,20
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.248.653.990	2.241.816.710	99,70	ST	0,30

Berdasarkan tabel 76 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 25 dinilai sudah sangat tinggi.



**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 25, yaitu Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan desa telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 76 di atas. Dari 2 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 1 program dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi” dan 1 program dengan capaian kinerja “Sedang”.

**25.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 25 tahun 2021 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 77 di bawah ini:





Tabel 77

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 25 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	REALISASI			Target RPJMD
	2019	2020	2021	
Persentase tata kelola pemerintahan yang baik	59	68	74	100

**25.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

**a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Alokasi anggaran yang besar dalam mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa

**b. Permasalahan dan hambatan**

- Sistem pemerintahan yang secara berlahan berbasisi teknologi informasi belum mampu diterapkan secara maksimal

**c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Melakukan sosialisasi dan pendampingan secara maksimal kepada Pemerintahan Desa dalam menyesuaikan terhadap berbagai macam perubahan.



## **BAB III**

# **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

### **DASAR HUKUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Dasar hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, terdiri atas:

1. Dilaksanakan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor



156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

## **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DI DAERAH**

Tugas Pembantuan (TP) adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan. Kegiatan Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta kegiatan fisik lain yang menambah nilai aset pemerintah.

Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas Pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya. Termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup



sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota.

Tujuan pemberian Tugas Pembantuan ini untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta penyelenggaraan pemerintah dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Penyaluran Dana Tugas Pembantuan dilakukan melalui rekening Kas Umum Negara. DIPA yang telah disahkan disampaikan kepada Perangkat Daerah penerima dana Tugas Pembantuan sebagai dasar dalam penerbitan SPM. Penerbitan SPM oleh Perangkat Daerah selaku KPA didasarkan pada alokasi dana yang tersedia dalam DIPA.

## **6.1 TUGAS PEMBANTUAN PUSAT**

Tidak ada tugas pembantuan pusat yang diterima pada tahun 2021.

## **6.2 TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI**

Pada Tahun 2021 Kabupaten Sanggau menerima dana Tugas Pembantuan dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan barat sebesar **Rp 6.889.147.000** yang dikelola oleh **Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perikanan Kabupaten Sanggau.**

Dasar pelaksanaan penugasan Tugas Pembantuan:

- 018.11.3.139021/2021 (23 November 2020, Revisi-06 Tanggal 29 September 2021)
- DIPA-018.03.4.139125/2021 (23 November 2020, Revisi-08 Tgl. 19 November 2021)
- DIPA-018.04.4.139126/2021 (Refocusing 2 tgl 16 Februari 2021)



## a. TARGET KINERJA

Target kinerja Tugas Pembantuan melalui Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau.

## b. REALISASI

### PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT & RINCIAN KEGIATAN

#### 1. BIDANG KETAHANAN PANGAN

- 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
<b>Program Ketersediaan , Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>	<b>407.648.000</b>	<b>405.966.062</b>	<b>99,59</b>
<b>Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan</b>	<b>28.460.000</b>	<b>28.460.000</b>	<b>100</b>
Penyusunan FSVA Kab. Sanggau	28.460.000	28.460.000	100
<b>Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan</b>	<b>358.544.000</b>	<b>358.532.467</b>	<b>100</b>
Pendampingan P2L Kab. Sanggau (3 Kelompok)	73.872.000	73.867.052	99,99
Pendampingan P2L Kab. Sanggau Stunting (4 Klp)	284.672.000	284.665.415	100
<b>Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan</b>	<b>20.644.000</b>	<b>18.973.595</b>	<b>91,91</b>
Manajemen dan Administrasi Kelembagaan Ketahanan Pangan Kab. Sanggau	20.644.000	18.973.595	91,91

Serapan anggaran Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021 di Bidang Ketahanan Pangan melalui Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas adalah sebesar Rp 405.966.062,- atau



jika diprosentase adalah sebesar 99,59% dari total anggaran pada bidang tanaman pangan sebesar Rp **407.648.000**, yang terbagi dalam 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

**a. Pemantapan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan**

Dengan *Output* kegiatan Penyusunan FSVA Kabupaten Sanggau dengan realisasi 100 %.

**b. Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**

Dengan *Output* kegiatan terlaksananya Pendampingan P2L Kab. Sanggau (3 Kelompok di Kecamatan Tayan Hulu, Kecamatan Balai, Kecamatan Kembayan) dengan realisasi 99,99% serta Pendampingan P2L Kabupaten Sanggau Stunting (4 Kelompok di Kecamatan Beduai, Kecamatan Toba, Kecamatan Kembayan, Kecamatan Kapuas) dengan realisasi 100%.

Termanfaatnya lahan pekarangan untuk tahap pengembangan 3 kelompok dan tahap penumbuhan (stunting) 4 kelompok.

**c. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan**

Dengan *Output* kegiatan terlaksananya Manajemen dan Administrasi Kelembagaan Ketahanan Pangan Kabupaten Sanggau dengan realisasi 91,91%.

**2. BIDANG TANAMAN PANGAN**

**1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia.**

<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>	<b>%</b>
<b>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>	<b>3.933.650.000</b>	<b>3.916.422.380</b>	<b>99,56</b>
<b>Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia</b>	<b>3.874.250.000</b>	<b>3.873.661.000</b>	<b>99,98</b>



Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi	23.200.000	23.073.000	99,45
Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (PEN)	31.000.000	30.538.000	98,51
<b>Sarana Pengembangan Kawasan Padi</b>	<b>3.820.050.000</b>	<b>3.820.050.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Penyaluran Sarana Produksi Budidaya Padi Khusus</b>	<b>209.250.000</b>	<b>209.250.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Bantuan Budidaya Padi Khusus</b>	<b>209.250.000</b>	<b>209.250.000</b>	<b>100,00</b>
Bantuan Benih Padi (25 kg/ha) di provinsi	56.250.000	56.250.000	100,00
Bantuan Pupuk NPK Non Subsidi (100 kg/ha) di provinsi	123.000.000	123.000.000	100,00
Bantuan Pestisida (1 Pkt/ha) Kab. Sambas	30.000.000	30.000.000	100,00
<b>Penyaluran Sarana Produksi Budidaya Padi Lahan Kering</b>	<b>3.610.800.000</b>	<b>3.610.800.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Bantuan Budidaya Padi Lahan Kering</b>	<b>3.610.800.000</b>	<b>3.610.800.000</b>	<b>100,00</b>
Bantuan Benih Padi (40 kg/ha) di provinsi	1.115.100.000	1.115.100.000	100,00
Bantuan NPK Non Subsidi (100 kg/ha) di provinsi	2.177.100.000	2.177.100.000	100,00
Bantuan Herbisida (2 liter/ha) di provinsi	318.600.000	318.600.000	100,00
<b>Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan</b>	<b>31.300.000</b>	<b>18.699.000</b>	<b>59,74</b>
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>28.100.000</b>	<b>24.062.380</b>	<b>85,63</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	28.100.000	24.062.380	85,63

Serapan anggaran Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021 di Bidang Tanaman Pangan melalui Program Ketersediaan, Akses



dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal adalah sebesar Rp **3.916.422.380,-** atau jika dipresentase adalah sebesar 99,56% dari total anggaran pada bidang tanaman pangan sebesar Rp **3.916.422.380** yang terbagi dalam 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

**a. Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal**

Dengan *Output* kegiatan:

- Sarana Pengembangan Kawasan Padi dengan realisasi 100%.
- Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi dengan realisasi 100%.

**b. Bantuan Budidaya Padi Lahan Kering**

Dengan *Output* kegiatan:

- Bantuan Benih Padi (40 kg/ha) di provinsi dengan realisasi 100%.
- Bantuan NPK Non Subsidi (100 kg/ha) di provinsi dengan realisasi 100%.
- Bantuan Herbisida (2 liter/ha) di provinsi dengan realisasi 100%.

**c. Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan**

Dengan *Output* kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan dengan realisasi 59,74.

**d. Program Dukungan Manajemen**

Dengan *Output* kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan dengan realisasi 85,63%.

**2) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian.**

<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>	<b>%</b>
<b>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>	<b>1.896.160.000</b>	<b>1.889.134.600</b>	<b>99,63</b>





<b>Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian</b>	<b>1.470.000.000</b>	<b>1.470.000.000</b>	<b>100,00</b>
Pembangunan Embung Pertanian mendukung TP	120.000.000	120.000.000	100,00
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)	1.350.000.000	1.350.000.000	100,00
<b>Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian</b>	<b>63.100.000</b>	<b>63.100.000</b>	<b>100,00</b>
Persiapan Optimasi Lahan	63.100.000	63.100.000	100,00
<b>Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100,00</b>
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Alat dan Mesin Pertanian	15.000.000	15.000.000	100,00
<b>Fasilitasi Pupuk dan Pestisida</b>	<b>320.025.000</b>	<b>320.004.000</b>	<b>99,99</b>
Penyusunan e-RDKK untuk pendataan penerima pupuk bersubsidi	203.875.000	203.863.000	99,99
Pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi	116.150.000	116.141.000	99,99
<b>Fasilitasi Pembiayaan Pertanian</b>	<b>28.035.000</b>	<b>21.030.600</b>	<b>75,02</b>
Persiapan pelaksanaan kegiatan asuransi pertanian	28.035.000	21.030.600	75,02
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>84.500.000</b>	<b>78.478.500</b>	<b>92,87</b>
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Prasarana	84.500.000	78.478.500	92,87

Serapan anggaran Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021 di Bidang Tanaman Pangan melalui Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian adalah sebesar Rp **1.896.160.000,-** atau jika dipresentase adalah sebesar 99,63% dari total anggaran pada



bidang tanaman pangan sebesar Rp **1.889.134.600** yang terbagi dalam 6 (Enam) kegiatan, yaitu:

**a. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian.**

Dengan *Output* kegiatan:

- Pembangunan Embung Pertanian mendukung TP dengan realisasi 100%.
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) dengan realisasi 100%.

**b. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian**

Dengan *Output* kegiatan:

- Persiapan Optimasi Lahan dengan realisasi 100%.

**c. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian**

Dengan *Output* kegiatan:

- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Alat dan Mesin Pertanian dengan realisasi 100%.

**d. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida**

Dengan *Output* kegiatan:

- Penyusunan e-RDKK untuk pendataan penerima pupuk bersubsidi dengan realisasi 99,99%.
- Pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima pupuk bersubsidi dengan realisasi 99,99%.

**e. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian**

Dengan *Output* kegiatan:

- Persiapan pelaksanaan kegiatan asuransi pertanian dengan realisasi 75,02%.

**f. Program Dukungan Manajemen**

Dengan *Output* kegiatan:

- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Prasarana dengan realisasi 92,87%.



### 3. BIDANG HORTIKULTURA.

#### 1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>	<b>561.339.000</b>	<b>560.483.000</b>	<b>99,85</b>
Persiapan	2.280.000	2.280.000	100
Fasilitas Bantuan	270.500.000	270.122.000	99,86
Pendampingan dan Pengawasan	1.140.000	1.140.000	100
<b>Peningkatan Produksi dan Tanaman Obat</b>	<b>287.419.000</b>	<b>286.941.000</b>	<b>99,83</b>
<b>Kawasan Bawang Merah</b>	<b>94.817.000</b>	<b>94.614.500</b>	<b>99,79</b>
Persiapan	3.842.000	3.767.000	98,05
Fasilitas Batuan Sarana Produksi	90.000.000	89.872.500	99,86
Pendampingan dan Pengawasan	975.000	975.000	100
<b>Kawasan Aneka cabai</b>	<b>4.752.000</b>	<b>4.752.000</b>	<b>100</b>
Persiapan	4.752.000	4.752.000	100
<b>Kawasan Kelengkeng</b>	<b>187.850.000</b>	<b>187.574.500</b>	<b>99,85</b>
Persiapan	4.020.000	3.869.500	96,26
Fasilitas Batuan Sarana Produksi	180.000.000	179.875.000	99,93
Pendampingan dan Pengawasan	3.830.000	3.830.000	100
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>5.850.000</b>	<b>5.846.000</b>	<b>99,93</b>

Serapan anggaran Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021 di Bidang Hortikultura melalui Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri adalah sebesar Rp **567.189.000,-** atau jika dipresentase adalah sebesar 99,85% dari total anggaran pada bidang tanaman pangan sebesar Rp **566.329.000** yang terbagi dalam 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

#### a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Dengan *Output* kegiatan:

- Persiapan dengan realisasi 100%.
- Fasilitas Bantuan dengan realisasi 99,86%.



- Pendampingan dan Pengawasan dengan realisasi 99,86%.

**b. Peningkatan Produksi dan Tanaman Obat**

Dengan *Output* kegiatan:

- Pembangunan Peningkatan Produksi dan Tanaman Obat dengan realisasi 99,83%.

**c. Kawasan Bawang Merah**

Dengan *Output* kegiatan:

- Persiapan dengan realisasi 98,05%.
- Fasilitasi Batuan Sarana Produksi dengan realisasi 99,86%.
- Pendampingan dan Pengawasan dengan realisasi 100%.

**d. Kawasan Aneka cabai**

Dengan *Output* kegiatan:

- Persiapan dengan realisasi 100%.

**e. Kawasan Kelengkeng**

Dengan *Output* kegiatan:

- Persiapan dengan realisasi 99,26%.
- Fasilitasi Batuan Sarana Produksi dengan realisasi 99,93%.
- Pendampingan dan Pengawasan dengan realisasi 100%.

**f. Program Dukungan Manajemen**

Dengan *Output* kegiatan:

- Program Dukungan Manajemen dengan realisasi 99,93%.

### **6.3 PERMASALAHAN DAN KENDALA**

Tidak ada permasalahan yang signifikan dalam melaksanakan Tugas Pembantuan.

### **6.4 SARAN DAN TINDAK LANJUT**

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jumlah pagu yang tersedia dan pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.



## **BAB IV**

# **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

### **10.1 URUSAN PENDIDIKAN**

#### **10.1.1 JENIS PELAYANAN DASAR**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (RI) Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut SPM Pendidikan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.

Standar teknis pelayanan minimal Pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur Pendidikan.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas :

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

2. Pendidikan Dasar

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

3. Pendidikan Kesetaraan



Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

### **10.1.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH**

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Pelayanan SPM Bidang Pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang meliputi :

- a. Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar;
- b. Mutu Pelayanan Dasar;
- c. Pemenuhan SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar oleh Kabupaten/Kota meliputi:
  - 1.1 Pendidikan Anak Usia Dini
  - 1.2 Pendidikan Dasar, meliputi :
    - 1.2.1 Sekolah Dasar
    - 1.2.2 Sekolah Menengah Pertama
  - 1.3 Pendidikan Kesetaraan
2. Mutu Pelayanan Dasar, meliputi :
  - 2.1 Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa
    - 2.1.1 Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini



No	Jenis barang dan volume	Target Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2
1	Buku gambar dalam kondisi baru per peserta didik persemester	-	-
2	1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	-	-

#### 2.1.2 Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Dasar

No	Jenis barang dan volume	Target Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2
1	1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kuriikulum per Peserta Didik per tahun	-	-
2	1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	-	-

#### 2.1.3 Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

No	Jenis barang dan volume	Target Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2
1	1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kuriikulum per Peserta Didik per tahun	-	-
2	1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	-	-

#### 2.1.4 Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan

No	Jenis barang dan volume	Target Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2
1	1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kuriikulum per Peserta Didik per tahun	-	-
2	1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	-	-



## 2.2 Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

### 2.2.1 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini

#### 2.2.1.1 Jenis pendidik dan tenaga kependidikan PAUD

No	Uraian	Target Tenaga Pendidik yang memenuhi SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2
1	Tenaga Pendidik yang bersertifikat atau berijazah PAUD	50%	50%

#### 2.2.1.2 Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD

No	Kualitas Tenaga Pendidik	Target Kualitas Tenaga Pendidik yang memenuhi SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang Pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi	50%	50%
2	Memiliki sertifikat profesi guru Pendidikan anak unia dini	50%	50%

#### 2.2.1.3 Kualitas kepala satuan Pendidikan PAUD

No	Kepala Satuan Pendidikan	Terget Kualitas Kepala Satuan Pendidikan yang memenuhi SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	50%	50%
2	Memiliki sertifikat pendidik	50%	50%
3	Memiliki sertifikat Kepala Sekolah	50%	50%





## 2.2.2 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

### 2.2.2.1 Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan SD

No	Uraian	Target Tenaga Pendidik yang memenuhi SPM (%)	
		Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	80%	80%
2	Memiliki sertifikat pendidik	80%	80%

### 2.2.2.2 Kualitas kepala satuan Pendidikan SD

No	Kepala Satuan Pendidikan	Target Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	80%	80%
2	Memiliki sertifikat pendidik	80%	80%
3	Memiliki surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	80%	80%

### 2.2.2.3 Kualitas tenaga penunjang lainnya SD

No	Tenaga Penunjang Lainnya	Target Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat	80%	80%

## 2.2.3 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama

### 2.2.3.1 Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan SMP

No	Uraian	Target Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	80%	80%
2	Memiliki sertifikat pendidik	80%	80%



### 2.2.3.2 Kualitas kepala satuan Pendidikan SMP

No	Kepala Satuan Pendidikan	Target Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	80%	80%
2	Memiliki sertifikat pendidik	80%	80%
3	Memiliki surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	80%	80%

### 2.2.3.3 Kualitas Tenaga Penunjang lainnya SMP

No	Tenaga Penunjang Lainnya	Target Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat	80%	80%

### 2.2.4 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan

#### 2.2.4.1 Kualitas pendidik (tutor) Kesetaraan

No	Uraian	Target Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	80%	80%

#### 2.2.4.2 Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan

No	Kepala Satuan Pendidikan	Target Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	80%	80%



### 2.2.4.3 Kualitas Tenaga Penunjang Lainnya Pendidikan Kesetaraan

No	Tenaga Penunjang Lainnya	Target Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat	80%	80%

## 10.1.3 Realisasi

2.3 Realisasi Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar oleh Kabupaten/Kota meliputi :

2.3.1 Pendidikan Anak Usia Dini

2.3.2 Pendidikan Dasar, meliputi :

2.3.2.1 Sekolah Dasar

2.3.2.2 Sekolah Menengah Pertama

3.1.3 Pendidikan Kesetaraan

3.2 Mutu Pelayanan Dasar, meliputi :

2.3.2.3 Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa

2.3.2.4 Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini, meliputi :

No	Jenis barang dan volume	Target Penerima SPM %		Realisasi Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Buku gambar dalam kondisi baru per peserta didik per semester	-	-	-	-
2	1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	-	-	-	-



2.3.2.5 Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Dasar,  
meliputi :

No	Jenis barang dan volume	Target Penerima SPM %		Realisasi Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	1 ( satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kuriikulum per Peserta Didik per tahun	-	-	-	-
2	1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	-	-	-	-

2.3.2.6 Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama, meliputi :

No	Jenis barang dan volume	Target Penerima SPM %		Realisasi Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	1 ( satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kuriikulum per Peserta Didik per tahun	-	-	-	-
2	1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	-	-	-	-

2.3.2.7 Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan, meliputi :

No	Jenis barang dan volume	Target Penerima SPM %		Realisasi Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	1 ( satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kuriikulum per Peserta Didik per tahun	-	-	-	-
2	1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	-	-	-	-



3.2.1 Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi :

3.2.1.1 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, terdiri atas :

3.2.1.1.1 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini

3.2.1.1.1 Jenis pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, meliputi:

No	Uraian	Target Penerima SPM %		Realisasi Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Tenaga Pendidik yang bersertifikat atau berijazah PAUD	50 %	50 %	30 %	30 %

3.2.1.1.2 Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Kualitas Tenaga Pendidik PAUD, meliputi:

No	Kualitas Tenaga Pendidik	Target Penerima SPM %		Realisasi Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang Pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi	50 %	50 %	30%	30%
2	Memiliki sertifikat profesi guru Pendidikan anak usia dini	50 %	50 %	20 %	20 %

3.2.2.1.3 Kualitas Kepala Satuan Pendidikan PAUD, meliputi:

No	Kepala Satuan Pendidikan	Target Penerima SPM %		Realisasi Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	50 %	50 %	43%	43%
2	Memiliki sertifikat pendidik	50 %	50 %	43%	43%
3	Memiliki sertifikat Kepala Sekolah	50 %	50 %	43%	43%



3.2.1.1 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar,  
terdiri atas:

3.2.1.1.1 Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan SD

Kualitas Tenaga Pendidik SD, meliputi :

No	Uraian	Target Penerima SPM %		Realisasi Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	80 %	80 %	73 %	73 %
2	Memiliki sertifikat pendidik	80 %	80 %	42 %	42 %

Kualitas Kepala Satuan Pendidikan SD, meliputi:

No	Kepala Satuan Pendidikan	Target Penerima SPM %		Realisasi Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	80 %	80 %	76 %	76 %
2	Memiliki sertifikat pendidik	80 %	80 %	76 %	76 %
3	Memiliki surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	80 %	80 %	76 %	76 %

Kualitas Tenaga Penunjang Lainnya SD, meliputi :

No	Tenaga Penunjang Lainnya	Target Penerima SPM %		Realisasi Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat	80 %	80 %	80 %	80 %



3.2.1.1 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas :

3.2.1.1.1 Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan SMP

Kualitas Tenaga Pendidik SMP, meliputi :

No	Uraian	Target Penerima SPM %		Realisasi Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	80 %	80 %	89 %	89 %
2	Memiliki sertifikat pendidik	80 %	80 %	42 %	42 %

Kualitas Kepala Satuan Pendidikan SMP, meliputi:

No	Kepala Satuan Pendidikan	Target Penerima SPM %		Realisasi Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	80 %	80 %	88 %	88 %
2	Memiliki sertifikat pendidik	80 %	80 %	88 %	88 %
3	Memiliki surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	80 %	80 %	88 %	88 %

Kualitas Tenaga Penunjang Lainnya SMP, meliputi:

No	Tenaga Penunjang Lainnya	Target Penerima SPM %		Realisasi Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat	80 %	80 %	88 %	88

3.2.1.2 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan, terdiri atas :

3.2.1.2.1 Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan



kesetaraan

Kualitas Tenaga Pendidik (Tutor) Kesetaraan,  
meliputi:

No	Uraian	Target Penerima SPM %		Realisasi Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	80 %	80 %	80 %	80 %

Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan,  
meliputi:

No	Kepala Satuan Pendidikan	Target Penerima SPM %		Realisasi Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	100 %	100 %	100 %	100 %

Kualitas Tenaga Penunjang Lainnya  
Pendidikan Kesetaraan, meliputi :

No	Tenaga Penunjang Lainnya	Target Penerima SPM %		Realisasi Penerima SPM %	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1	Paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat	80 %	80 %	80 %	80

#### 10.1.4 Pemenuhan SPM Pendidikan

3.3 Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada  
Pendidikan Anak Usia Dini dengan cara :

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah anak usia 5. s.d. 6 tahun yang sudah tamta} \\ & = \frac{\text{atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini}}{\text{Jumlah anak usia 5. s.d. 6 tahun}} \times 100 \\ & = \frac{5.736}{16.076} \times 100 \\ & = 36,68\% \end{aligned}$$





**Tabel 2.1**

Pencapaian Pemenuhan SPM pada Pendidikan Anak Usia Dini  
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2021

NO	Kecamatan	TK	KB	TPA	SPS	Jumlah	Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun	%
1	Balai	55	256			311	893	34,83
2	Beduai	0	109			109	433	25,17
3	Bonti	18	392			410	813	50,43
4	Entikong	55	20			75	619	12,12
5	Jangkang	17	365			382	876	43,61
6	Kapuas	674	411	12	7	1.104	2.838	38,90
7	Kembayan	137	469			606	1.063	57,01
8	Meliau	100	456			556	1.657	33,55
9	Mukok	59	170			229	690	33,19
10	Noyan	0	27			27	349	7,74
11	Parindu	175	396			571	1.283	44,51
12	Sekayam	135	304		10	439	1.408	31,18
13	Tayan Hilir	71	157			228	1.317	17,31
14	Tayan Hulu	270	138		10	408	1.314	31,05
15	Toba	31	250			281	523	53,73
TOTAL		1.797	3.920	12	27	5.736	16.076	35,68

3.4 Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada Sekolah Dasar dilakukan dengan cara :

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah anak usia 7. s.d. 12 tahun yang sudah tamat} \\ & = \frac{\text{atau sedang belajar di satuan pendidikan Sekolah Dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7. s.d. 12 tahun}} \times 100 \\ & = \frac{47.089}{52.209} \times 100 \\ & = 90.19\% \end{aligned}$$



**Tabel 2.2**

Pencapaian Pemenuhan SPM pada Sekolah Dasar oleh  
Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2021

Jumlah anak pada jenjang usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar (Sekolah Dasar)			Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun	%
No	Kecamatan	Siswa		
1	Kec. Bonti	2.389	2.582	92,53
2	Kec. Entikong	1.682	2.046	82,21
3	Kec. Jangkang	2.581	2.833	91,10
4	Kec. Kapuas	7.849	9.019	87,03
5	Kec. Kembayan	3.146	3.519	89,40
6	Kec. Meliau	4.874	5.459	89,28
7	Kec. Mukok	2.259	2.328	97,04
8	Kec. Noyan	1.114	1.181	94,33
9	Kec. Parindu	3.801	4.294	88,52
10	Kec. Sekayam	3.927	4.506	87,15
11	Kec. Tayan Hilir	3.743	4.157	90,04
12	Kec. Tayan Hulu	3.898	4.353	89,55
13	Kec. Balai	2.581	2.877	89,71
14	Kec. Beduai	1.325	1.393	95,12
15	Kec. Toba	1.920	1.662	115,52
Jumlah Total			52.209	90,19

3.5 Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama dilakukan dengan cara :

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah anak usia 13. s.d. 15 tahun yang sudah tamat atau sedang} \\ & \text{belajar di satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama} \\ = & \frac{\text{Jumlah anak usia 13. s.d. 15 tahun}}{\text{Jumlah anak usia 13. s.d. 15 tahun}} \times 100 \\ = & \frac{19.901}{27.004} \times 100 \\ = & 73,70\% \end{aligned}$$



**Tabel 2.3**

Pencapaian Pemenuhan SPM pada Sekolah Menengah Pertama  
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2021

Jumlah anak pada jenjang usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar (Sekolah Dasar)			Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	%	
No	Kecamatan	Siswa			
1	Kec. Bonti	943	1.328	71,01	
2	Kec. Entikong	789	1.078	73,19	
3	Kec. Jangkang	1.311	1.582	82,87	
4	Kec. Kapuas	3.562	4.630	76,93	
5	Kec. Kembayan	1.432	1.814	78,94	
6	Kec. Meliau	1.698	2.906	58,43	
7	Kec. Mukok	831	1.186	70,07	
8	Kec. Noyan	480	655	73,28	
9	Kec. Parindu	1.696	2.237	75,82	
10	Kec. Sekayam	1.578	2.332	67,67	
11	Kec. Tayan Hilir	1.421	2.050	69,32	
12	Kec. Tayan Hulu	1.659	2.208	75,14	
13	Kec. Balai	1.267	1.480	85,61	
14	Kec. Beduai	564	713	79,10	
15	Kec. Toba	670	805	83,23	
Jumlah Total			19.901	27.004	73,70

3.6 Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan dilakukan dengan cara :

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah anak usia 7 s.d. 18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan kesetaraan} \\ & = \frac{\text{Jumlah anak usia 7 s.d. 18 tahun}}{\text{Jumlah anak usia 7 s.d. 18 tahun}} \times 100 \\ & = \frac{2.714}{51.748} \times 100 \\ & = 5,24\% \end{aligned}$$



**Tabel 2.4**

Pencapaian Pemenuhan SPM pada Pendidikan Kesetaraan oleh  
Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2021

No	Kecamatan	Paket A	Paket B	Paket C	Jumlah	Jumlah Peserta Didik Usia 7-18 Tahun	%
1	Kec. Balai	-	-	-	0	2.808	0,00
2	Kec. Beduai	-	-	-	0	1.461	0,00
3	Kec. Bonti	-	63	108	171	2.693	0,00
4	Kec. Entikong	181	59	40	280	1.900	9,53
5	Kec. Jangkang	144	77	71	292	2.856	5,04
6	Kec. Kapuas	162	310	706	1.178	8.321	1,95
7	Kec. Kembayan	10	39	102	151	3.393	0,29
8	Kec. Meliau	-	-	-	0	5.556	0,00
9	Kec. Mukok	-	-	-	0	2.478	0,00
10	Kec. Noyan	-	-	-	0	1.332	0,00
11	Kec. Parindu	-	-	-	0	4.130	0,00
12	Kec. Sekayam	215	108	152	475	4.332	4,96
13	Kec. Tayan Hilir	-	-	-	0	4.068	0,00
14	Kec. Tayan Hulu	8	39	120	167	4.298	0,19
15	Kec. Toba	-	-	-	0	2.122	0,00
Jumlah Total		720		1.299	2.714	51.748	5,24

Dengan demikian, maka capaian penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021 di Kabupaten Sanggau sebagai berikut :

**Tabel 2.5**

Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Perhitungan Capaian	Capaian (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan anak usia dini (PAUD)	$= \frac{5.736}{16.076} = 100$	35,68
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI/SMP/MTs)	$= \frac{67.200}{79.214} = 100$	84,83
	Sekolah Dasar (SD)	Jumlah warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI)	$= \frac{47.089}{52.209} = 100$	90,19



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Perhitungan Capaian	Capaian (%)
	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	$= \frac{19.901}{27.004} = 100$	73,70
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	$= \frac{2.714}{51.748} = 100$	5,24

### 10.1.5 Alokasi Anggaran

Dalam rangka menunjang penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan tahun 2021, terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang dikhususkan untuk SPM Bidang Pendidikan, yaitu Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar dan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama, akan tetapi ada komponen sub kegiatan yang mendukung penyelenggaraan SPM sebagai berikut:

**Tabel 2.6**

Alokasi Anggaran Tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kab.Sanggau

No.	Program dan Kegiatan	Platform Anggaran (Rp)		Bidang Penanggungjawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	120.761.851.271	139.418.930.093	
2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	79.698.046.013	93.395.059.327	Bidang SD
3.	Penambahan Ruang Kelas Baru	2.395.264.004	2.395.264.004	Bidang SD
4.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	432.318.600	432.318.600	Bidang SD
5.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	293.392.068	293.392.068	Bidang SD



No.	Program dan Kegiatan	Platform Anggaran (Rp)		Bidang Penanggungjawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
6.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	3.204.483.570	3.204.483.570	Bidang SD
7.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.443.570.496	1.443.570.496	Bidang SD
8.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	630.759.645	630.759.645	Bidang SD
9.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	11.205.661.100	11.205.661.100	Bidang SD
10.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.290.768.800	1.290.768.800	Bidang SD
11.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	626.694.000	626.694.000	Bidang SD
12.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	190.213.055	190.213.055	Bidang SD
13.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	843.569.784	843.569.784	Bidang SD
14.	Pengadaan Mebel Sekolah	1.543.469.400	1.543.469.400	Bidang SD
15.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	65.218.232	65.218.232	Bidang SD
16.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	380.528.416	348.978.416	Bidang SD
17.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	8.139.849.668	8.139.849.668	Bidang SD
18.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	453.909.980	453.909.980	Bidang SD
19.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	103.238.900	123.263.920	Bidang SD



No.	Program dan Kegiatan	Platform Anggaran (Rp)		Bidang Penanggungjawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
20.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	46.455.136.295	60.163.674.589	Bidang SD
21.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	30.950.534.094	35.910.599.602	Bidang SMP
22.	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.014.978.417	1.014.978.417	Bidang SMP
23.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	647.175.110	647.175.110	Bidang SMP
24.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.805.406.294	3.805.406.294	Bidang SMP
25.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	321.209.000	321.209.000	Bidang SMP
26.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	98.524.000	98.524.000	Bidang SMP
27.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	320.201.000	320.201.000	Bidang SMP
28.	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	219.125.863	219.125.863	Bidang SMP
29.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	517.180.459	517.180.459	Bidang SMP
30.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	333.358.200	333.358.200	Bidang SMP
31.	Pengadaan Mebel Sekolah	408.256.200	408.256.200	Bidang SMP
32.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	69.424.236	69.419.517	Bidang SMP
33.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	72.517.856	72.517.856	Bidang SMP
34.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	416.737.256	352.419.856	Bidang SMP
35.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.832.630.584	3.832.630.584	Bidang SMP



No.	Program dan Kegiatan	Platform Anggaran (Rp)		Bidang Penanggungjawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
36.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	149.971.245	149.971.245	Bidang SMP
37.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	18.668.651.374	23.693.039.001	Bidang SMP
38.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	55.187.000	55.187.000	Bidang SMP
39.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.324.526.962	7.324.526.962	Bidang PAUDNI
40.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.537.138.454	1.537.138.454	Bidang PAUDNI
41.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	386.537.300	386.537.300	Bidang PAUDNI
42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	117.345.428	117.345.428	Bidang PAUDNI
43.	Pengadaan Perlengkapan PAUD	99.957.500	99.957.500	Bidang PAUDNI
44.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	126.606.500	126.606.500	Bidang PAUDNI
45.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.431.781.780	1.431.781.780	Bidang PAUDNI
46.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	170.000.000	170.000.000	Bidang PAUDNI
47.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.431.400.000	3.431.400.000	Bidang PAUDNI
48.	Pemeliharaan Mebel Sekolah	23.760.000	23.760.000	Bidang PAUDNI
49.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.788.744.202	2.788.744.202	Bidang PAUDNI
50.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	199.971.600	199.971.600	Bidang PAUDNI
51.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	199.999.402	199.999.402	Bidang PAUDNI





No.	Program dan Kegiatan	Platform Anggaran (Rp)		Bidang Penanggungjawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
52.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Pendidikan Guru Nonformal/Kesetaraan	199.973.200	199.973.200	Bidang PAUDNI
53.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.188.800.000	2.188.800.000	Bidang PAUDNI

### 10.1.6 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7**

Jumlah Tenaga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Sanggau Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian

NO	JENIS KELAMIN	TINGKAT PENDIDIKAN									STATUS KEPEGAWAIAN		
		S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	TOTAL	PNS	NON PNS	TOTAL
1.	Laki-Laki	11	49	3	6	0	24	2	2	97	97	26	123
2.	Perempuan	0	17	0	0	0	13	0	0	30	30	12	42
JUMLAH										127	127	38	165

### 10.1.7 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi terkait penerapan dan capaian indikator SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Kurangnya kegiatan khusus yang menangani masalah SPM	Perlu dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk



		penyelenggaraan SPM Pendidikan
2.	Munculnya pandemi Covid-19 yang berakibat pada menurunnya jumlah Peserta Didik	Perlu dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khusus yang berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang tidak terduga.

## 10.2 URUSAN KESEHATAN

### 10.2.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (RI) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten / Kota terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;



- h. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- i. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- j. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- k. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Yang bersifat peningkatan / promotif dan pencegahan/ preventif.

Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif sebagaimana dimaksud mencakup :

- a. Peningkatan kesehatan;
- b. Perlindungan spesifik;
- c. Diagnosis dini dan pengobatan tepat
- d. Pencegahan kecacatan; dan
- e. Rehabilitasi

Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun swasta.

Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.

Selain oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan.

### **10.2.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH**

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian Standar Pelayanan



Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2021 Bidang Kesehatan sesuai dengan batas waktu pencapaian SPM secara Nasional serta realisasi Semester II (Dua) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.8**  
Indikator, Nilai SPM, Tahun Pencapaian dan Realisasi

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Tahun Pencapaian	Capaian Penerima Layanan Dasar		
		Indikator	Target/ Nilai (%)		Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2021	9.037	7.684	85,03 %
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2021	8.624	7.055	81,81 %
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2021	7.913	6.771	85,57 %
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2021	35.679	24.589	68,92 %
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2021	7.746	1.298	16,76 %
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang	100%	2021	302.645	13.616	4,50 %



No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Tahun Pencapaian	Capaian Penerima Layanan Dasar		
		Indikator	Target/ Nilai (%)		Target	Realisasi	Capaian
	produktif	mendapatkan layanan kesehatan					
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2021	1.374	631	45,92 %
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2021	12.902	5.000	38,75 %
9.	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah Warga Negara Penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2021	4.330	1.067	24,64 %
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	2021	979	477	48,72 %
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosi s	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan	100%	2021	5.467	3.226	59,01 %



No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Tahun Pencapaian	Capaian Penerima Layanan Dasar		
		Indikator	Target/ Nilai (%)		Target	Realisasi	Capaian
		kesehatan					
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ).	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	2021	11.000	3.968	36,07 %

Sumber Data : Bidang P2P dan Bidang Kesmas

### 10.2.3 Alokasi Anggaran

Dalam rangka menunjang penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 162.808.132.809 untuk 1 (Satu) Program dengan 1 (Satu) Kegiatan, rincian plafon anggaran dan realisasi sebagai berikut:



**Tabel 2.9**  
Alokasi Anggaran Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kab.Sanggau

No.	Program dan Kegiatan	Plafond Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>162.808.132.809</b>	<b>131.230.745.476</b>
	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>82.026.556.285</b>	<b>58.234.550.796</b>
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	246.989.798	172.326.335
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.861.522.000	885.358.297
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	437.397.815	-
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	112.111.966	77.708.550
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	129.100.000	-
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	148.482.236	113.810.907
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	11.151.984	11.062.150
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	19.064.022	17.752.922
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	19.639.118	19.446.392
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	55.188.773	45.435.670
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	134.828.391	124.148.368
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	88.182.952	69.078.685
	Total	4.263.659.055	1.536.128.276

Sumber Data: Sub Bagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja dan Sub Bagian Keuangan dan Aset.



#### **10.2.4 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi terkait penerapan dan capaian indikator SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

1. Masih ada ibu hamil yang tidak mendapatkan akses pemeriksaan ke Bidan/Faskes
2. Kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya pemeriksaan pada masa kehamilan.
3. Masih rendahnya ibu yang memanfaatkan Jampersal untuk melahirkan ke Fasilitas Kesehatan dan masih ada ibu hamil yang melahirkan dengan Dukun.
4. Kurangnya pengetahuan Ibu Bersalin tentang pentingnya persalinan di Faskes.
5. Karena kriteria standar Pelayanan Bayi terlalu tinggi, sehingga sulit untuk terpenuhi.
6. Karena usia Sekolah Dasar tidak masuk sekolah, sehingga tidak bisa dilakukan Skrining, dan hanya sebagian kecil yang bisa dilakukan skrining
7. Kurangnya tenaga Puskesmas untuk melakukan Skrining Kesehatan.
8. Kurangnya pengetahuan Lansia tentang kesehatan lansia.
9. Kurangnya jumlah Posyandu di Kabupaten Sanggau.
10. Pandemi Covid-19.

Solusi :

1. Pendekatan Akses ibu hamil untuk ke Fasilitas Kesehatan serta penambahan Poskesdes.
2. Penyuluhan Kesehatan tentang pentingnya Pemeriksaan Kesehatan Ibu Hamil.
3. Sosialisasi Jaminan Persalinan.
4. Penguatan Kemitraan Bidan dan Dukun.
5. Penguatan penyuluhan Kesehatan dan Kelas Ibu Hamil.





6. Penguatan skrining pada Sekolah Dasar lebih ditingkatkan lagi
7. Perlu peningkatan keterampilan petugas pengelola Program Balita.
8. Penambahan Tenaga Pengelola Pelayanan Kesehatan Balita dan Pembentukan Kelas Balita.
9. Penyuluhan Kesehatan Lansia masing-masing desa.
10. Pembentukan Posyandu Lansia.
11. Mengoptimalkan Pelayanan Kesehatan di tengah pandemi sesuai dengan Protokol Kesehatan.

#### 10.2.5 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan (Dinas Kesehatan dan Puskesmas) adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.10**  
Jumlah Tenaga Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau  
Dan Jaringan

No.	Dinas /Puskesmas	Tenaga	
		PNS	Non PNS
1	Dinas Kesehatan	58	42
2	Puskesmas Teraju	30	10
3	Puskesmas Meliau	26	8
4	Puskesmas Harapan Makmur	29	4
5	Puskesmas Sanggau	47	21
6	Puskesmas Tj.Sekayam	36	14
7	Puskesmas Belangin III	21	2
8	Puskesmas Kedukul	32	3
9	Puskesmas Balai Sebut	45	24
10	Puskesmas Pusat Damai	52	14
11	Puskesmas Bonti	35	11



No.	Dinas / Puskesmas	Tenaga	
		PNS	Non PNS
12	Puskesmas Tayan	29	9
13	Puskesmas Kembayan	44	6
14	Puskesmas Kp.Kawat	29	4
15	Puskesmas Batang Tarang	32	16
16	Puskesmas Sosok	42	8
17	Puskesmas Beduai	21	11
18	Puskesmas Noyan	24	12
19	Puskesmas Balai Karangan	40	8
20	Puskesmas Entikong	29	11
21	Rumah Sakit Umum Daerah Temenggung Gergaji Balai Karangan	17	62
<b>Jumlah</b>		<b>630</b>	<b>248</b>

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

### 10.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

#### 10.3.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau terdiri dari:

- a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari: persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota.



Penyediaan Pengolahan Air Limbah Domestik (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik) : persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai.

### **10.3.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH**

Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Adapun batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang lingkungan hidup secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

#### **a. Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari**

Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum ditetapkan berdasarkan persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum. Definisi operasional air minum adalah sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum/masak/cuci/mandi, dan lain-lain yaitu leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan, kran umum, hidran umum, terminal Air yang jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja lebih dari 10 meter.

Sumber air terlindung tidak termasuk sumur tak terlindung, air permukaan, mata air tak terlindung, dan lainnya. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan



dan dapat langsung diminum. Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.

Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Terlayani}}{\text{Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten/Kota}} \times 100$$

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021			
			Perhitungan Capaian	Capaian (%)	Perhitungan Capaian	Capaian (%)		
1.	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah rumah tangga terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari <b>(66.574)</b>	X100	46,17	Jumlah rumah tangga terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari <b>(61.536)</b>	X100	42,68
			Jumlah rumah tangga di Kabupaten Kota yang bersangkutan <b>(144.195)</b>			Jumlah rumah tangga di Kabupaten Kota yang bersangkutan <b>(144.195)</b>		



b. Penyediaan Pengolahan Air Limbah Domestik

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik. Pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah rangkaian layanan pengolahan air limbah domestik yang diberikan Pemerintah Daerah, mulai dari sumber sampai aman untuk dilepaskan ke lingkungan.

SPALD Setempat (SPALD-S) adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara. Pelayanan pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Rumah Yang Memiliki Akses Pengolahan Berupa Cubluk Atau Tangki Septik}}{\text{Jumlah Rumah di Wilayah Pengembangan SPALDS Dengan Kepadatan Penduduk Pada Wil. Terbangun <25 jiwa/Ha}} \times 100$$



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021			
			Perhitungan Capaian	(%)	Perhitungan Capaian	(%)		
2.	Penyediaan Pelayanan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik ( <b>72.720</b> )	X100	50,12	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik ( <b>84.539</b> )	X100	58,63
		Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/Ha ( <b>144.195</b> )	Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/Ha ( <b>144.195</b> )					

### 10.3.3 Realisasi Capaian SPM

Capaian SPM Pekerjaan Umum di Kabupaten Sanggau Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

3.1 Realisasi Capaian SPM Pekerjaan Umum Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari – hari

**Tabel 2.11**

Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari Kabupaten Sanggau Tahun 2021

NO.	KECAMATAN	Target	REALISASI		
		Total (Unit Rumah)	TERLAYANI JP	TERLAYANI BJP	BELUM TERLAYANI
			(Unit Rumah)	(Unit Rumah)	(Unit Rumah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KAPUAS	26.386	11.982	630	2.700
2	BONTI	6.894	4.489	236	666
3	JANGKANG	8.252	4.022	211	2.336
4	KEMBAYAN	9.343	4.619	243	1.812
5	NOYAN	3.356	1.860	97	527
6	BEDUAI	3.852	2.380	125	921
7	PARINDU	11.633	6.335	333	1.255



8	TAYAN HULU	10.886	5.831	306	1.202
9	TAYAN HILIR	11.071	5.318	279	961
10	BALAI	8.190	4.578	240	327
11	MELIAU	15.635	6.115	321	4.416
12	TOBA	4.812	1.762	92	873
13	MUKOK	6.595	3.500	184	884
14	SEKAYAM	11.931	5.461	287	1.747
15	ENTIKONG	5.359	2.434	128	323
TOTAL		144.195	55.825	5.711	82.659
PERSENTASE LAYANAN			38,71%	3,96%	57,32%
CAPAIAN (JP + BJP)			42,68%		

Keterangan:

- JP adalah Jaringan Perpipaan
- BJP adalah Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi

Realisasi Capaian SPM Pekerjaan Umum Penyediaan Pelayanan Air Limbah Domestik:

**Tabel 2.12**

Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Penyediaan  
Pelayanan Air Limbah Domestik Kabupaten Sanggau Tahun 2021

No.	Tahun	Rumah Tangga Yang Harus Dilayani	Rumah Tangga Yang Sudah Terlayani	Rumah Tangga Yang Belum Terlayani	Capaian (%) kumulatif tahun sebelumnya	Capaian (%)	Persentase Capaian Mutu kumulatif tahun berjalan
1	2018	131.245	74.657	55.938	56,88	0,50	57,38
2	2019	139.786	74.501	62.975	53,30	0,58	57,96
3	2020	143.950	75.057	65.487	52,14	0,17	58,13
4	2021	144.195	81.839	62.656	52,02	0,21	56,76

#### 10.3.4 Alokasi Anggaran

Selama tahun 2021 sampai dengan semester 2 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja dan SPM yang ingin



dicapai Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau dianggarkan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 14.447.842.253 yang bersumber dari APBD Kab. Sanggau dan APBN (Dana Alokasi Khusus/DAK).

Anggaran tersebut diperuntukan untuk:

- a. Bidang Keciaptakaryaan sebesar Rp. 10.836.612.082,- untuk menunjang kegiatan-kegiatan bidang pekerjaan umum yang menunjang pada pencapaian SPM sub bidang air bersih.
- b. Bidang Keciaptakaryaan sebesar Rp. 3.611.230.17,- untuk menunjang kegiatan-kegiatan bidang pekerjaan umum yang menunjang pada pencapaian SPM sub bidang sanitasi lingkungan.

Untuk rincian anggaran dan realisasi per program kerja dapat dilihat pada tabel di berikut ini :

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.836.612.082	10.805.090.322
II.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.611.230.171	3.605.248.616
	J U M L A H	14.447.842.253	14.410.338.938

### 10.3.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM :

- a. PNS;
- b. Non-PNS.





**Tabel. 2.13**  
PNS dan Non-PNS Pada  
Dinas Perumahan Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan  
Kabupaten Sanggau Tahun 2021

No	Bagian/ Bidang	Pendidikan					PNS/Non PNS	
		S3	S2	S1	DIV	< DIV	PNS	Non-PNS
1.	Sekretariat		3	2	-	12	18	16
2.	Bidang Perkim		1	2	-	-	5	5
3.	Bidang PTB		1	4		2	7	4
4.	Bidang TRP		1	5	-	-	6	3
5.	UPTD Rusun			1			1	4
	Jumlah		6	14	-	14	34	32

#### 10.3.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, masih ada permasalahan baik internal maupun eksternal yang perlu diatasi. Berdasarkan pengamatan maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

a. Internal

- 1) Sumber daya aparatur bidang teknis yang masih kurang dan perlu ditingkatkan keahliannya;
- 2) Belum lengkapnya data base pada masing-masing bidang;
- 3) Masih kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat;
- 4) Masih kurangnya sarana untuk pengujian kualitas hasil pelaksanaan kegiatan;
- 5) Keterbatasan sumber dana; dan
- 6) Perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan infrastruktur mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.



b. Eksternal

- 1) Mempertahankan ketersediaan air baku dampak berkurangnya area terbuka hijau; dan
- 2) Ketidaktertarikan sebagian warga untuk mendapat bantuan sarana prasarana pengolahan air limbah domestik.

**Solusi**

Untuk mengatasi permasalahan internal, ada beberapa solusi yang dapat dilaksanakan, antara lain:

- a. Peningkatan sumber daya aparatur, baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
- b. Pembuatan basis data yang terintegrasi dari masing-masing bidang;
- c. Penyusunan master plan dan kebijakan umum pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dari semua aspek dan bidang.

Sedangkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan eksternal, solusi yang dapat dilaksanakan antara lain:

- a. Peningkatan pengelolaan SPAM dan Sanitasi masyarakat; dan Bekerja sama dengan dinas terkait mengenai sosialisasi pentingnya pengolahan air limbah domestik.

## **10.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT**

### **10.4.1 JENIS PELAYANAN DASAR**

Pelayanan dasar bidang perumahan rakyat merupakan jenis pelayanan publik yang mendasar agar masyarakat mampu menghuni rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor



29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Maka jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau terdiri dari :

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### **10.4.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH**

Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Adapun batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang Perumahan Rakyat secara bertahap sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan.

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan atau pembangunan kembali rumah.

Pembangunan baru dalam kegiatan ini merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana.

Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangun rumah baru yang berada pada lokasi yang sama.



Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dalam hal ini merupakan kegiatan memfasilitasi rumah tangga yang rusak karena bencana, difasilitasi ke rumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada. Adapun cara penghitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100$$

- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

“Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain sempadan jalan kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.

Relokasi perumahan daerah rawan bencana dalam hal ini dapat dilakukan apabila ada Surat Penetapan Bupati /Walikota bahwa daerah tersebut tidak layak untuk perumahan. Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah khusus adalah rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus. Penyediaan rumah khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan/atau rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.



Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Subsidi uang sewa merupakan bantuan uang sewa rumah layak huni yang diberikan kepada masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan} + \text{Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa} + \text{Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100$$

Jenis pelayanan, indikator, dan batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Sanggau adalah sebagaimana tabel berikut:

### 10.4.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021			
			Perhitungan Capaian	(%)	Perhitungan Capaian	(%)		
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n (0)	X100	0,00	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n (0)	X 100	0,00
		Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n (0)	Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n (0)					
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi	Jumlah Warga Negara terkena relokasi akibat program pemerintah	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas			Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas		



masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	daerah kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	penguasaan tanah dan / atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni (0)	X100	0,00	penguasaan tanah dan / atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni (0)	X 100	0,00
		(0)			(0)		

#### 10.4.4 Alokasi Anggaran

Pada Tahun 2021 belum ada Alokasi anggaran ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat.

No	Jenis Pelayanan	Indikator	APBD (Rp)	Sumber lain yang sah	
				Sumber	Jumlah (Rp)
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	000.000.000	-	-
2.	Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	000.000.000	-	-
Jumlah			000.000.000		



#### 10.4.5 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan dan Tata Bangunan di Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau antara lain :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	SDM			Unit	Jumlah Pegawai
		Pendidikan Terakhir	PNS	Non PNS		
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Sarjana dan Pasca sarjana	7	4	-	11
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sarjana dan Pasca sarjana	7	4	-	11

#### 10.4.6 Permasalahan dan Solusi

- a. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Permasalahan internal diantaranya adalah sebagai berikut: Belum dialokasikannya anggaran untuk pemenuhan SPM melalui APBD Kabupaten Sanggau (untuk kegiatan pendataan, sosialisasi, dan pelaksanaan rehabilitasi dan relokasi)
- b. Kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) bidang perumahan rakyat;



- c. Pendataan jumlah rumah layak huni kabupaten yang belum optimal.

Solusi Permasalahan Internal adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya dukungan anggaran dari APBD sehingga SPM bidang Perumahan Rakyat di daerah dapat diselenggarakan secara optimal
- b. Perlunya penambahan SDM Bidang Perumahan dengan jenjang Pendidikan D3 Arsitektur/Sipil.
- c. Optimalisasi pendataan rumah layak huni kabupaten.

Adapun permasalahan eksternal diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Anggaran bantuan stimulan perumahan dari pemerintah pusat melalui (APBN) hanya diperuntukan bagi rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Bukan bagi rumah korban bencana maupun bagi rumah masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.
- b. Bantuan perumahan dari pemerintah pusat hanya berfokus pada lokpri kawasan perbatasan sehingga kecamatan yang berada diluar lokpri kawasan perbatasan menjadi prioritas.

Solusi permasalahan eksternal diantaranya sebagai berikut:

- a. Diharapkan bahwa bantuan untuk perumahan layak huni dapat juga diperuntukan bagi rumah masyarakat korban bencana yang terkena relokasi program pemerintah
- b. Diharapkan bantuan perumahan dari pusat tidak hanya untuk lokpri kawasan perbatasan, tetapi juga untuk diluar lokpri kawasan perbatasan.





## **10.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

### **10.5.1 JENIS PELAYANAN DASAR**

SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 3 (tiga) Sub Urusan, yaitu:

- a. Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
- b. Sub Urusan Kebakaran; dan
- c. Sub Urusan Bencana Daerah.

#### **a. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Jenis Pelayanan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, dengan Jenis Pelayanan Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum.

Sedangkan Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

- a. standar operasional prosedur Satpol PP;
- b. standar sarana prasarana Satpol PP;
- c. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
- d. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Penerima Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu



warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Perkada.

#### **b. Sub Urusan Kebakaran**

SPM Sub Urusan Kebakaran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebagaimana di atas paling sedikit memuat:

- a. Layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran;
- b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- d. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
- e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Mutu Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
- b. prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- c. sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- d. kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;



- e. pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
- f. pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.

**c. Sub Urusan Bencana Daerah**

SPM Sub Urusan Bencana Daerah dilaksanakan hanya pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota meliputi:

- a. pelayanan informasi rawan bencana;
- b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana, paling sedikit memuat:

- a. penyusunan kajian risiko bencana; dan
- b. Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana.

Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, paling sedikit memuat:

- a. penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b. pembuatan rencana kontinjensi;
- c. pelatihan pencegahan dan mitigasi;
- d. gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
- e. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- f. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling sedikit memuat:



- a. respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;
- b. respon cepat darurat bencana;
- c. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
- d. pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Mutu pelayanan dasar dalam pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, meliputi standar:

- a. prosedur operasional penanggulangan bencana;
- b. sarana prasarana penanggulangan bencana;
- c. peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia; dan
- d. pelayanan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.

Pelayanan Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub-Urusan Bencana Kabupaten Sanggau dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Adapun jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana yang wajib disediakan oleh Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana; dan
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana.

Sedangkan penerima pelayanan dasar SPM Sub Urusan Bencana adalah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar pelayanan informasi rawan bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.



### 10.5.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021 sesuai dengan batas waktu pencapaian SPM secara Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14  
Indikator, Nilai SPM, Tahun Pencapaian dan Realisasi Ketentraman,  
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Tahun Pencapaian	Capaian Penerima Layanan Dasar		
		Indikator	Target/ Nilai (%)		Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	2021	22	19	86 %
		Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)	100%	2021	16	3	18,75 %
2.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	2021	15	15	100 %

Indikator Pencapaian SPM Pelayanan Informasi Rawan Bencana adalah setiap warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana berhak memperoleh informasi rawan bencana. Penerima Layanan: Setiap Warga Negara Indonesia di



Kabupaten Sanggau yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana.

1) Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)

Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran: Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah.

Indikator: Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal.

$$\text{Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal (\%)} = \frac{\text{Kemajuan pekerjaandokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$$

Target Capaian: 100% paling lama 1 (satu) Tahun

2) Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana

Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran: Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana.

Indikator: Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana.

$$\text{Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana} = \frac{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai ancaman bencana}} \times 100\%$$

Target Capaian : 100% paling lama satu tahun



a) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Indikator Pencapaian SPM Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah setiap warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana berhak memperoleh layanan pencegahan kesiapsiagaan melalui mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah melalui serangkaian upaya kegiatan pra bencana

Penerima Layanan : Setiap Warga Negara Indonesia di Kabupaten Sanggau yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana.

3) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)

Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM :

Sasaran: Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi.

Indikator: Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal.

$$\text{Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal (\%)} = \frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$$

Target : 100% paling lama satu tahun.

4) Sub Kegiatan Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)

Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM :



Sasaran: Tersedianya data/informasi tentang rencanam kontijensi dalam bentuk dokumen resmi

Indikator : Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan selesai dan sah/legal.

$$\text{Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal (\%)} = \frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen Renkon lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$$

Target : 100% paling lama satu tahun.

5) Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi

Sasaran/Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran: Terlatihnya aparatur yang menangani sub urusan bencana dan warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana.

Indikator : Persentase (%) jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan.

$$\text{Persentase jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan (\%)} = \frac{\text{Jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur dan warga Negara di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$$

Target : 100% paling lama satu tahun

6) Sub Kegiatan Galdi Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran: Terlatihnya warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana.

Indikator: Persentase (%) jumlah warga Negara yang ikut pelatihan.





$$\text{Persentase (\%)} \text{ jumlah warga Negara yang ikut pelatihan} = \frac{\text{Jumlah warga Negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$$

Target : 100% paling lama satu tahun

7) Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM :

Sasaran: Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.

Indikator : Persentase (%) jumlah warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana.

$$\text{Persentase (\%)} \text{ jumlah warga Negara yang mendapat Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana} = \frac{\text{Jumlah warga Negara yang Mendapat layanan Pusdalops}}{\text{Jumlah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$$

8) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran: Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana.

Indikator: Persentase (%) jumlah warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan.



$$\text{Persentase (\%)} \\ \text{jumlah warga} \\ \text{Negara yang} \\ \text{mendapat} \\ \text{peralatan} \\ \text{perlindungan} = \frac{\text{Jumlah warga Negara yang} \\ \text{mendapat peralatan perlindungan}}{\text{Jumlah warga Negara yang berada} \\ \text{di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$$

Target : 100% paling lama satu tahun

- b) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  
Indikator Pencapaian SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana.

Penerima Layanan: Setiap Warga Negara Indonesia di Kabupaten Sanggau.

- 1) Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas

Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran: Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam.

Indikator: Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%).

$$\text{Persentase} \\ \text{Kecepatan Respon} \\ \text{kurang dari 24 Jam} \\ \text{untuk setiap Status} \\ \text{KLB (\%)} = \frac{\text{Jumlah Kecepatan Respon kurang} \\ \text{dari 24 Jam untuk setiap} \\ \text{Penetapan KLB}}{\text{Jumlah seluruh Penetapan Status} \\ \text{KLB}} \times 100\%$$

Target : 100% paling lama satu tahun

- 2) Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana

Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran: Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam.



Indikator: Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%).

$$\text{Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (\%)} = \frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana}} \times 100\%$$

Target : 100% paling lama satu tahun

3) Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran: Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas darurat bencana.

Indikator : Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana.

$$\text{Persentase (\%)} \text{ jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana} = \frac{\text{Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}} \times 100\%$$

Target : 100% paling lama satu tahun

4) Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran: Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

Indikator: Persentase (%) jumlah korban berhasil, dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana.



$$\text{Persentase (\%)} \text{ jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana} = \frac{\text{Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}} \times 100\%$$

Target : 100% paling lama satu tahun

### 10.5.3 Realisasi

Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai ancaman bencana	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana
1	2	3
Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi di lokasi kegiatan: 46.189 jiwa	Jumlah penduduk di lokasi kegiatan 272.564	16,95%
Jumlah 46.189 jiwa	272.564 jiwa	16,95%

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana sebagaimana dimaksud dibedakan atas bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial.



a. Realisasi Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) telah dilaksanakan pada tahun 2015, dan akan dibuat dokumen baru pada tahun 2022.
- 2) Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana.

Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana yakni jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan penyebaran informasi baik berupa penyampaian informasi pencegahan maupun kesiapsiagaan bencana. Sosialisasi dilakukan melalui tatap muka, melalui media sosial dan wahana multimedia, penyediaan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik, dengan lokasi di 22 (Dua Puluh Dua) Desa/Kelurahan pada 9 (Sembilan) Kecamatan sebagaimana data berikut ini:

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH WARGA NEGARA (Org)	KETERANGAN (Tahun Pelaksanaan)
1	2	3	4	5
1	NOYAN	IDAS	2,023	2021
2	JANGKANG	JANGKANG BENUA	2,725	2021
3	JANGKANG	TANGGUNG	2,962	2021
4	JANGKANG	EMPIANG	3,383	2021
5	JANGKANG	PISANG	2,419	2021
6	JANGKANG	KETORI	2,069	2021
7	JANGKANG	TERATI	2,066	2021
8	JANGKANG	SELAMPUNG	1,855	2021
9	BONTI	BAHTA	2,016	2021
10	BONTI	TUNGGUL BOYOK	1,781	2021
11	BEDUAI	MAWANG MUDA	2,184	2021
12	KEMBAYAN	MOBUI	1,853	2021
13	KEMBAYAN	SEBUDUH	2,513	2021
14	TAYAN HULU	MANDONG	1,891	2021
15	TAYAN HULU	JANJANG	1,855	2021
16	TAYAN HULU	BERAKAK	1,794	2021
17	TAYAN HULU	ENKASAN	1,696	2021
18	TAYAN HILIR	MELUGAI	1,492	2021
19	TOBA	BELUNGAI DALAM	1,043	2021
20	TOBA	SANSAT	1,781	2021
21	TOBA	KAMPUNG BARU	1,689	2021
22	ENTIKONG	SURUH TEMBAWANG	3,099	2021
JUMLAH WARGA NEGARA			<b>46,189</b>	



b. Realisasi Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) belum pernah dilaksanakan, dan akan dibuat dokumen baru pada tahun 2022.
- 2) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi, Dokumen Renkon yang telah dibuat yakni Renkon Tahun 2017, berdasarkan dokumen Renstra direncanakan akan dibuat kembali dokumen Renkon Banjir, Angin Putting Beliung dan Tanah Longsor serta Karhutla pada tahun 2022 dan 2023.
- 3) Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi

Jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan Warga Negara di kawasan rawan bencana	Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan
1	2	3
36 jiwa	Jumlah penduduk di lokasi kegiatan 276.564 jiwa	0,01 %
Jumlah 36 jiwa	276.564 jiwa	0,01 %

Dilakukan baik di dalam ruang maupun luar ruang dengan menggunakan sarana prasarana pencegahan dan kesiapsiagaan, dengan lokasi di 4 (empat) Desa pada 3 Kecamatan di Kabupaten Sanggau, sebagaimana data berikut ini:



NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH PESERTA (Org)	KETERANGAN (Tahun Pelaksanaan)
1	2	3	4	5
1	Kapuas	Penyeladi	9	2021
2	Tayan Hilir	Kawat	9	2021
3	Tayan Hilir	Pedalaman	9	2021
4	Mukok	Mukok	9	2021
<b>JUMLAH WARGA NEGARA</b>			<b>36</b>	

1) Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

Jumlah Warga Negara yang ikut Gladi Kesiapsiagaan	Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	100% selama satu tahun
1	2	3
600 orang	Jumlah penduduk di lokasi kegiatan 276.564 orang	0,22 %
Jumlah 600 Jiwa	276.564 jiwa	0,22 %

2) Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops	Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	100% selama satu tahun
1	2	3
Hasil <i>assiment</i> : -	276.564 jiwa	-
-	276.564 jiwa	-



3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

Jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	100% selama satu tahun
1	2	3
-	276.564 Orang	-
-	276.564 Jiwa	-

c. Realisasi Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

1) Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit/Wabah Zoonosis.

Jumlah kecepatan respon kurang 24 jam untuk setiap penetapan KLB	Jumlah seluruh penetapan status KLB	100% selama satu tahun
1	2	3
1 kali	1 kali	100%
Jumlah 1 kali	1 kali	100%

2) Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota.

Jumlah kecepatan respon kurang 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana	Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana	100% Selama satu tahun
1	2	3
2 kali	2 kali	100%
Jumlah 1 kali	1 kali	100%





3) Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah seluruh petugas dalam penangan darurat bencana	100% Selama satu tahun
1	2	3
20 orang	20 orang	100%
Jumlah 20 orang	20 orang	100%

4) Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana.

Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	100% Selama satu tahun
1	2	3
1.420 jiwa	1.420 jiwa	100 %
Jumlah 1.420 jiwa	1.420 jiwa	100 %

Dengan demikian, maka Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.15**

Capaian SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2021

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Tahun Capaian	Realisasi Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	2021	16,95%
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2021	0,01



3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	2021	100%
---	--	------	------	------

#### 10.5.4 Alokasi Anggaran

Dalam rangka menunjang penerapan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub Urusan Bencana Tahun 2021, BPBD kabupaten Sanggau mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.710.239.784,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) untuk 1 (satu) Program dengan jumlah 3 (tiga) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan SPM Sub Urusan Bencana	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
I		<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>			
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	628.792.208	617.865.980	98,26%
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	193.379.769	192.174.152	99,38%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	436.347.114	428.324.420	<b>98,16%</b>
		Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana	398.136.667	397.349.442	<b>99,80%</b>
		Pemenuhan kebutuhan dasar Korban Bencana	79.239.952	74.579.890	94,12%
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>1.735.895.710</b>	<b>1.710.239.784</b>	<b>98,52%</b>



### 10.5.5 Dukungan Personil

#### SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

NO.	TENAGA	SATPOL-PP
1.	PNS	53
2.	Non PNS	78
3.	Relawan TRC Penanggulangan Bencana	-
<b>JUMLAH</b>		<b>131</b>

#### BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota pada BPBD Kabupaten Sanggau Tahun 2021 sebanyak 51 (lima puluh satu) orang dengan rincian sebagai berikut:

NO.	TENAGA	SATPOL-PP
1.	PNS	21
2.	Non PNS	10
3.	Relawan TRC Penanggulangan Bencana	20
<b>JUMLAH</b>		<b>51</b>

### 10.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi terkait penerapan dan capaian indikator SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota di Kabupaten Sanggau Tahun 2021 sebagai berikut:

Permasalahan:

- a) Jumlah Personel dalam melakukan Pelayanan masih dinilai kurang memadai;
- b) Keamanan layanan belum sesuai dengan keinginan masyarakat



yang memerlukan pelayanan yang maksimal.

- c) Belum semua indikator SPM dapat dengan Mudah diintegrasikan dengan RPJMD, Rentra SKPD, RKPD dan Renja Perangkat Daerah;
- d) Keterbatasan anggaran yang ada, sehingga penganggaran pada BPBD Kabupaten Sanggau Tahun 2021 belum seluruhnya berorientasi pada SPM;
- e) Belum semua Pelaksana SPM, memahami SPM sebagai sebuah instrument yang konfrehensif, mengingat belum semua pegawai BPBD Kabupaten Sanggau mendapatkan peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis terkait penerapan SPM Tahun 2021; serta
- f) Tidak semua data dasar tersedia dan data cenderung kurang diperbarui.

Solusi:

- a) Diperlukan penambahan personel di Satpol PP dan Damkar yang berkompeten;
- b) Diperlukan pelatihan/penyegaran Bimtek Pelayanan PRIMA kepada *frontliners*/petugas layanan secara kontinue/berkelanjutan.
- c) Peningkatan Komitmen masing-masing SKPD pengampu SPM dalam penerapan SPM;
- d) Perlu adanya penerapan analisis biaya yang berorientasi pada SPM;
- e) Perlu peningkatan kapasitas SDM Aparatur melalui diklat/bimtek terkait; serta
- f) Perlu peningkatan kapasitas SDM Aparatur melalui diklat/bimtek terkait.



## **10.6 URUSAN SOSIAL**

### **10.6.1 JENIS PELAYANAN DASAR**

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial memuat tentang ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap penyandang masalah kesejahteraan sosial secara maksimal. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial mendefinisikan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebagai perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Dalam Peraturan menteri tersebut lebih lanjut ditentukan 5 jenis pelayanan dasar bidang sosial serta indikator dan target SPM yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

### **10.6.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH**

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah



melalui kementerian terkait. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, pemerintahan daerah wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM, yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai batas waktu pencapaian. Pencapaian SPM urusan sosial tersebut diukur melalui pencapaian indikator di masing-masing jenis layanan.

### 10.6.3 REALISASI

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Tahun Pencapaian	Capaian Penerima Layanan Dasar		
		Indikator	Target/ Nilai (%)		Target	Realisasi	Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2021	80%	13,33%	16,66%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	2021	80%	80%	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	2021	80%	30,04%	37,55%



No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Tahun Pencapaian	Capaian Penerima Layanan Dasar		
		Indikator	Target/ Nilai (%)		Target	Realisasi	Capaian
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	2021	80%	80%	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten / Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten / Kota	100%	2021	80%	80%	100%



#### **10.6.4 ALOKASI ANGGARAN**

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal Bidang Sosial pada tahun 2021 sebesar Rp 1.619.903.741,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. APBD sebesar Rp 1.619.903.741,00
- b. APBN sebesar Rp 0,00

Sumber dana lain yang sah sebesar Rp 0,00

#### **10.6.5 DUKUNGAN PERSONIL**

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang Sosial sejumlah 70 orang dengan Mitra Kerja baik dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarg Berencana Kabupaten Sanggau maupun dari masyarakat seperti Pendamping PKH, Pendamping BPNT, Peksos, TKSK, dan TAGANA.

#### **10.6.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan target SPM urusan sosial adalah :

- a. Belum semua PMKS dapat menerima bantuan karena masih terbenturnya dengan aturan yang ada. Hal tersebut disebabkan oleh persyaratan penerima bantuan harus : masuk dalam Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosia.
- b. Belum semua Lembaga Kesejahteraan Sosial mengajukan ijin sehingga tidak dapat mengajukan bantuan untuk melengkapi sarana dan prasarana panti.

Adapun solusi terhadap kendala tersebut adalah :

- a. Calon penerima bantuan yang belum masuk Basis Data Terpadu di usulkan melalui mekanisme pemutakhiran Basis Data Terpadu.





- b. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima bantuan melalui data terpadu kesejahteraan sosial.

## **10.7 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui 6 (enam) pengampu Perangkat Daerah di Kabupaten Sanggau Tahun 2021, menerapkan 6 (enam) Urusan SPM dengan Program Kegiatan, adalah sebagai berikut :

### **10.7.1 URUSAN PENDIDIKAN**

Pada Tahun 2021 Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau menerapkan beberapa program yang berkaitan dengan SPM, program tersebut meliputi 3 (tiga) aspek dan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini, adapun kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian SPM Bidang Pendidikan diantaranya:
  - a. Pembangunan gedung sekolah, yang bertujuan untuk menambah jumlah bangunan PAUD.
  - b. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa, yang bertujuan untuk menambah alat peraga sebagai pendukung pembelajaran pada SPM.
  - c. DAK Non Fisik, yang bertujuan untuk memberikan bantuan keringanan terhadap orang tua, supaya dapat menyekolahkan anak-anaknya ke PAUD.
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun meliputi kegiatan:
  - a. Pembangunan gedung sekolah, Gedung sekolah yang dibangun meliputi Gedung sekolah SD dan SMP, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan jarak antara



- masyarakat dengan sekolah, sehingga tidak terlalu jauh jangkauan dari masyarakat.
- b. Penambahan ruang kelas sekolah, tujuan ini berkaitan dengan SPM yang menunjukkan bahwa setiap rombel harus memiliki satu ruang kelas demi pelayanan yang lebih baik.
  - c. Bantuan kepada Siswa miskin melalui sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik untuk jenjang SD dan SMP dengan menargetkan siswa Pendidikan dasar yang belum terpenuhi kebutuhannya melalui PIP.
3. Program Pendidikan Non Formal
- a. Ujian Nasional Paket Kesetaraan, yang bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak mengenyam Pendidikan formal, sehingga dapat menambah nilai terhadap pencapaian SPM Bidang Pendidikan.

### 10.7.2 URUSAN KESEHATAN

Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau sebagai salah satu Perangkat Daerah pengampu SPM dengan rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Program dan Kegiatan Penunjang SPM  
Dinas Kesehatan Kab.Sanggau Tahun 2021

No.	Program	Kegiatan	
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat



No.	Program	Kegiatan	
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit
			Operasional Pelayanan Puskesmas
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana pendukungnya
			Pembangunan Puskesmas
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			Pengadaan Obat, Vaksin
			Pengadaan Bahan Habis Pakai
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)



### 10.7.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

Sesuai dengan Renstra SKPD dan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, maka untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan di atas, Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Bidang Keciaptakaryaan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan, kegiatannya meliputi :
  - a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM;
  - b. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan;
  - c. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
  - d. Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
2. Pembangunan Sanitasi Lingkungan Perdesaan, kegiatannya meliputi:
  - a. Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
  - b. Pembangunan/ Penyediaan Sarana Dan Prasarana IPLT

Anggaran dan Realisasi Program Kegiatan Bidang Keciaptakaryaan yang Menunjang Pencapaian SPM Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan sebagaimana tabel berikut ini:

Program dan Kegiatan SPM  
Dinas Perumahan Cipta Karya Tata Ruang dan  
Pertanahan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/Sub Kegiatan/Pekerjaan	SUMBER DANA	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
				FISIK	KEUANGAN	
				(%)	(Rp)	(%)
1	3	4	5	6	7	8



	Program Pengeloaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan ( DAU )					
	Belanja Persediaan Untuk Dijual /Diserahkan - Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat					
1	Kegiatan Fisik Pamsimas Ds. Engkasan Kec. Tayan Hulu	DAU TA. 2021	245.000.000	100	245.000.000	100
2	Kegiatan Fisik Pamsimas Ds. Mobui Kec. Kembayan	DAU TA. 2021	245.000.000	100	245.000.000	100
3	Kegiatan Fisik Pamsimas Ds. Padi Kaye Kec. Balai	DAU TA. 2021	245.000.000	100	245.000.000	100
4	Kegiatan Fisik Pamsimas Ds. Rambin Kec. Kapuas	DAU TA. 2021	245.000.000	100	245.000.000	100
5	Pemb. Pipanisasi RT. Titi Berayun Dsn. Sanyang Ds. Bulu Bala Kec. Balai	DAU TA. 2021	199.980.000	100	198.883.768	100
6	Pemb. SPAM Air Bersih Dsn Mandong Ds. Mandong Kec. Tayan Hulu	DAU TA. 2021	199.980.000	100	199.327.203	100
7	SPAM DAU Air Bersih Dsn Peruan Dalam Ds. Peruan Dalam Kec. Tayan Hulu	DAU TA. 2021	199.980.000	100	199.897.938	100
8	SPAM DAU Air Bersih Saguk Ds. Menyabo Kec. Tayan Hulu	DAU TA. 2021	199.980.000	100	199.819.129	100
9	SPAM DAU Pemb. Bak Penampungan Air Dsn. Entakai 2 Ds. Entakai Kec. Kapuas	DAU TA. 2021	149.500.607	100	149.199.999	100
10	SPAM DAU Pemb. Sarana dan Prasarana Air Bersih Dsn. Balai Tanjung Bungan Ds. Kunyil Kec. Meliau	DAU TA. 2021	199.980.000	100	199.595.593	100
11	SPAM DAU Pemb. Sarana dan Prasarana Air Bersih Dsn. Embawang Ds. Cupang	DAU TA. 2021	199.980.000	100	199.661.569	100
12	SPAM DAU Pemb. SPAM Dsn. Sengkuang Ds. Sei. Muntik Kec. Kapuas	DAU TA. 2021	199.980.000	100	198.556.427	100



13	SPAM DAU Pemb. SPAM Sungai Souak Dsn. Tatai Tukung Ds. Sungai Dangin Kec. Noyan	DAU TA. 2021	199.980.000	100	198.876.880	100
14	SPAM DAU PIPANISASI Air Bersih Mputih Dsn. Kedondong Ds. Pandan Sembuat, Kec. Tayan Hulu	DAU TA. 2021	199.980.000	100	198.745.883	100
15	SPAM DAU Sumur Bor Dsn. Seribot Ds. Semirau Kec. Jangkang	DAU TA. 2021	199.980.000	100	199.315.120	100
16	SPAM DAU Sumur Bor RT.10 Afdeling 2 Sei. Dekan Ds. Kuala Buayan Kec. Meliau	DAU TA. 2021	199.980.000	100	199.195.221	100
	Program Pengeloan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan ( DAK )					
	Belanja Persediaan Untuk Dijual /Diserahkan -Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat					
17	DAK Air Minum Ds. Embala Kec. Parindu	DAK TA. 2021	357.500.000	100	357.500.000	100
18	DAK Air Minum Ds. Enggadai Kec. Meliau	DAK TA. 2021	396.000.000	100	396.000.000	100
19	DAK Air Minum Ds. Lape Kec. Kapuas	DAK TA. 2021	533.500.000	100	533.500.000	100
20	DAK Air Minum Ds. Maju Karya Kec. Parindu	DAK TA. 2021	357.500.000	100	357.500.000	100
21	DAK Air Minum Ds. Mengkiang Kec. Kapuas	DAK TA. 2021	357.500.000	100	357.500.000	100
22	DAK Air Minum Ds. Pandan Sembuat Kec. Tayan Hulu	DAK TA. 2021	352.000.000	100	352.000.000	100
23	DAK Air Minum Ds. Pisang Kec. Jangkang	DAK TA. 2021	440.000.000	100	440.000.000	100
24	DAK Air Minum Ds. Semerangkai Kec. Kapuas	DAK TA. 2021	357.500.000	100	357.500.000	100



25	DAK Air Minum Ds. Semoncol Kec. Balai	DAK TA. 2021	357.500.000	100	357.500.000	100
26	DAK Air Minum Ds. Sosok Kec. Tayan Hulu	DAK TA. 2021	357.500.000	100	357.500.000	100
27	DAK Air Minum Ds. Sungai Muntik Kec. Kapuas	DAK TA. 2021	440.000.000	100	440.000.000	100
28	DAK Air Minum Ds. Tanggung Kec. Jangkang	DAK TA. 2021	616.000.000	100	616.000.000	100
29	DAK Air Minum Ds. Tebang Benua Kec. Tayan Hilir	DAK TA. 2021	299.200.000	100	299.200.000	100
30	DAK Air Minum Ds. Temiang Mali Kec. Balai	DAK TA. 2021	286.000.000	100	286.000.000	100
	Program Pengeloaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan  Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					
31	Peningk. SPAM (Hibah Air Minum 2021) Ds. Balai Ingin Kec. Tyn. Hilir	DAU TA. 2021	199.980.000	100	198.755.970	100
32	Peningk. SPAM (Hibah Air Minum 2021) Ds. Idas Kec. Noyan	DAU TA. 2021	199.980.000	100	199.539.319	100
33	Peningk. SPAM (Hibah Air Minum 2021) Ds. Lintang Pelaman Kec. Kapuas	DAU TA. 2021	199.980.000	100	198.868.451	100
34	Peningk. SPAM (Hibah Air Minum 2021) Ds. Mengkiang Kec. Kapuas	DAU TA. 2021	199.980.000	100	198.999.999	100
35	Peningk. SPAM (Hibah Air Minum 2021) Ds. Nanga Biang Kec. Kapuas	DAU TA. 2021	199.980.000	100	198.999.997	100
36	Peningk. SPAM (Hibah Air Minum 2021) Ds. Tebang Benua Kec. Tyn. Hilir	DAU TA. 2021	199.980.000	100	185.047.000	100



37	Peningk. SPAM (Hibah Air Minum 2021) Ds. Tunggul Boyok Kec. Bonti	DAU TA. 2021	199.980.000	100	198.455.548	100
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					
	Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan					
	Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					
38	Rehab. Broncaptering Dsn. Penyeladi Hilir Ds. Penyeladi Kec. Kapuas	DAU TA. 2021	199.923.825	100	199.487.000	100
39	Rehab. Jaringan Air Bersih Dsn. Tonye Kec. Kapuas	DAU TA. 2021	199.923.825	100	199.222.187	100
40	Rehab. PIPANISASI Dsn. Kubing Ds. Kasromego Kec. Beduai	DAU TA. 2021	199.923.825	100	198.940.121	100
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah					
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat					
	Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					
41	Pemb. Toilet di Kec. Balai	DAU TA. 2021	199.746.036	100	199.315.000,00	100
42	Pemb. Toilet di Desa Bunggang Kec. Sekayam	DAU TA. 2021	199.746.036	100	199.016.751,33	100
43	Toilet Paroki Entikong Dsn. Sontas Ds. Entikong Kec. Entikong	DAU TA. 2021	159.238.099	100	158.896.865,00	100
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah					
	Pembangunan/Penyediaan Sarana Dan Prasarana IPLT					





44	Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					
45	Desa Empirang Ujung Kec. Balai	DAK SANITASI TA. 2021	508.750.000	100	507.890.000	100
46	Desa Lape Kec. Kapuas	DAK SANITASI TA. 2021	508.750.000	100	507.870.000	100
47	Desa Lintang Pelaman Kec. Kapuas	DAK SANITASI TA. 2021	508.750.000	100	508.120.000	100
48	Desa Mengkiang Kec. Kapuas	DAK SANITASI TA. 2021	508.750.000	100	508.070.000	100
49	Desa Semombat Kec. Jangkang	DAK SANITASI TA. 2021	508.750.000	100	508.160.000	100
50	Desa Temiang Mali Kec. Balai	DAK SANITASI TA. 2021	508.750.000	100	507.910.000	100
	Jumlah		14.447.842.253	100	14.410.338.938	100

#### 10.7.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

##### 1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Seksi Pengelolaan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan Program kegiatan sebagai berikut:

Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Kegiatan : Penanganan Bantuan Rumah Akibat Bencana Alam/Sosial

Anggaran : Penanganan Bantuan Rumah



Akibat Bencana Alam/Sosial

Anggaran APBD : Rp. 000.000.000,-

Anggaran APBN : Rp. 000.000.000,-

b. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dan Tujuan Kegiatan Penanganan Bantuan Rumah Akibat Bencana Alam/Sosial adalah fasilitasi dan verifikasi beserta perbaikan rumah akibat bencana alam/sosial.

c. Sasaran Kegiatan

Pendataan rumah rusak akibat bencana alam/sosial.

d. Ruang Lingkup Kegiatan:

1. Pendampingan Penanganan Rumah akibat bencana alam/sosial.
2. Pendataan rumah rusak akibat bencana alam/sosial.

2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau, dengan Program Kegiatan sebagai berikut:

Program : Pengembangan  
Perumahan

Kegiatan : Peningkatan Kualitas  
Rumah Tidak Layak Huni

Anggaran APBD : Rp. 000.000.000,-

Anggaran APBN : -

b. Maksud dan Tujuan Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni adalah meningkatkan



kualitas tempat tinggal melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan, baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan.

c. Sasaran Kegiatan

Rehabilitasi rumah tidak layak huni

d. Ruang Lingkup Kegiatan:

1. Pendampingan Penanganan Rumah akibat relokasi program pemerintah;
2. Pendataan rumah rusak akibat relokasi program pemerintah;
3. Pembangunan rumah rusak akibat relokasi program pemerintah.

### **10.7.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

1. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Urusan Kebakaran

Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau sebagai salah satu Perangkat Daerah pengampu SPM dengan rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan
1.	Program Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
2.	Program Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran



## 2. Sub Urusan Bencana

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub Urusan Bencana pada BPBD Kabupaten Sanggau Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan
I	Program Penanggulangan Bencana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;</li><li>2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;</li><li>3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;</li><li>4. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;</li><li>2. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;</li><li>3. Respon Cepat Darurat Bencana;</li><li>4. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana;</li><li>5. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li></ol>



### 10.7.6 URUSAN SOSIAL

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial;	Program Pelayanan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	a. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;. b. Penyediaan Permakanan; c. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten Kota untuk di Pulangkan ke Desa / Kelurahan asal; dan d. Pemberian Layanan Rujukan
2.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	Program Pelayanan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Makanan, Penyediaan Sandang dan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sanggau Tahun 2021 telah disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, LKPJ Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ringkasan LPPD kepada masyarakat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini, merupakan laporan tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019 - 2024.

Manajemen berbasis kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan pada dasarnya bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, akan tetapi lebih dari itu. Esensi dari manajemen berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya (anggaran) adalah alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran (*output*), hasil (*outcome*) maupun dampak (*impact*).

Pengukuran kinerja merupakan salah satu sisi penting dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebijakan, program, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pengukuran kinerja bermanfaat Sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah secara dan berkesinambungan serta mendorong Pemerintah Daerah untuk



melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan fungsinya secara baik dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka Tugas Pembantuan masih terbatas. Tugas Pembantuan yang diterima yakni dari Pemerintah Provinsi adalah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau.

Pemerintah Kabupaten Sanggau telah menerapkan 6 (enam) bidang urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam rangka memberikan pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan umpan balik (*feed back*) kepada Kabupaten Sanggau dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga pada akhirnya **“SANGGAU MAJU DAN TERDEPAN”** dapat terwujud.

